

**EVALUASI PELAKSANAAN RTRW
PADA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

SUPRIYANTO

L 4 D 003121



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**EVALUASI PELAKSANAAN RTRW
PADA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

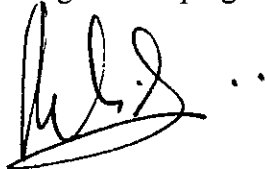
SUPRIYANTO
L4D003121

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 29 Agustus 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

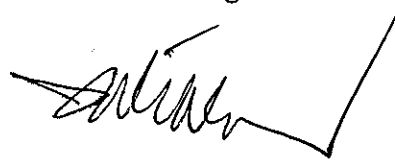
Semarang, Agustus 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Pembimbing Utama



Ir. Nany Yuliasuti, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro





Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, Agustus 2005



SUPRIYANTO
L4D003121

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4218 / T / MPWK / e ₁
Tgl.	10 / 5 06

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ibuku tercinta Suyatni, Almarhum Bapakku Surat Sastro
Wiratno, Istriku tercinta Herlaningtyas Dyah Rastanti, Anakku
Muzafa Hafidz Bramudya dan Tsania Hasna Azizah, Alm Mb.
Sri&Mas Rawuh, Mb Endang&Mas Agus, Mb Umi& Mas Agus, Dik
Kinan&Dik Eka, Ibunda Sri Saraswati&Bapak Sukarlan, Dik
Dining & Dik Ari, Dik Totok&Dik Arni, Dik Pipit dan Dik Novi

ABSTRAKSI

Dokumen RTRW Kota Batam dimaksudkan untuk dapat membantu Pemerintah Kota Batam dalam menyiapkan sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan kota yang didalamnya memuat rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang, untuk mewujudkan tertib pembangunan kota (pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) dimasa yang akan datang. Sehingga dokumen RTRW Kota Batam sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang, merumuskan kebijaksanaan, arahan, strategi dan konsep pengembangan serta rencana pengembangan dan arahan program-program pembangunan kota (indikasi program) sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik kota.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RTRW pada program pembangunan Kota Batam yang diusulkan oleh dinas/instansi terkait dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tabulasi silang yang dilakukan terhadap hasil penyebaran kuesioner kepada 16 instansi/dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mempunyai program pembangunan fisik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar (81%) program pembangunan yang diusulkan oleh dinas/ instansi terkait pada tahun 2004 telah sesuai dengan arahan yang terdapat di dalam RTRW. Namun dari hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa sebagian besar (93,7%) dinas/ instansi tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Faktor paling utama yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW oleh dinas/instansi dalam penyusunan usulan program pembangunan adalah karena substansi RTRW masih terlalu umum sebesar 56,3%. Sebesar 68,8 % responden sebenarnya mengetahui adanya RTRW, tetapi sebanyak 75,1% tidak memahami materi RTRW dan sebanyak 68,8% tidak memperhatikan RTRW dalam proses penyusunan program pembangunan. Faktor lain yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW dalam proses penyusunan program pembangunan adalah rendahnya pemahaman RTRW akibat kurangnya sosialisasi oleh dinas terkait, dalam hal ini Bappeda Kota Batam. Kondisi SDM yang ada di dalam Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda sendiri secara kuantitatif dan kualitatif tidak sebanding dengan tugas yang diemban, akibatnya adalah tugas sosialisasi RTRW, sebagai salah satu tugas pokok Bidang Fisik dan Prasarana tidak berjalan dengan maksimal.

Rekomendasi yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalah menjabarkan RTRW dalam rencana detail tata ruang, mensosialisasikan RTRW yang lebih intensif dan lebih kontinyu, mengarahkan program pembangunan sesuai dengan RTRW, memberikan prioritas program pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan penambahan SDM di Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam.

Kata kunci: Program Pembangunan, Perencanaan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

ABSTRACT

Batam City RTRW document is aimed to help the local government of Batam City in preparing a city development guidenlines which accomodates plan and guidance of space design and sectoral development program in order to create a correct city development (exploitation and control on city space) in the future. RTRW document, which spells out strategy and guidance of space exploitation policy, formulates policy, guidance, development strategy and concept, development plan, and city development guidance (program indication) as a guidance of city space exploitation and control activities in order to create balance in social, ekonomi and physical city environment development.

According to the above matter, the reseacrh is aimed to evaluate RTRW implementation on Batam City development suggested by elated agencies/ offices and the influential factors. To achieve the purpose, a qualitative deskriptive analysis thecnique was used on questionnaires result. The questionnaires were distributed ti 16 agencies/ offices which have physical development programs an Batam City local development.

The analysis result showed that most development programs (81%) which were suggested by the agencies/ offices in 2004 followed RTRW guidenlines. On the other hand, it was also shown that most agencies/ offices (93,7%) did not use RTRW in making the development program proposal.

The main factor that made the agencies/ offices decided not to use RTRW was its substance which concidered too general, i.e 56,3%. A number of 68,8% responden was aware of the existence of RTRW but 75,1% did not undrstand the material and 68,8% did not concider RTRW in the process of makin development programs. Another influential factor in not using RTRW in the process making of making development programs is low level of understanding the RTRW caused by lack of socialization by related department, i.e. Batam City Regional Development Agency. The human resources of infrastructure and pshycal affair are qualitatively and quantitatively incompetent which makes one of the main job of infrastructure and physical affair (i.e. socialization) does not work well.

The research result recommended to spell out RTRW in the detail plan of the space design, to socialize RTRW more intensive and contunues, to direct development program according to RTRW, to give priority to development programs which follow RTRW and develop the human resouces of Infrastructure and Physical Affair of Batam City Regional Department Agensciy.

Key words: Development Program, Planning, Regional Spatial Plan (RTRW)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan semua rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Tema yang diangkat sebagai kasus penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Pelaksanaan RTRW pada Program Pembangunan Kota Batam. Tema ini sangat perlu dikaji karena fenomena yang terjadi selama ini bahwa produk tata ruang hanya digunakan kaitannya dengan perijinan saja. Sangat naif sekali usaha yang telah dilakukan oleh semua pihak dalam upaya menyusun suatu produk tata ruang, tidak dilihat sebagai suatu arahan/panduan bagi pelaksanaan pembangunan. Padahal kalau kita lihat fungsi tata ruang bisa mengendalikan pemanfaatan ruang, mengarahkan pengembangan suatu kota serta arahan lokasi investasi yang dilakukan oleh *sector public* maupun *private*.

Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dikaji dalam kaitannya penggunaan RTRW pada program pembangunan Kota Batam, yaitu factor pengetahuan, pemahaman dan perhatian terhadap RTRW oleh dinas/instansi yang mempunyai program pembangunan fisik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Akan lebih baik dan lebih indah sekiranya saya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Ir. Nany Yulastuti, MSP, selaku mentor, yang telah dengan sabar banyak memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan tesis ini sampai selesai.
2. Bapak Ir. Holi Bina Wijaya, MUM, selaku co-mentor, yang juga telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan tesis ini sampai selesai .
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA, selaku pembahas dalam sidang pembahasan pra tesis dan ujian tesis, yang telah memberikan masukan dan wawasan yang luas bagi penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Samsul Ma'arif, SP, MT, selaku penguji dalam sidang ujian tesis yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
5. Bapak R. Azmansyah, Kasubid Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Batam, yang telah mau memberikan data-data baik data primer (wawancara) maupun data sekunder.
6. Ibunda Suyatni, atas segala kasih sayang, kesabaran dan doanya kepada penulis selama ini.
7. Istriku tercinta Herlaningtyas Dyah Rastanti, SE yang telah membantu dan memberikan dorongan spirituil kepada penulis, sehingga bisa segera menyelesaikan studi di MTPWK UNDIP ini.
8. Ananda Muzafa Hafidz Bramudya dan ananda Tsania Hasna Azizah, kedua putera puteriku tercinta , yang telah rela memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan kerja di Kantor Almatra Group Batam, yang telah memberikan bantuan, pengertian dan dorongan penuh, sehingga penulis dapat segera menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa MTPWK UNDIP di Batam tahun 2003, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu berdiskusi dalam membahas materi tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan demi tercapainya kualitas materi yang ideal, maka saya membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, tesis ini kupersembahkan bagi kemajuan bangsa dan negaraku tercinta dan semoga bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Semarang, Agustus 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Sasaran Penelitian.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Konsep Penelitian.....	15
1.6.2 Metode Penelitian.....	19
1.6.2.1 Metode Analisis.....	19
1.6.2.2 Kebutuhan Data.....	23
1.6.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
1.7 Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PENATAAN RUANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Pengertian-pengertian.....	35
2.1.1 Perencanaan.....	35
2.1.2 Pembangunan.....	41
2.1.3 Perencanaan Pembangunan.....	45
2.2 Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan.....	48
2.3 Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan.....	50
2.4 Peran Rencana Tata Ruang dalam Perencanaan Pembangunan.....	52
2.5 Penataan Ruang.....	54
2.6 Pengertian Tata Ruang	56
2.7 Rencana Tata Ruang.....	58
2.8 Penentuan Skala Prioritas dan Pengambilan Keputusan.....	63

2.9 Evaluasi, Kinerja dan Kriteria Kebijakan Publik.....	64
2.10 Rangkuman Kajian Pustaka.....	66
BAB III KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BATAM	
3.1 Kebijakan Penataan Ruang Kota Batam.....	72
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kota Batam.....	72
3.1.2 Perkembangan Kota Batam Menurut Master Plan Otorita.....	77
3.1.3 Kebijakan RTRW	81
3.1.3.1 Fungsi RTRW.....	81
3.1.3.2 Tujuan dan Sasaran RTRW.....	82
3.1.3.3 Indikasi Program RTRW.....	85
3.1.3.4 Saran dan Tindak RTRW	93
3.2 Proses Perencanaan Pembangunan Kota Batam.....	98
3.2.1 Forum Koordinasi Pembangunan Daerah.....	98
3.3 Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kota Batam	101
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Hasil Rakorbang II Kota Batam Tahun 2004.....	105
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN RTRW DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM	
4.1 Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Pembangunan Kota Batam Tahun 2004 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	107
4.2 Analisis Peran Instansi Terhadap Penggunaan RTRW sebagai Salah Satu Pertimbangan Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	116
4.3 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Digunakannya Rencana Tata Ruang dalam Penyusunan Usulan Program dan Proyek Pembangunan Daerah	119
4.3.1 Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan RTRW.....	119
4.3.2 Pemahaman Instansi Terhadap Materi RTRW.....	121
4.3.3 Perhatian Instansi Terhadap RTRW.....	126
4.4 Analisis terhadap Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Daerah.....	131
4.5 Analisis Proses Sosialisasi RTRW Terhadap Dinas/Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.....	140
4.6 Analisis Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Batam	145
4.7 Analisis Kelembagaan Bidang Fisik Dengan Prasarana Bappeda Kota Batam.....	148
BAB V PENUTUP	
5.1 Temuan Hasil Penelitian.....	154
5.2 Kesimpulan.....	156
5.3 Rekomendasi	158
5.4 Usulan Bagi Studi Lanjutan.....	158

DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	162

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Proses Analisis	17
Tabel I.2.	Matrik Korelasi Pelaksanaan RTRW dalam Penyusunan Program Pembangunan	19
Tabel I.3.	Hubungan Antara Analisa, Data dan Variabel	21
Tabel I.4.	Kebutuhan Data	25
Tabel II.1.	Dokumen Perencanaan Pembangunan di Indonesia	49
Tabel II.2.	Ringkasan Teori	69
Tabel III.1.	Proyeksi Kebutuhan Lahan Tahun 2005.	77
Tabel III.2.	Rencana Tata Guna Lahan Pulau Batam Tahun 2006	79
Tabel III.3.	Indikasi Program Pembangunan di Kecamatan Nongsa Kota Batam Tahun 2001-2011	91
Tabel III.4.	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Hasil Rakorbang II Kota Batam Bidang Fisik dan Prasarana di Kecamatan Nongsa	105
Tabel IV.1.	Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Bidang Fisik dan Prasarana Tahun 2004 terhadap RTRW	115
Tabel IV.2.	Peran Instansi terhadap Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	116
Tabel IV.3.	Alasan Responden Berkaitan dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	117
Tabel IV.4.	Tingkat Pengetahuan Instansi terhadap Keberadaab RTRW Kota Batam	120
Tabel IV.5.	Alasan Responden Berkaitan dengan Pengetahuan terhadap Keberadaan RTRW	120
Tabel IV.6.	Peran Instansi terhadap Pemahaman Materi RTRW Kota Batam	122
Tabel IV.7.	Keterkaitan Pengetahuan Responden terhadap Adanya RTRW dengan Pemahaman terhadap Materi RTRW	123
Tabel IV.8.	Alasan Responden berkaitan dengan Pemahaman Isi Materi RTRW Kota Batam	125
Tabel IV.9.	Perhatian Instansi terhadap RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	127
Tabel IV.10.	Alasan Responden berkaitan dengan Perhatian terhadap RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	128
Tabel IV.11.	Keterkaitan Perhatian Instansi terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	130
Tabel IV.12.	Keterkaitan Pengetahuan terhadap RTRW dengan Pemahaman Isi Materi RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan ...	132
Tabel IV.13.	Keterkaitan Pengetahuan Adanya RTRW dan Perhatian terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	135
Tabel IV.14.	Keterkaitan Pengetahuan Adanya RTRW dan Pemahaman terhadap Isi Materi RTRW dan Perhatian terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Pprogram Pembangunan	137
Tabel IV.15.	Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kajian Awal Penentuan Wilayah Studi	9
Gambar 1.2. Peta Kawasan Studi	11
Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran	14
Gambar 1.4. Kerangka Analisis	20
Gambar 2.1. Proses Perencanaan.....	40
Gambar 3.1. Peta Tata Guna Tanah.....	78
Gambar 3.2. Peta Tata Guna Tanah (Evaluasi Master Plan)	80
Gambar 3.3. Peta Rencana Tata Guna Lahan 2001-2011.....	84
Gambar 3.4. Struktur Bappeda Kota Batam	104
Gambar 4.1. Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Terhadap RTRW Bidang Permukiman	111
Gambar 4.2. Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Terhadap RTRW Bidang Perhubungan.....	112
Gambar 4.3. Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Terhadap RTRW Bidang Persampahan.....	113
Gambar 4.4. Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Terhadap RTRW Bidang Pekerjaan Umum.....	114
Gambar 4.5. Keterkaitan Pengetahuan Responden Terhadap Adanya RTRW dengan Pemahaman Terhadap Materi RTRW	124
Gambar 4.6. Keterkaitan Perhatian Instansi Terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	131
Gambar 4.7. Keterkaitan Pengetahuan Responden Terhadap Adanya RTRW dengan Pemahaman Isi Materi RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	134
Gambar 4.8. Keterkaitan Pengetahuan Terhadap Adanya RTRW dan Perhatian Terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	136
Gambar 4.9. Keterkaitan Pengetahuan Terhadap Adanya RTRW, Pemahaman Terhadap Isi Materi RTRW dan Perhatian Terhadap RTRW dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	139
Gambar 4.10. Proses Sosialisasi RTRW Kota Batam terhadap Dinas/Instansi Terkait	143
Gambar 4.11. Analisis Terhadap Hubungan Proses Sosialisasi dengan Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Program Pembangunan	144
Gambar 4.12. Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan	147
Gambar 4.13. Struktur Organisasi Bidang Fisik dan Prasarana (FISPRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Batam Tahun 2004	152
Gambar 4.14. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi Bidang Fisik dan Prasarana (FISPRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Batam Tahun 2004	152

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Kriteria Responden	162
Lampiran B	Daftar Kuesioner	163
Lampiran C	Daftar Pertanyaan Wawancara	170
Lampiran D	Nilai Skoring	174
Lampiran E	Rekapan Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pemahaman, Tingkat Perhatian dan Tingkat Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Batam	180
Lampiran F	Variabel, Parameter dan Skoring dari Pertanyaan Penelitian	181
Lampiran G	Pengolahan Data SPSS	182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendaya gunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan diberlakukannya “Otonomi Daerah” melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat dikatakan merupakan babak baru dalam pembangunan Kota Batam di masa depan. Babak baru ini tidak hanya menyangkut kewenangan yang lebih luas di bidang pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah (kota), namun juga menyangkut kelembagaan pemerintahan dan pembangunan sehubungan dengan telah dimekarkan dan ditingkatkannya status Batam menjadi “Kota”. Seperti diketahui, melalui UU No. 53 Tahun 1999 status Batam telah ditingkatkan secara definitif dari “Kotamadya Administratif” (PP No. 34 Tahun 1983) menjadi Kota (d/h Kotamadya Daerah Tingkat II). Wilayahnya juga telah diperluas dengan dimasukkannya sebagian dari wilayah Kecamatan Galang dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau ke dalam wilayah Kota Batam, yang selanjutnya melalui UU tersebut telah ditata kembali wilayah administrasinya menjadi 8 (delapan) kecamatan. Sedangkan secara kelembagaan, Kota Batam sebagai daerah otonom juga telah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) sebagai perangkat legislatif, di samping perangkat eksekutif, yaitu Walikota dengan segenap jajaran dinas-dinas /instansi pembantunya.

Bagi keperluan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam sebagai daerah otonom yang baru, di samping pengembangan kelembagaan dan produk-produk hukum pada tingkat kota (Perda, SK Walikota), di Kota Batam juga membutuhkan beberapa dokumen rencana sebagai alat kelengkapan pembangunan kota. Kelengkapan pembangunan kota berupa dokumen rencana pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Salah satu dokumen rencana yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kota Batam adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2001-2011 disusun pada dasarnya untuk memenuhi kelengkapan bagi Pemerintah Kota yang akan berkedudukan sebagai “matra ruang” dari Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) dan RTRW akan berfungsi sebagai pedoman pembangunan Kota dalam jangka panjang (10 tahun), yang operasionalisasinya dilakukan melalui Properda pada setiap 5 tahun (jangka menengah) dan Repetada pada setiap tahunnya (jangka pendek).

Ruang kota sebagai wadah kegiatan sosial – ekonomi masyarakat memiliki keterbatasan dan peluang pengembangan yang tidak sama. Tingginya dinamika kebutuhan ruang dalam rangka mewadahi kepentingan investasi pihak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menuntut adanya tata ruang kota yang mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak (stakeholder). Dalam memanfaatkan ruang kota sering timbul konflik kepentingan diantara kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi masyarakat akibat belum tertatanya ruang kota secara optimal. Hal ini disebabkan karena tidak tegasnya penetapan fungsi-fungsi ruang kota dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak konsisten menurut

fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Tidak adanya keterkaitan fungsional dan struktural antar kegiatan dan kawasan juga sering menjadi penyebab tidak optimal dan tidak terpadunya pemanfaatan ruang kota.

Di dalam dokumen RTRW Kota Batam ini juga sudah dijelaskan, bahwa proses penyusunan dokumen sudah memperhatikan aspirasi segenap lapisan masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan, selain perlu mempertimbangkan keterkaitan dengan wilayah yang lebih luas, baik lingkup regional, nasional maupun internasional. Peran serta masyarakat (partisipasi masyarakat) dalam proses perencanaan Tata Ruang Daerah sudah diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Dokumen RTRW Kota Batam 2001-2011 dimaksudkan untuk dapat membantu Pemerintah Kota Batam dalam menyiapkan sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan kota yang memuat didalamnya rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang, untuk mewujudkan tertib pembangunan kota (pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) dimasa yang akan datang. Sehingga dokumen RTRW Kota Batam sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang, merumuskan kebijaksanaan, arahan, strategi dan konsep pengembangan serta rencana pengembangan dan arahan program-program pembangunan kota (indikasi program) sebagai acuan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik kota.

Proses penyusunan usulan program pembangunan di Kota Batam selama ini melalui pelaksanaan Rakorbang yang telah secara rutin dilaksanakan, yang selanjutnya

ditetapkan sebagai DASK (DaftarAlokasi Satuan Kegiatan). Dalam mengajukan usulan, hampir semua instansi/dinas terkait tidak melihat arahan yang terdapat didalam RTRW tersebut sebagai salah satu acuan, lebih banyak didasari kepada kegiatan rutin dan pengamatan di lapangan serta permintaan dari masyarakat.

Pertanyaan yang sering timbul adalah “*Apakah program-program pembangunan di Kota Batam sudah mengacu pada RTRW Kota Batam?*”

1.2. Rumusan Masalah

Dokumen RTRW Kota Batam sebagai salah satu landasan bagi pelaksanaan pembangunan Kota Batam, menjadi sangat penting artinya bagi setiap tahap pembangunan yang akan dilaksanakan. Sebagai dasar bagi penerapan kebijakan pembangunan Kota Batam, maka dokumen RTRW ini seharusnya diketahui, dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama *stakeholder* pembangunan yang ada.

Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat, Kota Batam membutuhkan arahan pembangunan yang pasti dan terkoordinasi serta konsisten, sehingga tidak ada tumpang tindih antar program. Dokumen RTRW sebagai dokumen tata ruang yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sudah menterjemahkan arahan kegiatan pembangunan kota secara menyeluruh dan terpadu.

Namun selama ini proses penyusunan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai penentu kebijakan akhir pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya bisa menterjemahkan dan bahkan dalam menentukan pola prioritas pembangunan belum atau tidak melihat dokumen RTRW Kota Batam sebagai landasannya, sehingga **program pembangunan yang ada selama ini belum/ tidak sesuai dengan arahan RTRW.**

Dari kondisi tersebut di atas, maka masalah yang diangkat akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian, yaitu: *“Sejauh mana usulan program pembangunan yang disusun sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam dokumen RTRW?”*.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RTRW pada program pembangunan Kota Batam yang diusulkan oleh dinas/instansi terkait dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan studi diatas, sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji kesesuaian arahan pembangunan RTRW dengan program pembangunan yang ada di dalam DASK tahun 2004 .
2. Mengkaji peran instansi dalam penggunaan RTRW.
3. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan.
4. Mengkaji alasan penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan
5. Mengkaji proses sosialisasi RTRW.
6. Mengkaji proses penyusunan program pembangunan oleh dinas/instansi terkait.
7. Mengkaji kelembagaan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Kajian ini lebih ditekankan kepada korelasi hubungan pelaksanaan RTRW pada program pembangunan Kota Batam serta faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Kajian ini merupakan evaluasi terhadap kondisi pelaksanaan program pembangunan Kota Batam yang bersumber pada APBD Kota Batam Tahun 2004. Program yang dimaksud dalam kajian ini dalam arti, kegiatan pembangunan di bidang fisik dan prasarana yang terdapat di dalam bahan Rakorbang.

Kajian ini dibatasi pada pembahasan pelaksanaan RTRW dalam rangka penyusunan program pembangunan Kota Batam dari dinas/instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara usulan program pembangunan Kota Batam dengan RTRW Kota Batam.

Hasil/kesimpulan dari penelitian ini berupa korelasi RTRW terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota Batam, serta faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan yang kemudian akan direkomendasikan kepada instansi/dinas terkait Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan proses sosialisasi RTRW serta usulan program pembangunan yang lebih terarah, seperti yang termuat dalam dokumen RTRW.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Dalam penentuan ruang lingkup spasial (wilayah) penelitian sebagai studi kasus, dilakukan kajian awal, dimana akan diambil kawasan yang mempunyai perkembangan cukup cepat dan mempunyai jumlah program pembangunan pada tahun 2004 paling banyak. Kajian awal tentang penentuan wilayah studi adalah sebagai berikut.

Dengan melihat struktur Kota Batam, dimana terdapat 8 kecamatan, masing-masing kecamatan mempunyai pusat-pusat pertumbuhan dan jenis pengembangan fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Kecamatan Lubuk Baja, dengan pusat pertumbuhan di Nagoya dan sekitarnya, mempunyai fungsi pengembangan perdagangan dan jasa. Daerah ini sebagai kawasan lama dan sudah mengalami titik jenuh.
2. Kecamatan Sei Beduk, dengan pusat pengembangan di Batuaji dan sekitarnya, ditetapkan sebagai pusat permukiman baru. Daerah relatif berkembang dengan pesat, terutama perumahan.
3. Kecamatan Sekupang, dengan pusat pertumbuhan di Sekupang, ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan permukiman. Daerah ini tidak cepat berkembang, walaupun termasuk kawasan yang sudah lama.
4. Kecamatan Batu Ampar, dengan pusat pertumbuhan di Batu Ampar, ditetapkan sebagai kawasan industri dan pelabuhan. Kawasan ini relatif tidak berkembang.
5. Kecamatan Nongsa, dengan pusat pertumbuhan di Batam Center, ditetapkan sebagai kawasan pemerintahan dan jasa. Kawasan ini merupakan kawasan yang sekarang paling pesat pertumbuhannya.
6. Kecamatan Belakang Padang, dengan pusat pertumbuhan di Belakang Padang, ditetapkan sebagai daerah wisata dan permukiman. Daerah ini merupakan daerah *hinterland*.
7. Kecamatan Galang. Dengan pusat di Galang, ditetapkan sebagai kawasan wisata dan agroindustri. Kawasan ini merupakan kawasan *hinterland*, yang kurang berkembang.
8. Kecamatan Bulang, dengan pusat pertumbuhan di Bulang Lintang, ditetapkan sebagai kawasan dengan kegiatan pertanian dan perikanan. Daerah ini merupakan daerah *hinterland*, yang belum berkembang.

Dari kajian tersebut diatas, maka daerah Kecamatan Nongsa merupakan daerah yang sekarang ini paling pesat pertumbuhannya. Untuk lebih jelasnya kajian awal tentang penentuan lokasi studi dapat dilihat di Gambar 1.1.

Sedangkan kalau dikaji dari jumlah keseluruhan jumlah proyek yang dialokasikan di masing-masing kecamatan, maka jumlah terbesar ada di Kecamatan Belakang Padang. (Lihat tabel 1.1. dibawah ini).

Namun karena Kecamatan Belakang Padang tidak termasuk didalam kawasan yang cepat berkembang, maka urutan terbanyak kedua adalah Kecamatan Nongsa yang mempunyai pertumbuhan sangat cepat dan ditetapkan sebagai kawasan pusat pemerintahan dan jasa ditetapkan sebagai wilayah studi dalam penelitian ini. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk pembahasan selanjutnya, ruang lingkup wilayah studi ditetapkan di **Kecamatan Nongsa, Kota Batam.**

Tabel: 1.1. Kegiatan Program Pembangunan di Kota Batam Tahun 2004, Sumber Dana APBD Kota Batam

BIDANG/ PROGRAM	KEGIATAN									
	LUBUK BAJA	SEI BEDUK	SEKUPANG	BATU AMPAR	NONGSA	BELAKANG PADANG	GALANG	BULANG		
BIDANG: PERMUKIMAN										
PROGRAM:										
- PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	5	12	11	10	3	16	6	5		
- PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG	-	3	3	-	-	1	-	-		
- PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH	-	-	4	3	4	-	-	6		
- PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	5	-	-	6		
BIDANG: PEKERJAAN UMUM										
PROGRAM:										
- REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	7	1	1	1	-	23	4	2		
- PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	3	10	8	10	12	13	5	7		
- PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	4	3	-	-	1	-	8	7		
- PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	-	2	5	1	-	-	-		
- PENYELAMATAN HUTAN, TANAH DAN AIR	4	2	5	4	4	13	1	-		
- PEMBINAAN DAERAH PANTAI	-	-	-	-	-	-	5	5		
BIDANG: PERHUBUNGAN										
PROGRAM:										
- PENGEMBANGAN FASILITAS PENUNJANG ANGKUTAN DAN PEJALAN KAKI	-	-	-	-	6	-	5	-		
- PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DERMAGA PONTON	-	-	-	-	-	1	-	-		
- PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASILAUT	-	-	-	-	-	-	-	1		
JUMLAH	33	30	34	33	36	67	34	32		
PERSENTASE	11,04%	10,03%	11,37%	11,04%	12,04%	22,41%	11,37%	10,70%		

1.5. Kerangka Pemikiran

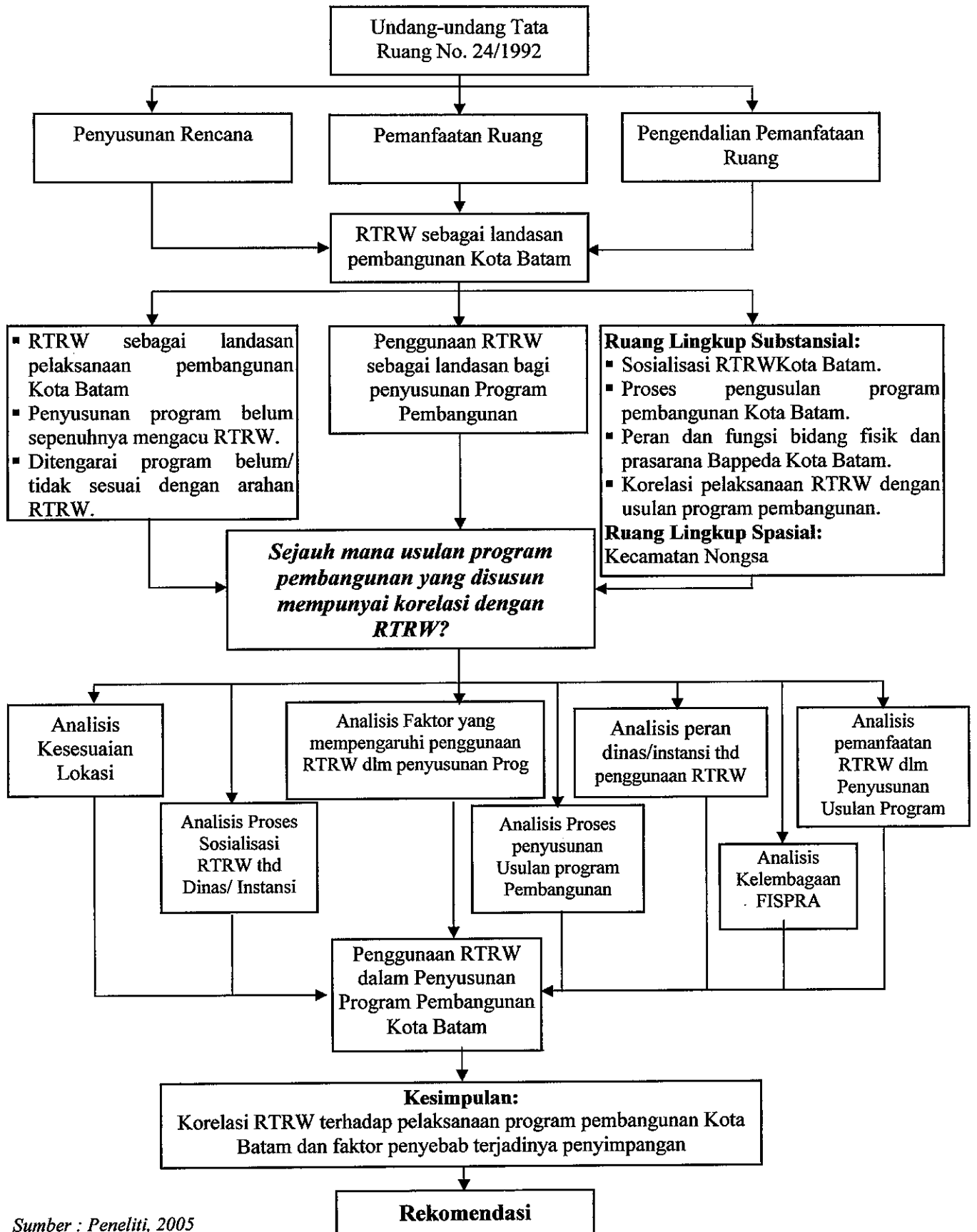
Dengan melihat Undang-undang Tata Ruang 24 Tahun 1992, suatu rencana tata ruang disusun pada dasarnya untuk memenuhi kelengkapan bagi Pemerintah yang mempunyai berkedudukan sebagai “matra ruang” dari setiap tahap pembangunan yang akan dilaksanakan. Didalam UU Tata Ruang 24/92 tersebut sudah diatur bagaimana proses perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang, dimana dalam setiap tahap tersebut harus melibatkan beberapa unsur sebagai bentuk partisipasi seluruh *stakeholder* yang ikut bertanggung jawab. Kinerja Tata Ruang sendiri dapat dilihat dari permasalahan tata ruang yang kemudian menjadi titik awal dari perencanaan suatu wilayah atau kawasan. Hasil perencanaan merupakan “penampilan wajah ruang” yang bisa dilihat secara tiga dimensi, yang merupakan langkah awal pemecahan permasalahan tata ruang yang ada. Dari penampilan wajah ruang ini bisa dilihat apakah beban masyarakat sebagai salah satu unsur ruang bisa mendapatkan manfaat. Dengan perencanaan dan pelaksanaan rencana tata ruang yang ada, beberapa beban masyarakat akan teratasi antara lain:

- Konsumsi waktu dalam perjalanan menjadi lebih sedikit, karena aksesibilitas kota menjadi tinggi
- Harga tanah secara otomatis akan naik,
- Kenyamanan masyarakat dalam kehidupan kota akan meningkat

Sedangkan beban pemerintah juga makin ringan dalam menangani permasalahan yang timbul, karena beberapa biaya yang diperlukan sebagai tanggung jawab terhadap pembangunan kota makin jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari beberapa tinjauan di atas, sebagai kata kuncinya adalah” *Sejauh mana pelaksanaan RTRW dalam program pembangunan Kota Batam?*”

Sebagai langkah selanjutnya akan dikaji bagaimana proses penyusunan program dari masing-masing dinas/instansi terkait sampai proses rakorbang dalam penentuan prioritas pembangunan. Tahap selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap sistem sosialisasi RTRW dan kebijakan yang tertuang didalam RTRW tersebut. Prioritas penentuan program pembangunan akan dikaji apakah sesuai dengan skenario tahapan pembangunan yang tertuang di dalam RTRW, sedangkan pemahaman terhadap RTRW akan dikaji terhadap hasil kompilasi data dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan.

Hasil akhir dalam kajian ini akan dapat disimpulkan bagaimana sebenarnya penggunaan RTRW tersebut didalam proses penyusunan program pembangunan Kota Batam dan bisa diberikan suatu rekomendasi terhadap kurang efektifan penggunaan RTRW sebagai salah satu arah dan landasan pembangunan.



Sumber : Peneliti, 2005

GAMBAR 1.3
KERANGKA PEMIKIRAN

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Konsep Pendekatan

Konsep pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melihat permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjangkau informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang akan dilakukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh yaitu berkaitan dengan penggunaan RTRW Kota Batam dalam penyusunan usulan program pembangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi pengetahuan terhadap adanya RTRW, pemahaman terhadap materi RTRW dan perhatian terhadap RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka tersebut, dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya "diproses" kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles, 1992:

15-16). Analisis terhadap data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu (Miles, 1992: 16-21):

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Namun demikian dalam penyajian data dapat berupa matrik, grafik, jaringan, tabel maupun bagan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan pencarian arti informasi, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan yang mula-mula belum jelas, kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga memerlukan proses verifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Pendekatan lain yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang diambil dari populasi tersebut, sehingga dapat ditentukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian faktor kausal yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi kemudian meneliti ke belakang melalui data untuk menemukan faktor yang mendahului atau menentukan kemungkinan sebab atas peristiwa yang diteliti. Kedua jenis penelitian tersebut mendasari penelitian yang dilakukan karena studi ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program pembangunan baik dari segi produk maupun proses penyusunan usulan program dan kemudian merunut alasan-alasan yang mempengaruhi tidak dimanfaatkannya rencana tata ruang tersebut. alasan-alasan ini menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengetahuan terhadap adanya RTRW Kota Batam, pemahaman terhadap materi RTRW serta perhatian primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. Penelitian ini juga dilakukan pada

suatu populasi yaitu dinas/ instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program.

Penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga suatu kebijakan. Pada hakikatnya, evaluasi kebijakan merupakan aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam tubuh birokrasi pemerintahan maupun organisasi politik. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat meningkatkan keefektifan program-program mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Evaluasi dipergunakan untuk mengukur dan menilai hasil dari penerapan kebijaksanaan/program-program. Fungsi-fungsi utama evaluasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Menyediakan dan memberikan informasi yang terpercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberikan kontribusi pada penjelasan dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran yang objektif. .
3. Memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini merupakan evaluasi sesudah kebijakan dilaksanakan (*ex-post*) yaitu sesudah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang disahkan melalui Perda No.20 Tahun 2001 dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan evaluasi formatif karena bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari penggunaan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan rencana

program pembangunan, sehingga umpan balik tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keefektifan proses dan produk baik rencana tata ruang maupun usulan rencana program pembangunan di Kota Batam pada masa yang akan datang.

1.6.2. Metode Penelitian

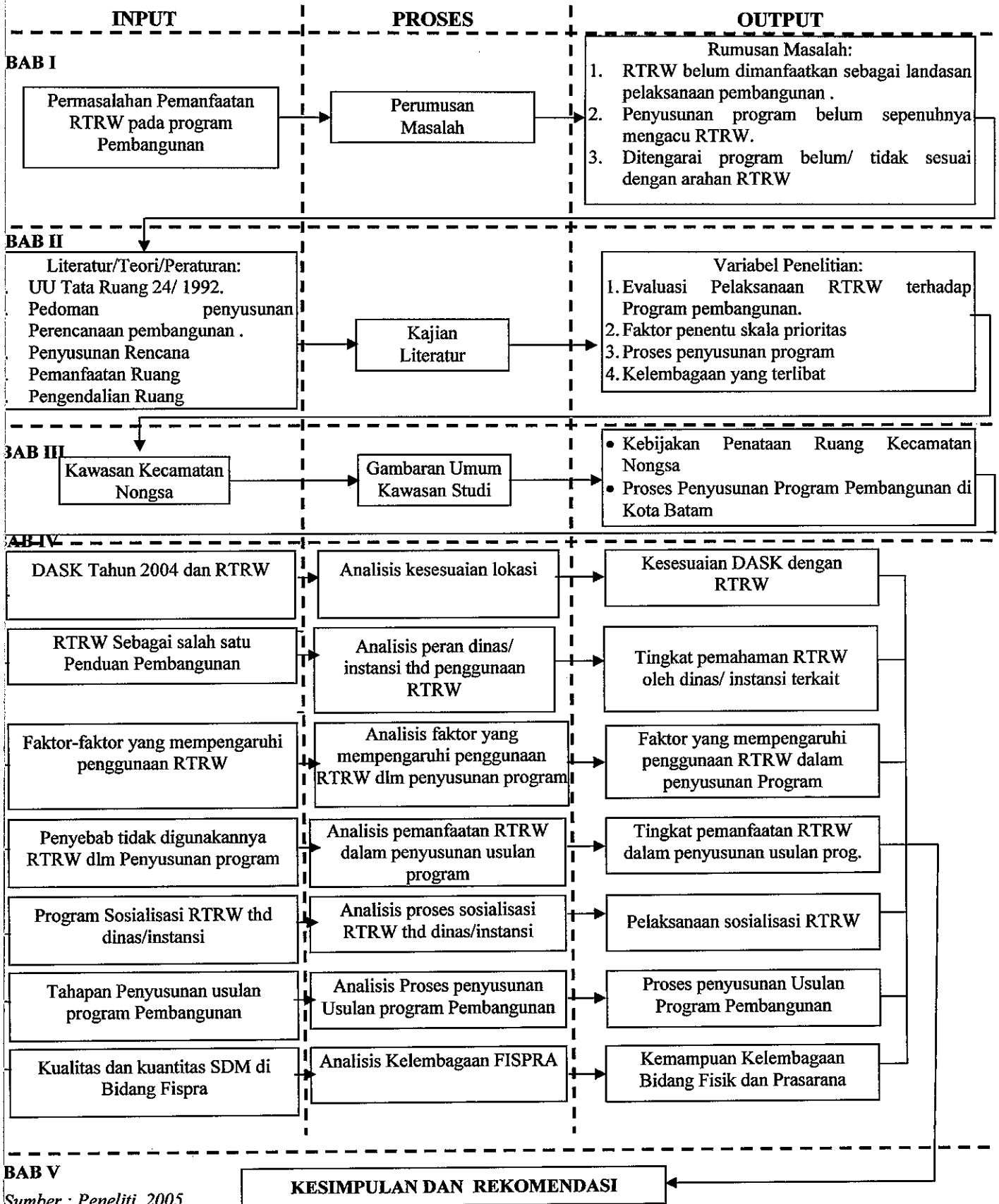
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.2.1. Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka kerangka analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kesesuaian Usulan Lokasi Program Pembangunan Terhadap RTRW Kota Batam.
2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Program.
3. Analisis Peran Dinas/Instansi terhadap Penggunaan RTRW.
4. Analisis Pemanfaatan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program.
5. Analisis proses sosialisasi RTRW terhadap dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Analisis Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan
7. Analisis Kelembagaan Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.4 berikut:



GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis-analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL I.2
PROSES ANALISIS

No	Sasaran	Data	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Analisia
1.	Pelaksanaan Sosialisasi RTRW	a. Materi Sosialisasi	- Proses Perencanaan RTRW - Isi Dokumen RTRW - Cara memanfaatkan RTRW - Kedudukan dan fungsi RTRW	Kualitatif	Deskriptif
		b. Peserta Sosialisasi	- Instansi/ dinas di lingkungan Pemko - Stakeholder yg terlibat dalam pembangunan Kota Batam	Kuantitatif dan kualitatif	Deskriptif
		c. Target yang diharapkan	- Pemahaman materi RTRW - Bisa menggunakan RTRW - Mempunyai Dokumen RTRW	Kualitatif	Deskriptif
		d. Sistem/ cara sosialisasi	- Dengan mengikuti Presentasi - Terlibat dalam proses penyusunan - Pemasangan Peta Rencana - Pendistribusian buku RTRW	Kualitatif	Deskriptif
2.	Proses Penyusunan Program Pembangunan	a. Jenis Usulan	- Bidang / program - Kebutuhan program	Kuantitatif dan Kualitatif	Deskriptif
		b. Lokasi Program	- Kepentingan - Tuntutan Masyarakat - Meneruskan program yg telah berlangsung - Terkait dengan sistem kota	Kualitatif	Deskriptif
		c. .Aspek Penentu Kebijakan	- Kepentingan bisnis - Sangat Mendesak - Penyesuaian dengan RTRW - Hasil Kesepakatan Tim	Kualitatif	Deskriptif
		d. Instansi Terkait	- Asal Usulan program - Pertimbangan Usulan - Siapa yang mengusulkan - Bidang apa	Kuantitatif dan Kualitatif	Deskriptif

Lanjutan ...

No	Sasaran	Data	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Analisa
3.	Peran Instansi dan penggunaan RTRW	a. Dasar Kebijakan	- Dasar Penentuan lokasi - Keseuaian dengan RTRW - Mendukung Fungsi	Kualitatif	Deskriptif
		b. Pemanfaatan RTRW	- Sesuai prosedur - Dasar arahan program pembangunan - Tingkat pemahaman RTRW oleh Stakeholder - Kepemilikan Dokumen RTRW	Kualitatif	Deskriptif
		c. Penentuan Lokasi	- Kebutuhan masyarakat - Kebutuhan Mendesak - Kesesuaian dg RTRW - Keterkaitan program sebelumnya	Kualitatif	Deskriptif
4.	Peran dan Fungsi Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda	a. Kedudukan	- Garis Koordinasi - Tanggung jawab	Kualitatif	Deskriptif
		b. Tugas	- Bidang perencanaan	Kualitatif	Deskriptif
		c. Fungsi	- Perumusan kebijakan - Penelitian - Koordinasi perencanaan - Pembinaan	Kualitatif	Deskriptif
		d. Kewenangan	- Menyusun program - Monitoring dan evaluasi - Koordinasi dgn instansi	Kualitatif	Deskriptif
		e. Struktur Organisasi	- Garis kewenangan - Hubungan antar bidang	Kualitatif	Deskriptif

Sumber: Peneliti, 2005

Keterkaitan antara pemanfaatan RTRW dalam penyusunan usulan program/proyek dengan faktor penyebab dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL I. 3
MATRIK KORELASI PELAKSANAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBANGUNAN

	Pengetahuan RTRW												Total (%)			
	Tidak Tahu						Tahu									
	Memahami Materi RTRW			Tidak Memahami Materi RTRW			Sub Total (%)	Memahami Materi RTRW			Sub Total (%)	Tidak Memahami Materi RTRW			Sub Total (%)	
	Tidak Memperhatikan RTRW (%)	Memperhatikan RTRW (%)	Sub Total (%)	Tidak Memperhatikan RTRW (%)	Memperhatikan RTRW (%)	Sub Total (%)		Tidak Memperhatikan RTRW (%)	Memperhatikan RTRW (%)	Sub Total (%)		Tidak Memperhatikan RTRW (%)		Memperhatikan RTRW (%)		Sub Total (%)
Tidak Menggunakan RTRW	S1	S2		S3	S4		S5	S6		S7	S8					
Menggunakan RTRW	S9	S10		S11	S12		S13	S14		S15	S16					
Total (%)																

Sumber: Peneliti, 2005

Contoh cara pengisian :

Sel 1 (S1) di dalam matrik tersebut di atas adalah jumlah (%) responden yang tidak mengetahui RTRW, tidak memahami materi RTRW, tidak memperhatikannya dan menyatakan bahwa dalam menyusun usulan program/proyek tidak menggunakan RTRW sebagai pedomannya.

1.6.2.2. Kebutuhan Data

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi data primer dan data sekunder (Marzuki, 2002: 55-56). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam studi/kajian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder berupa dokumen rencana tata ruang, dokumen rencana usulan proyek dan data pendukung lainnya diperoleh dari seluruh dinas/instansi terkait dan Bappeda sebagai

koordinator pengumpulan usulan proyek dan penataan ruang di Kota Batam yang merupakan instansi yang menangani pengembangan Kota Batam. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari aparat pemerintah untuk mengidentifikasi seberapa besar tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan proyek pembangunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL I.4
HUBUNGAN ANTARA ANALISA, DATA DAN VARIABEL

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat	
Pelaksanaan Sosialisasi RTRW	Materi Sosialisasi	Isi Dokumen RTRW	- Buku Dokumen RTRW	Lengkap		Form Observasi	
				Tidak lengkap		Form Observasi	
		Cara memanfaatkan RTRW	- Panduan	Aplikatif		Form Quest	
				Mudah dipahami		Form Quest	
				- Alat	Kejelasan Peta		Form Quest
					Kejelasan Tabel		Form Quest
		Kedudukan dan fungsi RTRW	- Perda RTRW	Mudah dipahami		Form Quest	
				Sulit		Form Quest	
				- Peran Bappeda	Aktif		Form Quest
					Kurang Aktif		Form Quest
	Peserta Sosialisasi	Instansi/ dinas di lingkungan Pemko Batam	- Jumlah	Cukup	>50%	Form Quest	
				Kurang	<50%	Form Quest	
			- Kedudukan	Teknis		Form Quest	
				Non teknis		Form Quest	
		Stakeholder yg terlibat dalam proses pembangunan Kota Batam	- Aktor pembangunan	Cukup		Form Quest	
				Kurang		Form Quest	
			- Keterlibatan	Aktif		Form Quest	
				Tidak aktif		Form Quest	
	Target yang diharapkan	Pemahaman materi RTRW	- Dokumen RTRW	Paham		Form Quest	
				Cukup		Form Quest	
				Kurang		Form Quest	
				- Peranan	Aktif		Form Quest
		Tidak aktif			Form Quest		
		Bisa menggunakan RTRW	- Mempunyai dokumen	Lengkap		Form Quest	
				Tidak lengkap		Form Quest	
				- Mengetahui kedudukan dan fungsi	Paham		Form Quest
					Cukup		Form Quest
		Mempunyai Dokumen RTRW	- Dokumen lengkap	Kurang		Form Quest	
				Paham		Form Quest	
				Cukup		Form Quest	
	Kurang				Form Quest		
	Sistem / Cara Sosialisasi	Dengan mengikuti Presentasi	- Tahu materi yang disampaikan	Mengerti		Form Quest	
				Tidak mengerti		Form Quest	
				- Berperan aktif	Aktif		Form Quest
					Tidak aktif		Form Quest
		Terlibat dalam proses penyusunan	- Mewakili instansi	Aktif		Form Quest	
				Tidak aktif		Form Quest	
				- Kedudukan instansi	Strategis		Form Quest
					Kurang strategis		Form Quest
		Pemasangan Peta Rencana	- Jumlah baliho	Banyak		Form Quest	
Cukup					Form Quest		
Kurang					Form Quest		
- Lokasi baliho				Strategis		Form Quest	
	Cukup				Form Quest		
	Kurang				Form Quest		
Pendistribusian buku RTRW	- Instansi/dinas terkait	Memenuhi		Form Quest			
		Kurang		Form Quest			
		- Jumlah	Memenuhi		Form Quest		
	Kurang			Form Quest			
	- Jenis dokumen		Lengkap		Form Quest		
		Tidak lengkap		Form Quest			

Lanjutan

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat
Proses Penyusunan Program Pembangunan	Jenis Usulan	Bidang / program	- Bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan	Sesuai		Form Quest
				Tidak sesuai		Form Quest
			- Bidang fisik prasarana, penataan ruang dan lingkungan hidup	Sesuai		Form Quest
				Tidak sesuai		Form Quest
			- Bidang pelayanan umum, sosial, kependudukan dan budaya	Sesuai		Form Quest
				Tidak sesuai		Form Quest
		Kebutuhan program	- Jumlah	Banyak		Form Observasi
				Sedang		Form Observasi
				Sedikit		Form Observasi
			- Lokasi Program	Sesuai		Form Observasi
				Tidak sesuai		Form Observasi
			- Pengusul	Terkait		Form Quest
		Tidak terkait		Form Quest		
	Lokasi Program	Kepentingan	- Instansi	Sesuai		Form Quest
				Tidak sesuai		Form Quest
			- Program lanjutan	Mendesak		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Arahkan RTRW	Sesuai		Form Quest
				Tidak sesuai		Form Quest
		Tuntutan Masyarakat	- Kondisi mendesak (<i>urgensi</i>)	Sangat mendesak		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Perbaikan PSD	Mendesak		Form Quest
			Tidak		Form Quest	
		Meneruskan program yg telah berlangsung	- Program lanjutan	Mendesak		Form Quest
			Tidak		Form Quest	
	Terkait dengan sistem kota	- Sesuai RTRW	Sesuai		Form Quest	
		Tidak Sesuai		Form Quest		
	Aspek Penentu Kebijakan	Kepentingan bisnis	- Tuntutan publik	Mendesak		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Kebutuhan	- Darurat	Mendesak		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Penyesuaian dengan RTRW	- Sesuai arahan RTRW	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Hasil Kesepakatan Tim	- Rumusan Final	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
	Dinas/ Instansi	Asal Usulan program	- Dinas/instansi	Strategis		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Masyarakat	Terlibat		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Penterjemahan RTRW	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Pertimbangan Usulan	- Kebijakan pimpinan	Dpt dipertanggung jwbkan		Form Quest
				Tidak dapat		Form Quest
			- Arahkan RTRW	sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Tuntutan Masyarakat	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Siapa yang mengusulkan	- Dinas/instansi	Strategis		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Masyarakat	Terlibat		Form Quest
Tidak					Form Quest	
- Penterjemahan RTRW			Sesuai		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
Bidang apa		- Bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan	Sesuai		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
		- Bidang fisik prasarana, penataan ruang dan lingkungan hidup	Sesuai		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
		- Bidang pelayanan umum, sosial, kependudukan dan budaya	Sesuai		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	

Lanjutan

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat
Peran Instansi dan penggunaan RTRW	Dasar Kebijakan	Dasar Penentuan lokasi	- Kebijakan pimpinan/ instansi	Dpt Dipertanggung jawabkan		Form Quest
				Tidak Dapat		Form Quest
			- Arahan RTRW	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Tuntutan Masyarakat	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Keseuaian dengan RTRW		- Sesuai		Form Quest
				- Kurang sesuai		Form Quest
				- Tidak sesuai		Form Quest
		Mendukung Fungsi		- Sesuai		Form Quest
	- Kurang sesuai				Form Quest	
	- Tidak sesuai				Form Quest	
	- Tidak sesuai				Form Quest	
	Pemanfaatan RTRW	Sesuai prosedur	- Aturan dasar penyusunan program	Ada		Form Quest
				Tidak Ada		Form Quest
			- Petunjuk teknis/ pelaksanaan	Ada		Form Quest
				Tidak Ada		Form Quest
		Dasar arahan program pembangunan	- Kebijakan pimpinan	Dpt Dipertanggung jawabkan		Form Quest
				Tidak Dapat		Form Quest
			- Arahan RTRW	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Tuntutan Masyarakat	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
		Tingkat pemahaman RTRW oleh Stakeholder		- Memahami		Form Quest
				- Tidak memahami		Form Quest
	Kepemilikan Dokumen RTRW	- Kelengkapan dokumen	Lengkap		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
		- Instansi/ dinas/ stakeholder	Terkait		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
	Penentuan Lokasi	Kebutuhan masyarakat	- Pemenuhan PSD	Mendesak		Form Quest
				Tidak		Form Quest
			- Tuntutan masyarakat	Sesuai		Form Quest
				Tidak		Form Quest
Kebutuhan Mendesak		- Darurat	Mendesak		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
		- Rehabilitasi PSD	Mendesak		Form Quest	
			Tidak		Form Quest	
Kesesuaian dg RTRW			- Sesuai		Peta TGL	
			- Kurang sesuai		Peta TGL	
	- Tidak sesuai			Peta TGL		
Keterkaitan program sebelumnya	- Program lanjutan	Sesuai		Peta TGL		
		Tidak		Peta TGL		
	- Keterkaitan sistem	Sesuai		Peta TGL		
		Tidak		Peta TGL		

Lanjutan ...

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat
Peran dan Fungsi Bidang Fisik dan Parasarana Bappeda	Kedudukan	Garis Koordinasi	- unsur pelaksana	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Bagan
			- koord pimpinan	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Bagan
		Tanggung jawab	- thd struktural	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder
	Tugas	Bidang Perencanaan	- dasar operasional Juknis/ Juklak	- sesuai - tidak sesuai		Form Quest dan data sekunder
	Fungsi	Perumusan Kebijakan	- Dasar kebijakan	- sesuai - tidak sesuai		Form Quest dan data sekunder
		Penelitian	- kebutuhan	- sesuai dengan RTRW - tidak		Form Quest dan data sekunder
		Koordinasi Perencanaan	- lintas sektoral	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder
		Pembinaan	- lintas sektoral	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder
	Kewenangan	Menyusun Program	- dasar	- sesuai dengan RTRW - tidak		Form Quest dan data sekunder
			- Arahan yg dipakai	- sesuai dengan RTRW - tidak		Form Quest dan data sekunder
		Monitoring dan Evaluasi	- dasar ketentuan yg dipakai	- sesuai dengan RTRW - tidak		Form Quest dan data sekunder
			- TIM	- cukup - kurang		Form Quest dan data sekunder
			- pelaporan	- sesuai - tidak		Form Quest dan data sekunder
		Koordinasi dg Instansi	- lintas sektoral	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder
	Struktur Organisasi	Garis kewenangan	- operasional	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder
Hubungan antar bidang		- koordinasi	- Berjalan dg baik - Kurang - tidak berjln		Form Quest dan data sekunder	

Sumber: Peneliti, 2005

TABEL I.5
KEBUTUHAN DATA

No	Jenis Data	Sumber	Keterangan
1	Dokumen perencanaan pembangunan - Pola Dasar Pembangunan - Properda - Repetada	Bappeda	
2	Data usulan program/proyek pembangunan	Bappeda	1 tahun terakhir
3	Proses sosialisasi RTRW Kota Batam	Bappeda	
4	Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program	Seluruh instansi	Penyebaran kuisioner
5	Usulan responden tentang rencana tata ruang agar dapat digunakan dalam penyusunan usulan program di masa mendatang	Seluruh instansi	Penyebaran kuisioner

Sumber: Peneliti, 2005

1.6.2.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam suatu studi atau penelitian, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara tidak langsung ke objek studi tetapi melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek studi.

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta pengumpulan data primer untuk keperluan data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa

permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer melalui 2 (dua) cara yaitu dengan penyebaran kuesioner dan wawancara langsung. Pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner disebut dengan metode kuesioner (*questionnaire method*). Informasi/data diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang memberikan keterangan atau jawaban (responden). Data yang diperoleh berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk memperoleh data tersebut biasanya diajukan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam suatu daftar (Marzuki, 2002: 58).

Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan RTRW melalui pertanyaan digunakan atau tidaknya rencana tata ruang dalam penyusunan usulan program beserta alasannya, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya rencana tata ruang melalui pertanyaan tahu atau tidaknya responden terhadap adanya RTRW, mengerti atau tidaknya responden terhadap isi materi RTRW, dan diperhatikan atau tidaknya RTRW dalam penyusunan usulan program, beserta masing-masing alasannya. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi jenis kuesioner, jika dilihat dari cara menjawabnya, maka kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup sekaligus juga kuesioner terbuka karena selain telah disediakan jawabannya, responden juga diberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang ada.

Kuesioner ini disebarakan kepada dinas/instansi terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai populasi dari studi ini. Agar tujuan studi dapat tercapai, maka dalam pengisian kuesioner ini, responden adalah orang yang mengetahui secara tepat

permasalahan yang terkait dengan tema kajian. Responden merupakan pimpinan tertinggi dari suatu dinas/instansi terkait yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan atau responden yang ditunjuk oleh pimpinan dinas/instansi terkait karena memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dari studi ini. Kriteria minimal dari responden adalah responden pernah satu kali terlibat dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan.

Instansi/dinas yang menjadi responden, adalah instansi/dinas yang mempunyai program pembangunan fisik, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2004. Untuk Dinas Permukiman dan Prasarana (Kimpras), terdapat 4 responden yang mengisi responden, hal ini terkait dengan program pembangunan fisik yang ada di masing-masing Sub Dinas tersebut, yaitu Sub Dinas Tata Ruang Kawasan dan Bangunan, Sub Dinas Pengairan dan Penataan Lingkungan, Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan dan Sub Dinas Perumahan dan Permukiman. Dari 4 sub dinas ini, hampir sebagian besar kegiatan pembangunan ditangani oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam. Dengan mempertimbangkan jumlah kegiatan program yang ditangani sangat banyak, maka 4 sub dinas dari 6 sub dinas/ bagian yang ada Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Batam menjadi responden. Secara keseluruhan ke-16 instansi/dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

1. Dinas Permukiman dan Prasarana (Kimpras)
 - a. Sub Dinas Tata Ruang Kawasan dan Bangunan
 - b. Sub Dinas Pengairan dan Penataan Lingkungan
 - c. Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan
 - d. Sub Dinas Perumahan dan Permukiman
2. Dinas Pendidikan

3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
6. Pariwisata dan Kebudayaan
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pertanahan
10. Dinas Pasar dan Kebersihan
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
12. Bagian Pembangunan, Sekretariat Daerah

Sedangkan pencarian data dengan wawancara langsung ditujukan bagi instansi Bappeda dan khususnya Bidang Fisik dan Prasarana, karena dengan wawancara langsung diharapkan bisa memperoleh data yang akurat tentang peran dan fungsi lembaga tersebut. Wawancara ini akan dilakukan dengan metode pertanyaan sudah didaftar terlebih dahulu, sehingga peneliti bisa menggiring jawaban terhadap permasalahan pelaksanaan RTRW dalam program pembangunan Kota Batam. Selain itu bisa diketahui, apakah sumber daya manusia yang ada di struktur organisasi Bappeda, khususnya Bidang Fisik dan Prasarana sudah sesuai dengan tuntutan tugas dan wewenang yang diemban. Dari data primer ini akan dibuat analisis deskripsi tentang kelembagaan tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Kajian ini memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang penelitian, kerangka penelitian, pendekatan penelitian, kerangka analisis, teknik analisis, kebutuhan data serta teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II **Kajian Pustaka terhadap Penataan Ruang dan Program Pembangunan Daerah**

Meliputi: pengertian perencanaan, pembangunan dan perencanaan pembangunan; pedoman penyusunan perencanaan pembangunan, tahapan penyusunan rencana pembangunan tahunan, peran rencana tata ruang dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengertian tata ruang, rencana tata ruang, penentuan skala prioritas dan pengambilan keputusan; evaluasi dan kriteria kebijakan publik, serta rangkuman kajian pustaka.

Bab III **Kebijakan Penataan Ruang dan Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Batam**

Meliputi: penataan ruang Kota Batam, pengelolaan pembangunan, sejarah perkembangan Kota Batam, Kebijakan RTRW, fungsi RTRW, tujuan dan sasaran RTRW, indikasi program RTRW, proses penyusunan program pembangunan, Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam, rencana program dan kegiatan hasil rakorbang II Kota Batam tahun 2004, dan permasalahan RTRW.

Bab IV **Analisis Pelaksanaan RTRW Pada Program Pembangunan Kota Batam**

Meliputi: Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Pembangunan Kota Batam Tahun 2004 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam, Analisis Peran Instansi Terhadap Penggunaan RTRW sebagai Salah Satu Pertimbangan Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Dimanfaatkannya Rencana Tata Ruang

dalam Penyusunan Usulan Program dan Proyek Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan RTRW, Analisis terhadap Penggunaan RTRW dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Daerah, Analisis Proses Sosialisasi RTRW Terhadap Dinas/Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, Analisis Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Batam, Analisis Kelembagaan Bidang Fisik Dengan Prasarana Bappeda Kota Batam.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Meliputi Temuan Hasil Penelitian, Kesimpulan, Rekomendasi dari Hasil Studi, Usulan Bagi Studi Lanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PENATAAN RUANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

2.1.1 Perencanaan

Pengertian perencanaan banyak dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang dimulai dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan (*measures*) untuk merealisirnya. Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi (Trokroamidjojo, 1995 :189).

Tjokroamidjojo (1995: 34-35) menyebutkan beberapa dimensi-dimensi operasional perencanaan, antara lain:

1. Berorientasi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dapat bersifat ekonomi, politik, sosial bahkan tujuan-tujuan ideologis atau seringkali suatu kombinasi dari pada berbagai hal tersebut. Tujuan-tujuan ini yang menjadi dasar dan perangsang dari kegiatan usaha yang menimbulkan "*sense of purpose*".
2. Berorientasi kepada pelaksanaannya. Hal ini telah dikemukakan dalam uraian terdahulu. Perencanaan bukan hanya merumuskan tujuan-tujuan tetapi diarahkan untuk merealisirnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan dalam perencanaan kemampuan

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan. Kemudian perlu difikirkan pula konsekuensi dari kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan mana yang lebih diinginkan. Sehingga perlu ada skala prioritas pencapaian tujuan-tujuan dalam waktu. Demikian pula pemilihan cara-cara untuk mencapainya. Menyerasikan kombinasi yang terbaik mengenai tujuan mana yang akan dicapai dan cara apa mencapainya dalam tahap-tahap waktu tertentu.
4. Perspektif waktu. Pencapaian tujuan-tujuan tertentu mungkin perlu dilaksanakan secara bertahap. Penetapan mana yang harus didahulukan, penjadwalan kegiatan-kegiatan dan lain-lain.
5. Perencanaan harus merupakan suatu kegiatan kontinu dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. Dalam proses tersebut sering diperlukan formulasi dan pelaksanaan kembali dari rencana. Hal ini akan diuraikan secara lebih terperinci dalam bagian lain.

Ditambahkan oleh Saul M Katz dalam Tjokroamidjojo (1995:189) bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu. Dalam proses yang kontinu ini meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya. Dalam proses perencanaan yang kontinu perlu adanya unsur-unsur (Tjokroamidjojo, 1995 :189-191):

1. Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi kepada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya. Ini berarti pula supaya dalam perencanaan sudah diperhatikan kapasitas administratif bagi pelaksanaannya.

2. Proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu maka perlu terus menerus dilakukan reformulasi rencana dan re-implementasi dalam pelaksanaannya.
3. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin. Mengenai hal ini antara lain diusahakan penggunaan apa yang disebut perencanaan operasional tahunan, kaitannya dengan anggaran belanja tahunan.
4. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antara pelaksanaan dan perencanaan. Dalam hal ini seringkali unsur koordinasi pelaksanaan antar lembaga merupakan hal yang sangat penting.
5. Bagi proses penyesuaian kembali rencana dan pelaksanaannya serta bagi pengendalian pelaksanaan, diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan yang sering dinamakan sistem "*feed back*".

Pengertian mengenai perencanaan adalah bermacam-macam, bergantung kepada keahlian orang yang menggunakan istilah tersebut (Jayadinata, 1999 : 4-5). Bagi ahli ekonomi, perencanaan itu mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana. Untuk seorang arsitek, perencanaan itu berhubungan dengan pengembangan lingkungan fisik. Bagi seorang perencana, perencanaan itu meliputi pengaturan dan penyesuaian (mungkin dengan mengubah) hubungan manusia dengan lingkungan. Untuk memahami definisi perencanaan perlu diperhatikan batasan-batasan di bawah ini:

1. Perencanaan adalah pemikiran hari depan.
2. Perencanaan berarti pengelolaan.
3. Perencanaan adalah pembuatan keputusan.
4. Perencanaan adalah pembuatan keputusan yang terintegrasi.

5. Perencanaan adalah suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil yang nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Materi perencanaan meliputi beberapa hal, antara lain (Jayadinata, 1999 : 7-8):

1. Analisis, yaitu kupasan data, proyeksi/ramalan atau perkiraan untuk masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini;
2. Kebijaksanaan (*policy*), yakni pemilihan rencana yang baik untuk pelaksanaan, yang meliputi pengetahuan mengenai maksud dan kriteria untuk menelaah alternatif-alternatif rencana.
3. Rancangan atau desain (*design*), yaitu rumusan dan sajian rencana.

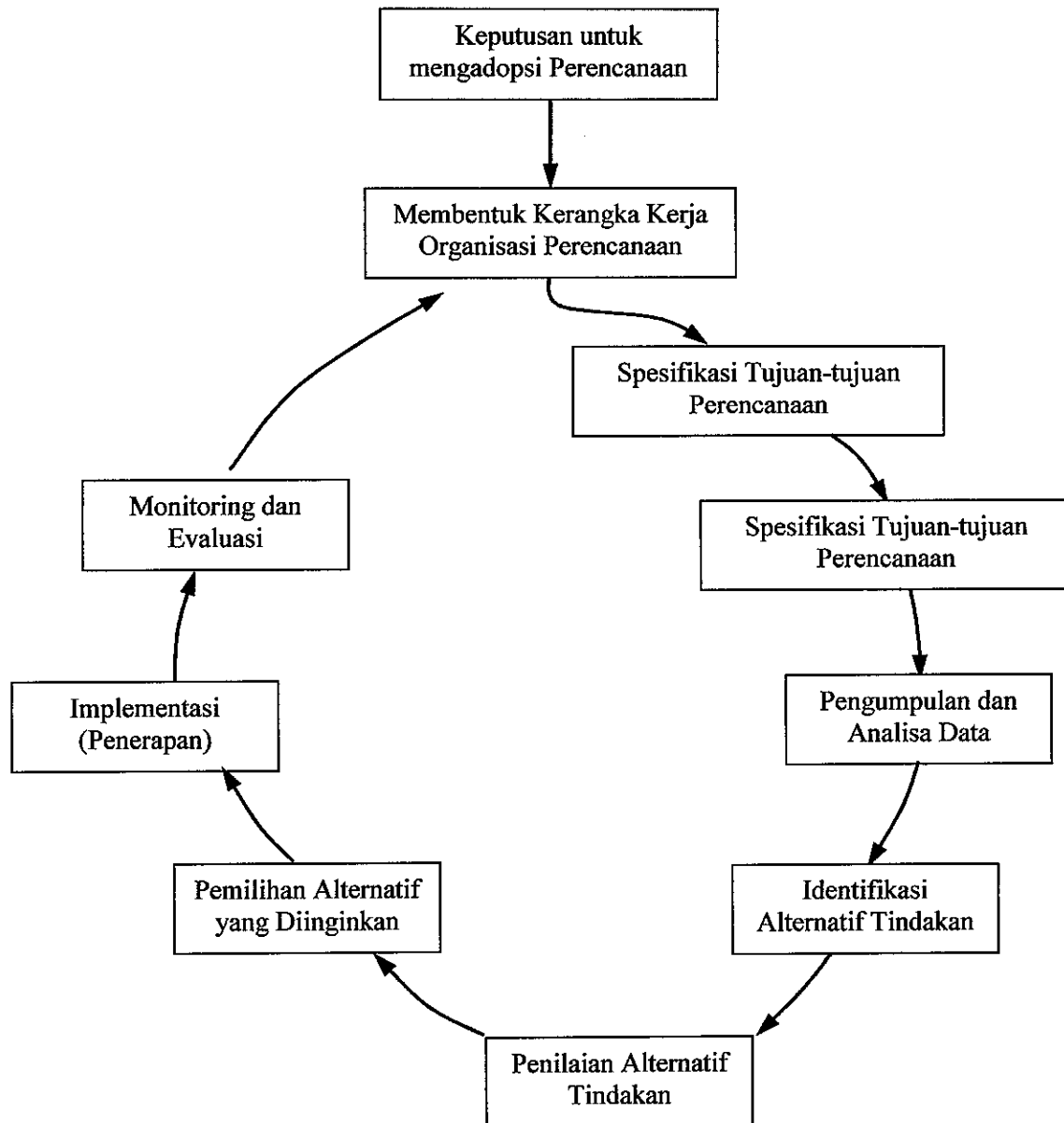
Perencanaan menurut Conyers (1984 : 4-8) didefinisikan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu:

1. Merencana berarti memilih. Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya yang berarti bahwa perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan, dalam arti bahwa tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan juga dipandang sebagai suatu proses perubahan sosial yang bergantung pada partisipasi warga dan kelompok agar hasil yang dicapai dapat efektif dan agar tujuannya dapat tercapai. Di sini, perencanaan didefinisikan sebagai proses penerapan metode secara sadar dan disengaja untuk menangkap masa depan dengan tujuan untuk mengubah keadaan saat ini sehingga mengubah arah masa depan atau mengubah masa depan untuk melestarikan keadaan saat ini. Selanjutnya, perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan bukan saja untuk memecahkan suatu masalah tetapi juga agar solusi yang diperoleh dapat diterima dan diimplementasikan (Burke, 2004 : 5). Sebagai akibatnya, kegiatan perencanaan membutuhkan tiga cara yang berbeda namun saling berhubungan, yaitu:

1. Cara berpikir yang dapat memahami keadaan masa lalu dan masa kini.
2. Cara berpikir yang dapat membayangkan masa depan.
3. Cara berpikir yang dapat mencapai masa depan.

Perencanaan seringkali dianggap sebagai suatu siklus. Proses perencanaan tersebut memerlukan suatu tahapan monitoring (pengawasan) dan evaluasi. Siklus perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut (D. Conyers, 1984 : 74).



Sumber: Conyers, 1984: 74

GAMBAR 2.1
PROSES PERENCANAAN

Mengkaji beberapa pengertian dan unsur pokok perencanaan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan mengandung beberapa hal pokok, antara lain:

1. Merupakan tahap awal untuk bertindak di masa yang akan datang sehingga merupakan cita-cita yang bertujuan, bersasaran dan berstrategi kebijaksanaan;

2. Sebagai usaha untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan diperlukan minimasi penggunaan sumber- sumber dan maksimasi hasil;
3. Pengejawantahan unsur matra waktu dan ruang.

Sehingga dapat dilihat bahwa fungsi perencanaan dalam proses pembangunan adalah sangat diperlukan dan mempunyai fungsi yang strategis, karena tanpa adanya perencanaan yang baik yang pada hakekatnya adalah merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan, maka kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dan akibatnya akan terjadi pemborosan sumber daya.

2.1.2 Pembangunan

Kegiatan pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki suatu kondisi, bukan justru menghasilkan hal-hal yang merugikan, misalnya meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, dari negara dengan tingkat ekonomi rendah menjadi tinggi, dari kondisi yang tidak aman menjadi aman, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan pembangunan agar lebih fokus dan tidak salah sasaran.

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan pembangunan tersebut maka dilaksanakan berbagai program yang terdiri dari berbagai program atau kegiatan.

Pemahaman mengenai pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu (Conyers, 1984 : 23-36) :

- Pembangunan sebagai suatu tujuan

Pembangunan merupakan suatu tujuan akhir yang diharapkan dalam perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator utama untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah pendapatan perkapita (pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk) serta tingkat pendapatan nasional tiap tahun.

- Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses pengendalian dan rekayasa untuk mencapai sasaran akhir yakni kemakmuran.

Hadi (2001:1) juga memberikan batasan pembangunan dalam dua makna. Makna pertama lebih memfokuskan pada jumlah (kuantitas) produksi dan penggunaan sumber-sumber. Keberhasilan pembangunan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka produk domestik bruto (PDB). Makna kedua adalah bahwa pembangunan itu lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial. Dalam perspektif ini fokus perhatian adalah pada pembangunan sosial (*social development*) dimana fokusnya pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi, eksploitasi dan penciptaan dan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi di antara masyarakat.

Batasan pembangunan lain (Jayadinata, 1999:4) ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan itu dapat merupakan pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan tersebut dapat berskala nasional, regional maupun lokal.

Pendapat lain yang mirip dengan pernyataan di atas, bahwa pembangunan mengandung dua aspek yaitu: aspek fisik dan aspek non-fisik (Budihardjo, 1997 (a) : 179-180). Aspek fisik meliputi pembangunan gedung, bangunan sipil, penambangan dan kegiatan lain di dalam, pada, di atas atau di bawah tanah. Sedangkan aspek non fisik meliputi perubahan bangunan atau tanah yang cukup bermakna ("material") misalnya dari rumah tempat tinggal menjadi kantor perusahaan. Zahnd (1999 : 24-25) juga menambahkan bahwa pembangunan dan perkembangan di dalam kota dapat dilihat dengan tiga istilah teknis, yaitu:

1. Perkembangan Horizontal

Merupakan perkembangan yang mengarah ke luar. Artinya, daerah bertambah, sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan terbangun (*coverage*) tetap sama. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pinggir kota, di mana lahan masih lebih murah dan dekat dengan jalan raya yang mengarah ke kota (di mana banyak keramaian).

2. Perkembangan Vertikal

Merupakan perkembangan yang mengarah ke atas. Artinya, daerah pembangunan dan kuantitas lahan terbangun tetap sama, sedangkan ketinggian bangunan-bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota (dimana harga lahan mahal) dan di pusat-pusat perdagangan yang memiliki potensi ekonomi.

3. Perkembangan Interstisial

Cara perkembangannya dilangsungkan ke dalam. Artinya, daerah dan ketinggian bangunan-bangunan rata-rata sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun (*coverage*) bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara pusat dan pinggir kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat dipadatkan.

Pembangunan dengan pendekatan kewilayahan yang merupakan pembangunan terpadu menurut Budiharsono (2001: 10) diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan pembangunan di masa lalu. Dengan pendekatan wilayah, akan dapat tercipta suatu sistem pembangunan yang bersifat terpadu dengan mendorong terciptanya berbagai bentuk spatial linkages, seperti jaringan interaksi fisik, sosial, ekonomi, teknologi dan administrasi.

Pembangunan yang terjadi pada masa lalu berorientasi hanya kepada peningkatan ekonomi. Para ekonom dan ahli ekonomi politik tidak memperhatikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada saat itu. Ketimpangan itu terjadi dalam bentuk-bentuk (Chaniago, 2001:309):

1. Ketimpangan antar golongan ekonomi masyarakat.
2. Ketimpangan antara kelompok usaha besar dan kecil.
3. Ketimpangan antar wilayah.
4. Ketimpangan antar sub wilayah di daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi.
5. Ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi antar sektor.
6. Ketimpangan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan.
7. Ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia di lapisan masyarakat bawah.

Dari kegagalan pembangunan yang terjadi pada masa lalu, memunculkan suatu tren baru dalam proses pembangunan. Proses pembangunan *bottom up approach* merupakan proses pembangunan yang melahirkan kekuatan yang beragam. Keterbukaan, kekuatan tawar menawar politik (pengambilan keputusan) pada seluruh daerah bawah (daerah pinggiran, kota menengah, kota kecil, pedesaan) dan masyarakat bawah serta kemampuan akses dalam informasi yang berarti penyebaran IPTEK akan melahirkan *ipointed development*. Titik-titik kekuatan pembangunan yang tidak berhirarki bergerak

dan berubah sangat cepat sesuai dengan kekuatan lokal dan bergabung dengan kekuatan luar berbentuk dalam era pasar bebas yang makin penuh persaingan.

Proses desentralisasi dengan otonomi penuh dalam era pembangunan Indonesia baru pada era pasar bebas akan dapat merubah dengan cepat dengan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang makin *unorganise*. Suatu perkembangan titik pertumbuhan tanpa hirarki namun terjalin satu sama lain akan menjadi potensi perkembangan wilayah pada era pasca modern yang mendekonstruksi sistem hirarki yang telah ada (Soetomo, 2002 : 39-40).

Konsep baru dalam pembangunan yang sering digunakan oleh para perencana adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan Brundtland dalam Budihardjo,1999:1-2) pada dasarnya adalah (pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

2.1.3 Perencanaan Pembangunan

Definisi Perencanaan pembangunan sendiri ada beberapa pendapat ahli, antara lain: menurut Conyers (1984 : 59-60), perencanaan pembangunan tidak hanya mencakup perencanaan makroekonomi konvensional, tetapi juga perencanaan terhadap program-program pengembangan sosio-ekonomi terhadap sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu serta desain dan perencanaan detail dari program-program yang spesifik. Aktivitas perencanaan pembangunan ini melibatkan beberapa disiplin ilmu yang berbeda, termasuk ekonomi, sosiologi, ilmu politik, geografi, ilmu alam, arsitek dan insinyur tertentu.

Tjokroamidjojo (1995 : 27-28) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan memuat keinginan dan usaha sadar untuk menumbuhkan dan mengarahkan proses perkembangan perubahan-perubahan sosial tertentu. Untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan masyarakat dalam tahap-tahapnya, maka perlu diserasikan perkembangan antara berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan. Diusahakan suatu kombinasi kegiatan-kegiatan yang diharapkan memperoleh hasil terbaik, penetapan prioritas mana yang perlu didahulukan, yang diharapkan akan memberikan efek dongkrak (*leverage effect*) bagi pertumbuhan. Kesemuanya itu disesuaikan dengan ciri-ciri hambatan-hambatan, potensi-potensi, yang terdapat dalam suatu masyarakat bangsa tertentu. Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan merupakan suatu proses yang terdiri dari :

1. Adanya keinginan-keinginan dasar di dalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini adalah kebutuhan dasar yang dirasakan (*felt needs*), dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena kondisi obyektif (*real needs*). Tingkatan ini disebut juga sebagai tingkat konseptualisasi (*conceptualization*).
2. Perumusan konsiliasi dari keinginan dasar di dalam masyarakat yang dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik mengenai kehendak-kehendak negara. Dalam keputusan politik ini ditetapkan apa yang hendak dibangun dan dasar-dasar dari cara pencapaiannya. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi keputusan politik (*formulation of political decision*).
3. Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik tersebut terdahulu. Dengan ini dimaksud supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (*legal context*). Tingkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi (*legalization*).

4. Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Kebijaksanaan dan program tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan pembangunan atau merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan dan program yang konsisten. Tingkat ini adalah tingkat formulasi keputusan administratif (*formulation of policies and plans*).
5. Penyusunan program-program kerja, sistem dan mekanisme pelaksanaan. Tingkatan ini disebut sebagai *programming*.
6. Usaha pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasar keputusan-keputusan politik. Tingkatan ini disebut sebagai *implementation*.
7. Penilaian dari pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang dicapai (*concurrent evaluation, evaluation of results*).

Dalam konteks perencanaan daerah, terdapat dua jenis perencanaan yaitu Pola Dasar Pembangunan (Poldas) yang merupakan produk rencana pembangunan daerah untuk jangka panjang, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana spasial (ruang) jangka panjang yang merupakan matra (dimensi) spasial dari Pola Dasar Pembangunan. Penjabaran rencana dalam bentuk pembangunan jangka menengahnya dikenal dengan nama Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dari Propeda tersebut disusun rencana atau program tahunan daerah yang terdiri dari berbagai program pembangunan. Dalam penentuan program tersebut, dilakukan pula proses penganggarannya yang dikenal dengan istilah Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang). Berdasarkan hasil Rakorbang tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2. Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pada Proses penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa mekanisme perencanaan di daerah dilakukan melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah berorientasi pada pendekatan sektoral yang tersentralistik, sedangkan pendekatan *bottom-up* berorientasi pada peran serta komunitas atau masyarakat dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan dari atas ke bawah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah karena kadang-kadang pendekatan sektoral tidak memperhatikan permasalahan dan potensi yang ada di suatu daerah. Di sisi lain, permasalahan dan kondisi di setiap daerah berbeda satu dengan lainnya karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa dokumen perencanaan di daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, meliputi:

1. Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Provinsi, merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan provinsi sebagai pernyataan kehendak rakyat di daerah bersangkutan yang berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
2. Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kota/kabupaten, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Poldas provinsi sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam rangka operasionalisasi GBHN di Kota/kabupaten.
3. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada) atau sekarang dikenal dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda), merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah sebagai penjabaran pola dasar pembangunan daerah. Propeda merupakan perumusan tujuan umum dan tujuan fungsional pembangunan daerah yang berisikan indikasi program-program pembangunan.

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), merupakan perumusan kebijaksanaan operasional dan bersifat konkrit untuk menjadi pedoman penyusunan program bagi semua instansi pemerintah di tingkat daerah.
5. Daftar Usulan Program (DUP) dalam bentuk usulan-usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Usulan program tersebut di dalamnya memberi indikasi tentang nama program, tujuan, lokasi, biaya, waktu, sasaran, tolok ukur dan ketatalaksanaan.
6. Daftar Isian Program (DIP), berkedudukan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan, tolok ukur dan pengendalian program serta berfungsi sebagai pedoman bagi perumusan rencana operasional program.

Terdapat beberapa dokumen penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia yang selalu dijadikan acuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.1 berikut ini.

TABEL II.1

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Tingkat Rencana	Periode Rencana (Jangka Waktu)			Pendanaan
	Panjang	Menengah	Pendek	
Nasional Propinsi	GBHN Renstra Prop	Propenas Propeda Prop	Repeta Repetada Prop	APBN APBD Prop
Kota/kabupaten	Poldas Kab/Kota	Properda Kab/Kota	Repetada Kab/Kota	APBD Kab/Kota
Kecamatan	Pola Pengembangan Kecamatan	Temukarya UDKP	RPTK	
Desa/Kelurahan	Pola Pengembangan Desa	Musbangdes	RPTK/D	

Sumber : Permendagri No.9 Tahun 1982

2.3. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan

Kalau kita lihat pedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 1982, pada dasarnya perencanaan pembangunan tahunan di daerah harus melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Evaluasi dan analisa keadaan;

Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan program tahun lalu, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada pelaksanaan program tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan program tahun yang akan datang.

2. Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah;

Tahapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahap pertama yang merupakan kerangka makro berisi tujuan, arah, sasaran, skala prioritas, strategi dan kebijaksanaan pembangunan di daerah.

3. Penyusunan program secara terpadu.

Pada tahapan ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi dari bawah (*bottom-up*) dan memadukan kebijaksanaan dari atas (*top-down*). Kegiatan ini dalam rangka penyusunan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan swasta/perbankan maupun program murni yang dibiayai oleh masyarakat.

Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Namun demikian penyusunan program yang akan dibangun di daerah juga harus merupakan kebijakan nasional. Dengan kata lain sistem perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*) juga tidak dapat ditinggalkan. Melalui 3 tahapan tersebut di atas diharapkan tercapainya keseimbangan dan keserasian antara perencanaan dari atas ke bawah dan perencanaan dari bawah ke atas.

Untuk mendapatkan informasi mengenai program-program yang menjadi keinginan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam pengusulan perencanaan daerah maka ditempuh secara bertahap musyawarah serta rapat koordinasi dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional. Musyawarah dan rapat koordinasi tersebut membicarakan beberapa keinginan masyarakat yang dicerminkan dengan usulan program, Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 mengamanatkan adanya keserasian dan keseimbangan antara *top down* dengan *bottom up* yang dapat dicapai melalui tahapan atau mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Musyawarah pembangunan (Musbang) tingkat desa/kelurahan;
2. Temu karya pembangunan tingkat kecamatan dalam bentuk diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kota/kabupaten;
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Provinsi;
5. Konsultasi regional pembangunan;
6. Konsultasi nasional atau Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional

Dengan memperhatikan mekanisme kerja sistem perencanaan tersebut diatas, khususnya melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, kegiatan perencanaan diawali dengan perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan kecamatan, dilanjutkan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kota/kabupaten, provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Ini berarti bahwa mekanisme perencanaan tersebut secara keseluruhan merupakan satu kesatuan proses perencanaan, berjenjang dan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berbeda pada setiap hirarki/jenjang. Secara keseluruhan, dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional merupakan satu kesatuan proses perencanaan, tetapi pada setiap hirarki dilakukan oleh unsur-unsur yang berbeda, dan ini dapat

mengakibatkan sulitnya untuk dicapai suatu hasil pembahasan yang utuh atau dengan kala lain dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan prioritas dalam usulan rencana program pembangunan yang diajukan pada setiap hirarki.

Penentuan lokasi suatu program yang tepat dapat lebih meningkatkan efisiensi. Pemilihan lokasi program banyak tergantung dari macam program, ketergantungan program dengan program lain, macam input yang diperlukan dan jenis outputnya. Kesalahan dalam pemilihan lokasi program, maka kerugian akan diperoleh selama program ini beroperasi.

2.4. Peran Rencana Tata Ruang dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana tata ruang merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rencana tata ruang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana program pembangunan yang merupakan rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Suatu rencana tata ruang akan dimanfaatkan untuk diwujudkan apabila dalam perencanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan kehendak seluruh pemanfaatannya, serta karakteristik dan kondisi wilayah perencanaannya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang bagi para pemanfaatnya. Dilengkapi dengan kesadaran pertimbangan pembiayaan dan waktu, maka dengan kata lain suatu rencana tata ruang harus disusun dalam suatu wawasan yang lengkap dan terpadu serta operasional, yang tentu saja tingkat operasionalnya disesuaikan dengan tingkat hirarki dan fungsi dari rencana tata ruang tersebut. Rencana tata ruang dapat menjadi dasar dalam:

- penyusunan Propeda
- penentuan lokasi pembangunan tiap sektor

- penyusunan anggaran daerah dan sektor
- pengaturan dan pengendalian pembangunan melalui mekanisme perijinan dan penertiban penggunaan lahan.

Rencana tata ruang tidak hanya digunakan dalam mekanisme penerbitan ijin saja, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta penyusunan anggaran daerah. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa setiap kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, pasti akan memerlukan ruang agar kegiatan tersebut berlangsung.

Penyusunan dan pengusulan program yang sesuai dengan rencana tata ruang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara program pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Oleh karena itu, rencana tata ruang merupakan salah satu kebijaksanaan yang strategis di daerah.

Tingkatan rencana tata ruang daerah dalam kajian ini meliputi Kota Batam secara keseluruhan. Kota merupakan katalisator pembangunan dan pusat perubahan ekonomi, sosial dan budaya (Ooi Giok Ling dalam Inoguchi, 2002:138). Kota juga merefleksikan ekonomi nasional, masyarakat dan negara. Pendeknya, kota bisa menjadi titik pusat atau fokus dari pertumbuhan ekonomi dan kekayaan yang dihasilkan negara, serta merupakan hasil dari pertumbuhan dan pembangunan secara keseluruhan. Kota dianggap sebagai barometer dari seluruh tinjauan ekonomi, politik dan budaya negara.

2.5 Penataan Ruang

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsure, yaitu: jarak, lokasi, bentuk dan ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu (Budiharsono, 2001:12). Unsur-unsur tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus terkait satu dengan lainnya. Penataan ruag harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi yang tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Disamping itu rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan sebagai wujud pemanfaatan ruang.

Pada dasarnya, pemanfaatan ruang merupakan serangkaian program-program pelaksanaan selama jangka waktu perencanaan. Pada pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang.

Pembangunan di segala sektor yang serba dinamis menimbulkan konflik penggunaan lahan yang makin rumit dan sukar diatasi sehingga membangkitkan berbagai masalah sosial dan budaya. Berbagai sektor pembangunan yang menyangkut tata ruang, dilaksanakan di dalam ruang yang sama dan masing-masing melakukan pembangunan

menurut peraturan perundangan sektornya. Dengan diberlakukan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dirancang untuk memadukan berbagai pengaturan ruang yang bersifat sektoral menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan memberi tempat bagi keperluan semua sektor dan semua orang serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Didalam Undang-undang tersebut dirumuskan kawasan budidaya dan kawasan lindung serta ketentuan-ketentuan perencanaan dan penggunaan ruang yang lebih maju tidak hanya dari aspek fisik ruang, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang di daerah yaitu:

1. Terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh.
2. Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang
3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi di dalam penataan ruang terkandung sebagai pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kegiatan penataan ruang terdiri dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penataan ruang pada dasarnya meliputi pengertian manajemen ruang. Menurut undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Atas dasar penjelasan tersebut maka rencana tata ruang disusun melalui proses perencanaan yang disertai kesadaran sepenuhnya

akan aspek pemanfaatan ruang dalam operasionalisasinya dan aspek pengendalian dalam implementasi dan evaluasinya.

Kegiatan penataan ruang dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, antara lain (Budihardjo, 1995 : 22):

1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung (misalnya kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional, taman wisata alam) dan kawasan budidaya (misalnya kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertahanan keamanan).
2. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang administratif meliputi tata ruang wilayah nasional, propinsi , kabupaten/kota.
3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu seperti kegiatan pembangunan skala besar untuk kegiatan industri, pariwisata atau pertahanan keamanan beserta sarana dan prasarannya.

2.6. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang mengandung arti yang sangat luas tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan fisik semata (Budihardjo, 1993 : 199-200). Padahal sudah semenjak beberapa tahun yang lampau perencanaan daerah yang menekankan arti fisik, serba deterministik dan menomor-duakan manusia dengan segenap keunikannya, telah banyak mendapat kecaman. Penataan ruang sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan-pendekatan teknokratik komersial dan humanis.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang). Sedangkan ruang sendiri didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Dari kedua definisi tersebut dapat dirumuskan suatu definisi turunan dari tata ruang yang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan dari tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya (baik daratan, lautan dan udara) baik direncanakan maupun tidak.

Batasan ruang juga dapat diperluas berupa wilayah dan kawasan. Wilayah adalah (Kodoatie, 2003 : 97-98) ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan /atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Kawasan dibedakan atas:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan budidaya baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

5. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

2.7. Rencana Tata Ruang

Langkah awal dari proses penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang. Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang dapat menterjemahkan semua kepentingan masyarakat maupun *stakeholder* pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, rencana tata ruang merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan, bahkan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak (Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1992). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kota/kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000 dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRWK kota/kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW propinsi ke dalam tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan perencanaan tata ruang wilayah kota/kabupaten adalah mewujudkan RTRW yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan. Fungsi rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten adalah:

1. Sebagai penjabaran dari RTRW propinsi dan kebijakan regional tata ruang lainnya.
2. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
3. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kabupaten
4. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota/kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor.
5. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
6. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan.
7. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang
8. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Selain itu, RTRW kota/kabupaten dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kota/kabupaten yang bersangkutan:

1. Bagi departemen/instansi pusat dan pemerintah provinsi, digunakan dalam penyusunan program-program pembangunan lima tahunan dan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Bagi pemerintah kota/kabupaten, digunakan dalam penyusunan program-program pembangunan lima tahunan dan tahunan di wilayah kota/kabupaten yang bersangkutan.
3. Bagi pemerintah kota/kabupaten dalam penetapan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta, digunakan sebagai acuan dalam perijinan

pemanfaatan ruang serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kota/kabupaten.

Materi yang termuat di dalam RTRW kota/kabupaten memuat 4 (empat) bagian utama yaitu:

1. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kota/kabupaten, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, yang meliputi:
 - a. Tujuan pemanfaatan ruang
 - b. Konsep pembangunan tata ruang wilayah
 - c. Strategi pembangunan tata ruang wilayah
2. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota/kabupaten, yang meliputi:
 - a. Rencana struktur tata ruang, yang berfungsi memberi arahan kerangka pengembangan wilayah, yaitu:
 - Rencana sistem kegiatan pembangunan
 - Rencana sistem permukiman perdesaan dan perkotaan
 - Rencana sistem prasarana wilayah
 - b. Rencana pola pemanfaatan ruang, yang ditujukan sebagai penyebaran kegiatan budidaya dan perlindungan.
3. Rencana umum tata ruang wilayah, meliputi:
 - a. Rencana pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - b. Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan tertentu.
 - c. Rencana pembangunan kawasan yang diprioritaskan.
 - d. Rencana pengaturan penguasaan dan pemanfaatan serta penggunaan ruang wilayah.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota/kabupaten

Pengendalian merupakan upaya-upaya pengawasan, pelaporan, evaluasi dan penertiban terhadap pengelolaan, penanganan dan intervensi sebaran implementasi dari strategi pengembangan tata ruang dan penatagunaan sumber daya alam, agar kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan perwujudan RTRW kota/kabupaten yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Rencana tata ruang dengan demikian merupakan keputusan publik yang mengatur alokasi ruang, dimana masyarakat, swasta dan pemerintah perlu mengacunya.

Kelemahan-kelemahan dalam proses perencanaan, implementasi dan pengelolaan pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia yang dapat ditemukenali antara lain (Budihardjo, 1997(c): 9-11):

1. Perencanaan terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering meleset akibat banyaknya ketidakpastian (*uncertainties*). Di sisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan pemikiran pemecahan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan lingkungan.
2. Produk akhir berupa rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh para pengelola perkotaan dan daerah (*urban and regional managers*) yang handal, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan (*development control*) yang jelas.
3. Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang terlalu berat ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik dan visual.

4. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama ini terkesan sekedar sebagai slogan atau hiasan bibir semata.
5. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup masih sangat terbatas.

Perencanaan tata ruang selalu akan merupakan proses dinamis yang menerus dan sinambung. Bukan produk akhir cetak biru yang mandek (Budihardjo, 1997(b): 43-44). Perencanaan tata ruang merupakan sosok kegiatan sasar-matra (multi-dimensi) yang harus tanggap terhadap kepentingan yang jamak. Tidak kaku ditetapkan secara deterministik. Kelenturan kebijakan akan sangat arif bila dikomunikasikan sebagai awal dwicakap yang baru antara pemerintah (daerah) dengan masyarakat. Cakupan penataan ruang memang tidak cuma berkisar seputar pengaturan tata guna lahan dan jaringan transportasi serta infrastruktur belaka, tetapi meliputi juga inovasi kebijakan, peredaman konflik, komunikasi informasi dan pewadahan interaksi yang akrab.

Perencanaan tata ruang yang juga dikenal dengan perancangan kota merupakan kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial, atau suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik dan kemudian menjadi kebijakan publik yang harus ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan. Paradigma baru perancangan kota yang dikenal sebagai perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan aspek-aspek (Darmawan, 2003:9):

1. Globalisasi

Aspek ini menekankan pada perancangan yang berorientasi pada integras dengan kota-kota lain di sekitarnya, yang dapat dijadikan *partnership* dalam pengembangan, dengan harapan saling mengisi dan menguntungkan. Dalam setiap elemen kota yang

dikembangkan, harus memikirkan bagaimana bisa diberdayakan menjadi pemasukan bagi pemerintah kota, sehingga perencana harus berorientasi pada *City Marketing*.

2. Desentralisasi

Pemerintah pusat berperan sebagai mitra dalam memberikan saran pemecahan masalah bagi penyelesaian konflik penataan wilayah atau kota antar daerah melalui fasilitas penyiapan masukan teknis dalam bentuk bantuan teknis, norma dan standar, serta pedoman.

3. Demokratisasi

Perancangan kota harus bersifat partisipatif artinya disusun, dilaksanakan dan dimonitor oleh petaruh kota secara bersama-sama berdasarkan sosial budaya lokal, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan kondisi daerah perencanaan.

4. Sistem Pemerintahan

Pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dan dapat memberikan citra yang bersih atau *good governance*. Oleh karena itu segala kebijakan dan pelayanan umum harus bersifat transparan.

2.8. Penentuan Skala Prioritas dan Pengambilan Keputusan

Dalam Permendagri 9 Tahun 1982 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan skala prioritas usulan program pembangunan antara lain:

1. Petunjuk yang diarahkan secara nasional
2. Masalah mendesak yang dihadapi
3. Kebutuhan mendesak dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
4. Kondisi objektif tentang potensi, dana, tenaga dan lain-lain.

Berkaitan dengan penentuan prioritas di atas, Departemen Pekerjaan Umum merumuskan beberapa kriteria sebagai dasar penyusunan prioritas usulan program, antara lain:

1. Memberikan dampak positif yang paling besar
2. Mengurangi beban masyarakat
3. Menimbulkan beban pembangunan yang minimal
4. Memberi dampak negatif yang minimal
5. Memiliki daya sinergi yang besar
6. Menjadi bagian integratif dari suatu upaya pembangunan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan

Selain berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas, penyusunan program harus didasarkan keputusan bersama secara kolektif yang diturunkan dari berbagai pihak yang terkait. Pengambilan keputusan diterima atau tidaknya atas usulan program untuk diusulkan lebih lanjut, haruslah mencerminkan keputusan bersama pihak-pihak yang terlibat dalam forum.

Bila dikaitkan dengan tema penelitian ini, maka penentuan skala prioritas usulan program dan proses pengambilan keputusan tentang program yang disetujui untuk diusulkan lebih lanjut sangat relevan dengan substansi yang akan dibahas dalam studi ini, karena pada dasarnya penyusunan usulan program tidak terlepas dari skala prioritas dan proses pengambilan keputusan, yang pada hakikatnya merupakan wujud dari pemanfaatan rencana tata ruang yang ada.

2.9. Evaluasi dan Kriteria Kebijakan Publik.

Evaluasi kebijakan adalah pembuatan informasi mengenai nilai atau harga suatu kebijaksanaan. Pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas ilmiah yang perlu

dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam tubuh birokrasi pemerintahan maupun organisasi politik. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat menentukan skala prioritas dari program-program yang diusulkan sehingga dapat sesuai dengan tuntutan publik. Evaluasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan.

Evaluasi rencana (Kaiser, 1979 : 426) merupakan penilaian sistematis terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, pajak dan infrastruktur sebagai dampak dari penggunaan lahan dan rencana manajemen pembangunan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai hasil yang didapat dari alternatif dan rencana tunggal. Suatu kebijaksanaan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu evaluasi kebijakan harus bisa menjelaskan seberapa jauh antara kebijakan dan implementasinya telah dapat mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dalam penelitian ini, kriteria yang dipergunakan dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW dalam program pembangunan adalah mengacu pada tujuan atau hasil yang diharapkan dari proses penyusunan usulan, dikaitkan dengan upaya pemanfaatan RTRW melalui sinkronisasi lokasi usulan program dengan ketentuan yang ada di dalam rencana tata ruang. Untuk mensinkronisasikan lokasi program dengan rencana tata ruang maka proses pembuatan usulan dari instansi terkait harus menggunakan RTRW sebagai salah satu kriteria dalam menyusun prioritas program yang disetujui untuk diusulkan lebih lanjut dengan cara memberi prioritas yang lebih tinggi pada usulan program yang sesuai dengan RTRW. Atas dasar itu, maka evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW dalam setiap proses penyusunan program akan ditinjau dalam 2 indikator, yaitu:

1. Lokasi program yang dihasilkan oleh dinas terkait sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam RTRW (keefektifan dari segi produk). Penggunaan RTRW dalam penyusunan

program pembangunan dikatakan efektif, jika lokasi usulan program sesuai dengan RTRW.

2. Dinas/intansi terkait menggunakan RTRW sebagai salah satu kriteria untuk menentukan prioritas usulan program pembangunan, dan pemanfaatan RTRW dikatakan baik apabila sebagian besar (> 50%) dinas/instansi terkait menggunakan RTRW sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan prioritas usulan program pembangunan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW berkaitan erat dengan tujuan atau hasil yang diharapkan baik dari segi produk maupun dari segi proses. Berkaitan dengan tema yang akan diteliti, maka penggunaan RTRW sebagai salah satu kriteria prioritas penentuan usulan program yang dipakai oleh dinas/instansi terkait. Indikator evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW dari segi produk akan dinilai dari perbandingan antara jumlah program yang diusulkan dengan RTRW dari keseluruhan program hasil Rakorbang. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW dari segi proses akan dinilai berdasarkan persepsi dari dinas/instansi terkait terhadap penggunaan RTRW sebagai salah satu kriteria dalam menyusun prioritas program pembangunan, yang didasarkan pada hasil penyebaran kuesioner kepada dinas/instansi terkait.

2.10. Rangkuman Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan di atas, maka terdapat beberapa hal penting yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

2. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan pembangunan tersebut maka dilaksanakan berbagai program yang terdiri dari berbagai program atau kegiatan.
3. Perencanaan pembangunan memuat keinginan dan usaha sadar untuk menumbuhkan dan mengarahkan proses perkembangan perubahan-perubahan sosial tertentu. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah berorientasi pada pendekatan sektoral yang tersentralistik, sedangkan pendekatan *bottom-up* berorientasi pada peran serta komunitas atau masyarakat dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan dari atas ke bawah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah karena kadang-kadang pendekatan sektoral tidak memperhatikan permasalahan dan potensi yang ada di suatu daerah. Di sisi lain, permasalahan dan kondisi di setiap daerah berbeda satu dengan lainnya karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Sedangkan tahapan pembangunan terdiri dari 3 tahapan yaitu:
 - a. Evaluasi dan Analisa Keadaan
 - b. Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah
 - c. Penyusunan Program Secara Terpadu
4. Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus terkait satu dengan lainnya. Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi yang tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat

dengan kebutuhan pembangunan. Di samping itu rencana tata ruang harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan sebagai wujud pemanfaatan ruang.

5. Rencana tata ruang merupakan penjabaran rencana penataan ruang suatu wilayah secara integral dari suatu kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah. Rumusan tata ruang yang menyangkut arahan penetapan wilayah lindung, wilayah budi daya dan pemanfaatan serta penggunaan lahan bagi suatu wilayah, jaringan prasarana serta penataan wilayah konservasi yang ditinjau dalam kaitan yang menyeluruh dan integral menyangkut pengaruhnya dengan bagian bawah bumi dan angkasa.
6. Penentuan skala prioritas usulan program pembangunan harus memperhatikan hal-hal berikut antara lain:
 - a. Petunjuk yang diarahkan secara nasional
 - b. Masalah mendesak yang dihadapi
 - c. Kebutuhan mendesak dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
 - d. Kondisi objektif tentang potensi, dana, tenaga dan lain-lain.

Di samping itu penyusunan prioritas usulan program didasarkan pada kriteria:

- a. Memberikan dampak positif yang paling besar
- b. Mengurangi beban masyarakat
- c. Menimbulkan beban pembangunan yang minimal
- d. Memberi dampak negatif yang minimal
- e. Memiliki daya sinergi yang besar
- f. Menjadi bagian integratif dari suatu upaya pembangunan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan

7. Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas ilmiah yang perlu dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam tubuh birokrasi pemerintahan maupun organisasi politik. Dengan melakukan evaluasi pemerintah dapat meningkatkan kinerja program-program yang diusulkan sehingga dapat sesuai dengan tuntutan publik. Evaluasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan.

Evaluasi kebijaksanaan dapat ditinjau dalam beberapa aspek yakni: proses pembuatan kebijaksanaan, proses implementasi, konsekuensi kebijaksanaan dan keefektifan kebijaksanaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai ringkasan teori dapat dilihat dalam tabel II.2 berikut ini

TABEL II.2
RINGKASAN TEORI

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
A. Perencanaan			
Tjokro Amidjojo, 1995	Dimensi operasional perencanaan	Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi formulasi rencana dan implementasinya, dapatlah diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi	Rencana bersifat : - realistis - tanggap masalah
Tjokro Amidjojo, 1995	Proses Perencanaan	Bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu. Dalam proses yang kontinu ini meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya.	2 aspek proses perencanaan: - formulasi rencana - pelaksanaannya
Jayadinata, 1999	Perencanaan	Bagi seorang perencana, perencanaan itu meliputi pengaturan dan penyesuaian (mungkin dengan mengubah) hubungan manusia dengan lingkungan	2 hal pokok perencanaan: - pengaturan - penyesuaian
Conyers 1984	Definisi perencanaan	Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang	- proses berkesinambungan - SDM
Burke, 2004	Definisi perencanaan	Perencanaan didefinisikan sebagai proses penerapan metode secara sadar dan disengaja untuk menangkap masa depan dengan tujuan untuk mengubah keadaan saat ini sehingga mengubah arah masa depan atau mengubah masa depan untuk melestarikan keadaan saat ini. Selanjutnya, perencanaan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan bukan saja untuk memecahkan suatu masalah tetapi juga agar solusi yang diperoleh dapat diterima dan diimplementasikan	- penerapan metode secara sadar - mengubah keadaan

Lanjutan ...

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
B. Pembangunan			
Conyers, 1984	Pembangunan	- Pembangunan sebagai suatu tujuan - Pembangunan sebagai suatu proses	Tujuan dan proses
Hadi 2001		Batasan pembangunan dalam dua makna yaitu : pertama lebih memfokuskan pada jumlah (kuantitas) produksi dan penggunaan sumber-sumber. Keberhasilan pembangunan dari perspektif ini dilihat dari tingginya angka produk domestik bruto (PDB). Makna kedua adalah bahwa pembangunan itu lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dalam distribusi barang-barang dalam esensi hubungan sosial	Pembangunan 2 makna: - jumlah produksi - penggunaan sumber-sumber
Jayadinata: 1999	pembangunan	Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada	Kata kerja pembangunan
Budihardjo, 1997	pembangunan	Pembangunan mengandung dua aspek yaitu: aspek fisik dan aspek non-fisik	2 aspek: - aspek fisik - aspek non fisik
Zahnd 1999	Pembangunan dan perkembambangannya	Bahwa pembangunan dan perkembangan di dalam kota dapat dilihat dengan tiga istilah teknis, yaitu: 1. Perkembangan Horizontal 2. Perkembangan Vertikal 3. Perkembangan Interstisial	3 aspek perkembangan kota
Budiharsono (2001)	Pembangunan wilayah	Kewilayahan yang merupakan pembangunan terpadu	Pembangunan terpadu
Chaniago, 2001	Orientasi pembangunan	Pembangunan yang terjadi pada masa lalu berorientasi hanya kepada peningkatan ekonomi. Para ekonom dan ahli ekonomi politik tidak memperhatikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada saat itu.	Ketimpangan pembangunan
Soetomo, 2002	Titik pertumbuhan	Suatu perkembangan titik pertumbuhan tanpa hirarki namun terjalin satu sama lain akan menjadi potensi perkembangan wilayah pada era pasca modern yang mendekonstruksi sistem hirarki yang telah ada	Potensi perkembangan wilayah
Brundtland dalam Budihardjo, 1999	Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.	- pemanfaatan sumber daya - arah investasi - orientasi pembangunan
C. Perencanaan Pembangunan			
Conyers 1984	Perencanaan komprehensif	Perencanaan pembangunan tidak hanya mencakup perencanaan makroekonomi konvensional, tetapi juga perencanaan terhadap program-program pengembangan sosio-ekonomi terhadap sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu serta desain dan perencanaan detail dari program-program yang spesifik	- perencanaan makroekonomi - pengembangan sosi ekonomi
Tjokroamidjojo 1995	Perencanaan pembangunan	Perencanaan pembangunan memuat keinginan dan usaha sadar untuk menumbuhkan dan mengarahkan proses perkembangan perubahan-perubahan sosial tertentu	- keinginan - usaha sadar - perubahan sosial

Lanjutan ...

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
D. Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan			
Permendagri Nomor 9 Tahun 1982	P5D	Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D)	Juknis Rakorbang
E. Penataan Ruang			
Budiharsono, 2001	Ruang	Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu	Ruang - waktu
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992	Penataan ruang	Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus terkait satu dengan lainnya	- proses - pelaksanaan - pemanfaatan
Budihardjo, 1995	Penataan Ruang	Kegiatan penataan ruang 1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan 2. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang administratif. 3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan.	- fungsi - administrasi
F. Pengertian Tata Ruang			
Budihardjo 1993	Tata ruang	Tata ruang mengandung arti yang sangat luas tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit terbatas pada perencanaan fisik se	Konotasi perencanaan fisik
Kodoatie, 2003	wilayah	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/ atau aspek fungsional	- geografis - sistem - aspek adm dan fungsional
G. Rencana Tata Ruang			
Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1992	Tata ruang	Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak	Wujud struktural
Budihardjo, 1997	Proses perencanaan	Kelemahan-kelemahan dalam proses perencanaan, implementasi dan pengelolaan pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia yang dapat ditemukan	- perencanaan - implementasi - pengelolaan
Budihardjo 1997	Perencanaan tata ruang	Perencanaan tata ruang selalu akan merupakan proses dinamis yang menerus dan sinambung. Bukan produk akhir cetak biru yang mandek	Proses dinamis
Darmawan, 2003	Paradigma perancangan kota	Paradigma baru perancangan kota yang dikenal sebagai perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan aspek-aspek 1. Globalisasi 2. Desentralisasi 3. Demokratisasi 4. Sistem Pemerintahan	3 aspek penting
H. Penentuan Skala Prioritas dan Pengambilan Keputusan			
Permendagri 9 Tahun 1982	Skala prioritas	Disebutkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan skala prioritas usulan program pembangunan	Faktor penentu
I. Evaluasi dan Kriteria Kebijakan Publik			
Kaiser, 1979	Evaluasi rencana	Evaluasi rencana merupakan penilaian sistematis terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, pajak dan infrastruktur sebagai dampak dari penggunaan lahan dan rencana manajemen pembangunan	- penilaian - sistem - faktor

Sumber: Peneliti, 2005

BAB III

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BATAM

Pada bab ini akan diuraikan kebijaksanaan penataan ruang di Kota Batam dan proses penyusunan program pembangunan. Pada proses perencanaan pembangunan daerah terdapat Pola Dasar Pembangunan (Poldas), yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai matra ruang dari poldas tersebut. Selanjutnya Poldas dijabarkan dalam jangka menengah dalam Program Pembangunan Daerah (Properda) dan dalam program tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Dari penjabaran program tahunan ini, perencanaan pembangunan sudah dapat dilihat dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai kebijaksanaan pembangunan daerah telah dirumuskan sebagai landasan untuk perencanaan dan program penataan ruang yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan daerah yang menyeluruh dan terpadu antar sektor agar selalu diupayakan menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Kota Batam. Di bawah ini akan ditinjau kebijaksanaan tata ruang yang tertuang di dalam dokumen RTRW Kota Batam.

3.1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Batam

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kota Batam

Perkembangan Kota Batam diawali dari adanya kebijakan Pemerintah pusat untuk mengembangkan P. Batam sebagai kawasan industri & perdagangan pada akhir tahun 1970. Pengembangan Batam dimulai dengan pembangunan kawasan industri Batu Ampar,

yang letaknya di pinggir pantai, disusul dengan kawasan industri lainnya. Sejumlah perusahaan di Singapura langsung merelokasi industrinya ke Batam (Maharadja, 2003 halaman 7). Kebijakan status *bonded zone* di Batam, ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Otorita Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengabdikan dan sekaligus diberi tugas untuk mengembangkan Pulau Batam, mulai mendesain *Master Plan yang applicable* dalam rangka pengembangan Pulau Batam dalam arti yang ekonomis dan humanis (Octarevia, 2003 halaman 5). Tugas untuk menjadikan Batam sebagai *counterpart* Singapura – bukan untuk menyaingi Singapura, karena saat itu Singapura telah menjadi simpul (*hub*) dalam segala bidang seperti dalam hal perdagangan, alih kapal maupun keuangan internasional (*offshore financing*) – membuat Badan Otorita Batam harus berpacu dengan waktu yang cukup singkat untuk menjalankan amanah tersebut.

Perkembangan Batam juga terkait dengan diterbitkannya serangkaian surat keputusan yang memberikan landasan hukum bagi upaya pengembangannya, yang secara bertahap sesuai periodisasinya telah menciptakan fungsi-fungsi utama wilayah yang terus berkembang hingga saat ini. Pada awalnya pengembangan fungsi Batam didasarkan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang “Pengembangan Pembangunan Pulau Batam (yang meliputi wilayah Batu Ampar)”, yang diarahkan untuk :

1. Membangun P. Batam sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*), yang memberikan kemudahan (*incentives*) berupa pembebasan bea masuk terhadap impor bahan baku produk-produk industri berorientasi ekspor untuk menunjang pembangunan P. Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Membangun P. Batam sebagai pusat alih muat angkutan kapal laut (*Transshipment Point*) dalam rangka memanfaatkan potensi limpahan angkutan dari Singapura, sekaligus untuk meningkatkan usaha-usaha perdagangan luar negeri dan melancarkan arus kegiatan bongkar muat barang di P. Batam sebagai penunjang kegiatan industri.

Penetapan ini pada periode lebih lanjut dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yang menetapkan pelabuhan laut dan bandara yang ada di Batam sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

3. Membangun P. Batam sebagai pusat logistik (*Logistic Base*) bagi Pertamina yang dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970, yang mengatur pelaksanaan pembangunan P. Batam dalam hubungannya dengan pusat logistik Pertamina tersebut. Fungsi ini kemudian diperluas tidak hanya sebagai pusat logistik bagi Pertamina saja, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan dan pergudangan bagi produk-produk ekspor dan barang impor Indonesia.
4. Membangun P. Batam sebagai daerah wisata, yang dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yang membebaskan wisatawan asing dari kewajiban memiliki visa dan menetapkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pintu masuk bagi kapal-kapal pesiar rombongan wisatawan asing.

Dengan berkembangnya fungsi-fungsi tersebut, diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang luas bagi para pekerja di Batam maupun luar Batam, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah dan devisa kepada Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang daerah Industri Pulau Batam, lingkup wilayah Batu Ampar sebagai pusat pengembangan diperluas sehingga mencakup seluruh wilayah P. Batam. Selanjutnya sesuai Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*) telah ditetapkan beberapa wilayah industri sebagai Kawasan Berikat, yaitu mencakup :

- Wilayah di bagian Timur P. Batam (Kabil)
- Wilayah Batu Ampar
- Wilayah Sekupang, dan
- Wilayah di bagian Barat P. Batam (Tanjung Uncang).

Pada tahap selanjutnya, wilayah usaha Kawasan Berikat tersebut diperluas hingga seluruh P. Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri di Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*). Pada tahun 1984, melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*) maka wilayah Kawasan Berikat ini diperluas hingga meliputi gugusan P. Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Moi-moi dan Kasem. Pada tahun 1992, melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*), mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta beberapa Pulau Kecil yang Berada di sekitar pulau Rempang-Galang (Wilayah Bareleng). Pada perkembangannya yang terakhir, penetapan Pulau Batam sebagai daerah Industri yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998. Penyempurnaan fungsi sebagai daerah industri yang diperluas hingga meliputi Wilayah Bareleng ini dimaksudkan untuk menangkap peluang investasi yang lebih besar dan untuk memperlancar usaha pengembangan industri.

Dari uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama Kota Batam sampai dengan perkembangannya yang terakhir difungsikan sebagai :

1. Wilayah Bareleng

- a. Pusat Pemerintahan Kota Batam
- b. Pusat Pengembangan kegiatan industri/kawasan industri (*Bonded Zone*)
- c. Kawasan Perdagangan bebas (*Free Trade Zone*)
- d. Pusat logistik bagi Pertamina dan pergudangan bagi kegiatan ekspor– impor
- e. Pusat kegiatan alih muat angkutan laut (*transshipment point*)
- f. Kawasan pariwisata

- g. Pusat pendidikan dan penelitian – pengembangan Iptek
2. Wilayah Pulau-pulau lain
- a. Kawasan pertanian dan agroindustri (komoditas komersial)
 - b. Kawasan budidaya berbasis kelautan
 - c. Kawasan pariwisata
 - d. Kawasan industri terbatas berwawasan lingkungan

Sejalan dengan hasil-hasil analisis pengembangan wilayah yang telah dilakukan, sesuai visi dan misi pengembangan Kota Batam yang telah dikemukakan dengan memperhatikan kecenderungan minat investasi yang ada hingga saat ini maka selain perlunya diperkuat dan diperdalam beberapa fungsi wilayah yang sudah ada juga perlu dikembangkan fungsi-fungsi wilayah yang baru yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi kawasan industri perlu diperkuat dan diperdalam dengan industri pengilangan minyak, agroindustri dan industri pengolahan hasil perikanan laut (*marine industries*).
2. Mengingat "*marine industries*" yang disebut terakhir akan dikembangkan dengan jumlah dan kapasitas yang relatif besar (dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat) maka fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi baru bagi Kota Batam.
3. Fungsi kawasan pariwisata juga perlu diperkuat dan diperdalam dengan pengembangan kawasan-kawasan wisata bahari (perairan laut), kawasan wisata alam di darat (Taman Safari dan sebagainya), dan kawasan-kawasan rekreasi binaan
4. Fungsi sebagai pusat pemerintahan (tingkat Kota) juga perlu diperkuat sejalan dengan peningkatan status pemerintahan dari Kotamadya Administratif menjadi Kota.
5. Selain "*marine industries*", beberapa fungsi baru yang perlu dikembangkan di Kota Batam pada masa depan adalah :
 - a. Fungsi sebagai kawasan pengembangan agribisnis, utamanya untuk komoditas hortikultura dan buah-buahan bernilai ekonomis tinggi (walaupun dikembangkan secara relatif terbatas di luar P. Batam),

- b. Fungsi sebagai kawasan pusat pendidikan dan penelitian-pengembangan Iptek, khususnya sehubungan dengan rencana pembangunan Kampus Universitas Internasional lingkup ASEAN di P. Setokok dan Bio-Island Project di P. Rempang.

3.1.2. Perkembangan Kota Batam Menurut *Master Plan* Otorita

A. *Master Plan* Tahun 1986

Pada *master plan* tahun 1986 yang diproyeksikan sampai dengan rencana untuk tahun 2005, kebutuhan lahan untuk tiap-tiap jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel III.1. berikut ini.

TABEL III.1.
PROYEKSI KEBUTUHAN LAHAN TAHUN 2005

No.	Jenis Kegiatan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Industri berat & menengah	702,00	1,69
2.	Industri ringan	2.300,00	5,53
3.	Bandar udara	244,00	0,59
4.	Pelabuhan laut	924,00	2,22
5.	Hutan lindung	13.643,00	32,80
6.	Kebun Raya	4.933,00	11,86
7.	Hutan Bakau	3.630,00	8,73
8.	Daerah Aliran Sungai	410,00	0,99
9.	Perumahan	1,678,00	4,03
10.	Fasilitas Umum	679,00	1,63
11.	Perkantoran	229,00	0,55
12.	Pusat Kota	120,00	0,29
13.	Pusat sub wilayah	283,00	0,68
14.	Perikanan	2.072,00	4,98
15.	Peternakan	3.032,00	7,29
16.	Pariwisata	777,00	1,87
17.	Reservoir	1.239,00	2,98
18.	Olahraga / golf	1.111,00	2,67
19.	Hijau lingkungan	3.594,00	8,64
	Total	41.600,00	100,00

Sumber : *Master Plan Kota Batam, 1986*

Dari tabel di atas, pada kegiatan fasilitas umum mencakup fasilitas umum, sosial, perdagangan dan jasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1. yaitu peta tata guna tanah 2005 menurut *master plan* 1986.



MAGISTER TESIS PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS
EVALUASI PELAKSANAAN RTRW PADA
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA
BATAM

PETA TATA GUNA TANAH

- KETERANGAN:**
- Perumahan
 - Perumahan
 - Perumahan
 - Perumahan dan Fasilitas Umum
 - Hutan Lindung
 - Kawasan Rekreasi
 - Perumahan, Perindustrian, Perikanan
 - Daerah Basah
 - Daerah Perkotaan
 - Wilayah
 - Industri, Bangun
 - Industri Baru
 - Perikanan
 - GRC/Orak Naga
 - Perikanan
 - Rerata Gali Pantai
 - Pembangunan Tengah Laut
 - Maritim
 - Bandara Udara
 - Perumahan
 - Kampus
 - Jalan
 - Lahan Cendek
 - Rerata/Olah Raga
 - Lintas Antar-Camp/lay Ormas

0 1,5 3 KM

UTARA

Gambar 5.1

SUMBER:
MASTER PLAN PULAU BATAM
TAHUN 1986



B. *Master Plan* Tahun 1991

Pada evaluasi *master plan* Pulau Batam tahun 1991 yang diproyeksikan optimal sampai pada tahun 2006, rencana tata guna lahan di Kota Batam didasarkan pada kriteria terbangun dan tidak terbangun dibawah ini.

TABEL III.2

RENCANA TATA GUNA LAHAN PULAU BATAM TAHUN 2006

No.	Jenis Kegiatan	Luas Lahan (Ha)	Prosentasi (%)
Wilayah Terbangun :			
1.	Perdagangan	1.224,28	2,92
2.	Perumahan	4.529,68	10,81
3.	Industri	3.035,24	7,24
4.	Pariwisata	1.648,23	3,93
5.	Fasilitas Umum dan Utilitas	1.803,39	4,30
6.	Transportasi	3.079,45	7,35
7.	Lahan Cadangan	195,90	0,47
	Sub total	15.516,17	37,03
Wilayah Tak Terbangun :			
8.	Pertanian	1.711,51	4,08
9.	Hutan, kebun raya & hutan bakau	12.480,60	29,79
10.	Lahan terbuka & rekreasi	2.512,37	6,00
11.	Cadangan air & buangan	2.175,20	5,19
12.	Pemukaman Umum	28,00	0,07
13.	TPA Sampah	37,00	0,09
14.	Lahan cadangan	7.438,38	17,75
	Sub Total :	26.383,06	62,97
	Total	41.900,00	100,00

Sumber: *Master Plan* Tahun 1991

Sedangkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam peta berikut.

3.1.3. Kebijakan RTRW

3.1.3.1. Fungsi RTRW

Dalam konteks permasalahan umum pengembangan seperti tersebut dengan memperhatikan konstelasi rencana dan permasalahan-permasalahan yang ada maka penataan ruang Kota Batam pada dasarnya akan merupakan upaya pepaduserasian antara kegiatan pengembangan yang telah dilakukan di Pulau Batam, Rempang dan Galang (berdasarkan Masterplan Barelang) dengan pengembangan gugus-gugus pulau di sekitarnya ke dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dalam penyusunannya selain memperhatikan aspirasi segenap lapisan masyarakat dan aspek kelestarian lingkungan hidup, juga perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan wilayah yang lebih luas, baik pada lingkup regional, nasional maupun internasional. Dalam kaitan ini, RTRW Kota Batam perlu mengacu pada RTRW Provinsi Riau, RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), dan kebijaksanaan lain yang terkait utamanya menyangkut pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) IMS - GT dan pelaksanaan pasar bebas pada lingkup Asean (AFTA) maupun APEC.

Di antara kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain adalah penyiapan perangkat hukum daerah, struktur organisasi dan kelembagaan pemerintahan, pembentukan dan pematapan dinas/instansi Pemerintah Kota, serta penyiapan berbagai dokumen rencana pembangunan kota. Salah satu dokumen rencana tersebut adalah RTRW Kota Batam 2001-2011 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Kota. RTRW Kota ini pada dasarnya berisi kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang kota berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), dalam kerangka mengintegrasikan berbagai program dan rencana-rencana kegiatan pembangunan lintas sektor dan kawasan

dalam kota yang akan dilaksanakan baik oleh pihak pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat.

3.1.3.2. Tujuan dan Sasaran RTRW

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2001-2011 dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota Batam dalam menyiapkan sebuah pedoman pelaksanaan pembangunan kota yang memuat di dalamnya rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang, untuk mewujudkan tertib pembangunan kota (pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota) di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari penyusunan RTRW Kota Batam 2001 - 2011, adalah :

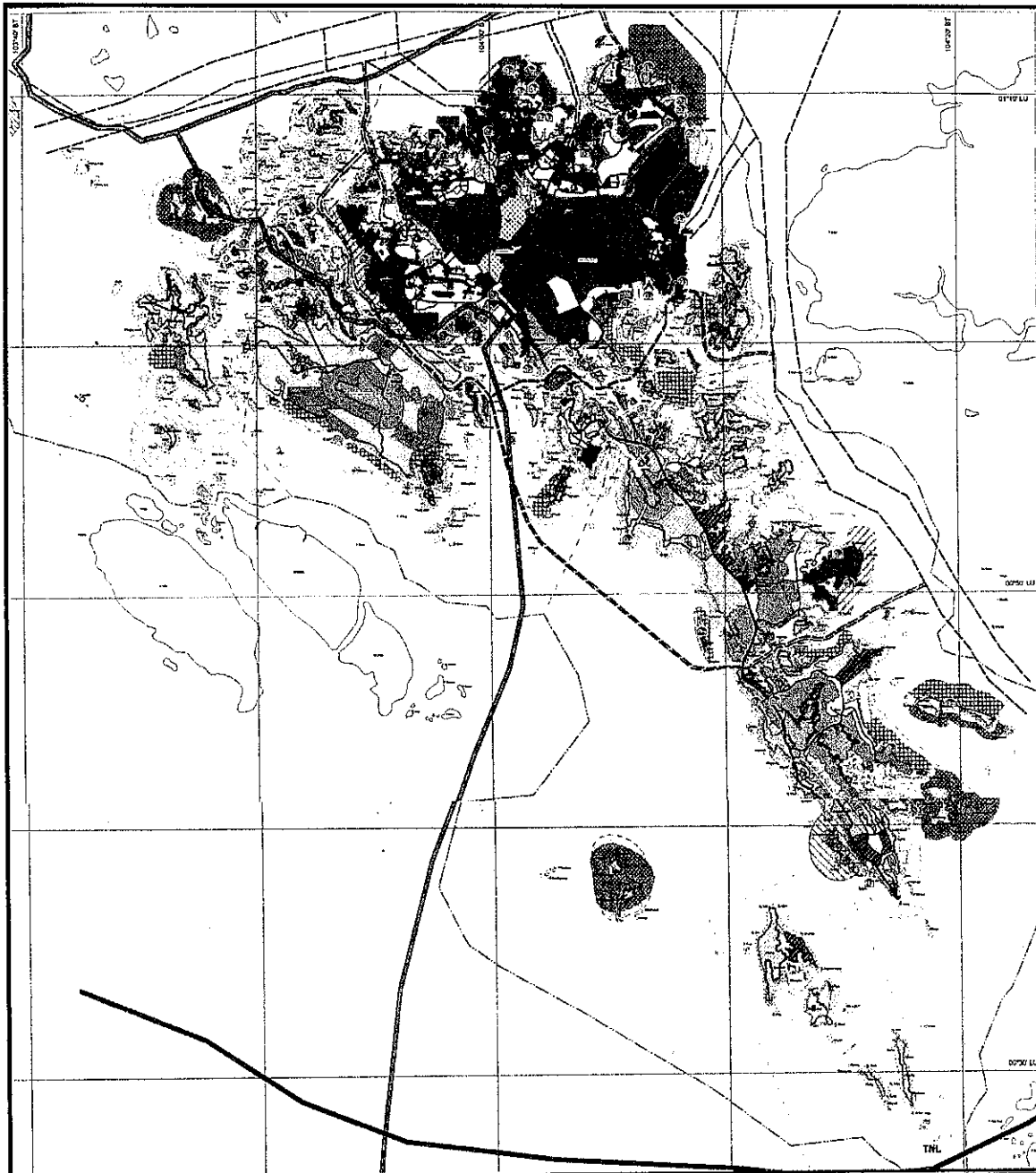
1. Menjabarkan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Riau di Kota Batam dan mengakomodasikan rencana-rencana tata ruang kota (rencana umum maupun rencana detail) yang sudah ada ke dalam struktur dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Batam yang lebih bersifat menyeluruh dan terpadu, sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.
2. Merumuskan arah kebijaksanaan, strategi dan konsep pengembangan kota, serta rencana-rencana pengembangan tata ruang dan arahan program-program pembangunan kota sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan pemerataan perkembangan sosial - ekonomi dan peningkatan kualitas fisik lingkungan kota.
3. Mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota yang seimbang, serasi dan selaras melalui penataan sistem pusat-pusat pelayanan, fungsi-fungsi kegiatan, jenjang

pelayanan, dan penataan sistem transportasi serta pola pemanfaatan ruang kota yang optimal, efisien dan efektif.

4. Melakukan evaluasi pertumbuhan wilayah kota dalam korelasinya dengan perencanaan pengembangan Kota Batam ke depan, utamanya dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan perkembangan lintas sektor/kawasan, serta mengarahkan peruntukan lahan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi secara seimbang.
5. Menetapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota/Rencana Teknik Ruang Kotanya (RTRK) sebagai pedoman operasional pembangunan kota pada lingkup yang lebih mikro.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RTRW Kota Batam 2001-2011 adalah:

- a. Tersusunnya suatu RTRW Kota Batam yang akomodatif, responsif dan ansitipatif terhadap setiap dinamika perkembangan dan kebutuhan pembangunan kota, sejalan dengan kebijaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terlengkapinya isi dan muatan RTRW Kota Batam yang mencakup substansi-substansi sebagaimana terurai pada Pasal 22 UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- c. Dapat terkendali dan terpecahkannya berbagai permasalahan pemanfaatan ruang Kota Batam selama kurun pelaksanaan rencana sampai tahun 2011.



LEGENDA: Batas Negara Batas Kota Batam Batas Kecamatan Waduk Eksisting Rencana Waduk / Cadangan Air Baku Pasir Sesar Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal I Jalan Lokal II Cross Traffic			KAWASAN LINDUNG Kawasan Hutan Lindung Kawasan Taman Wisata Alam Kawasan Ruang Hijau Kota Kawasan Rawan Sesar Sempadan Pantai / Waduk Kawasan Perlindungan Mangrove Kawasan Perlindungan Terumbu Karang Kawasan Taman Nasional Leut Kawasan Cagar Budaya Kawasan Rehabilitasi Pulau Kawasan Pengembangan Terbatas KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Pusat Pemerintahan Kawasan Perdagangan & Jasa			Kawasan Industri Kawasan Perumahan Kawasan Perumahan dengan Fasilitas Pendukung Lapangan Golf Kawasan Pariwisata Kawasan Strategis Kawasan Khusus Kawasan Pengembangan Pantai Kawasan Ekowisata Kawasan Wisata Bahari Kawasan Pertanian/Agribisnis Kawasan Budaya Tambak Kawasan Budaya Perikanan Laut Terpadu Kawasan Budaya Perikanan Laut Kawasan Pengolahan Ikan Jaket I Kawasan Pengangkutan Ikan dengan Aulr Stalk			FASILITAS PELAYANAN Fasilitas Umum Kawasan Bandara Lingkungan Kerja Pelabuhan Lingkungan Pelayanan Industri Kelautan Aulr Pelayaran Pipa Gas Kabel Laut Terminal Utama Sub Terminal Pelabuhan Angkutan Penumpang Internasional Pelabuhan Angkutan Penumpang Regional Pelabuhan Angkutan Penumpang Lokal Rencana Pelabuhan Peti Kemas Perkampungan Tua Bumi Perkemahan Lapangan Golf TPI TPI & PPI		
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO											
PETA RENCANA TATA GUNA LAHAN 2001-2011											
TESIS EVALUASI PELAKSANAAN RTRW PADA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM											
SUMBER: RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BATAM TAHUN 2001-2011											

3.1.3.3. Indikasi Program RTRW

Tahapan pelaksanaan RTRW Kota Batam pada hakekatnya dapat dilakukan melalui tiga jalur:

1. Pemerintah dalam hal ini direalisasikan dengan penyusunan Repelita dan Pola Dasar serta program/proyek tahunan
2. Masyarakat, hal ini direalisasikan melalui berbagai investasi masyarakat, baik perorangan maupun berkelompok, baik sendiri-sendiri maupun secara gabungan, atau juga dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi aktif dari masyarakat
3. Pihak swasta, hal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang berminat, yang dalam pelaksanaannya harus ada bimbingan dan pengarahan dari pemerintah.

Sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah Kota Batam, ketiga pendekatan di atas perlu dipelajari secara seksama agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak dibelakang hari. Seluruh penyelenggaraan pelaksanaan/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan untuk dapat disesuaikan dengan arahan rencana tata ruang, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengawasan, melalui perijinan kegiatan dan bangunan. Selanjutnya untuk dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, perlu pemantapan sistem koordinasi, mekanisme perijinan dan berbagai perantara serta sarana lain yang diperlukan harus dilakukan. Hal ini untuk memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi rencana.

Berdasar fungsi dan kegunaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang telah disusun perlu didukung oleh arahan-arahan yang menyangkut aspek pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pengelolaan tata ruang kota dalam kurun waktu 10 tahun. RTRW mencakup proses pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan kembali RTRW tersebut.

Selanjutnya agar pembangunan daerah berhasilguna dan berdayaguna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka rencana pembangunan yang ada perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memperoleh kekuatan hukum. Perolehan kepastian hukum dari rencana pembangunan ini melalui musyawarah antara Eksekutif (Walikota sebagai Kepala Daerah Kota Batam) dengan Legislatif (DPRD Kota Batam) dalam bentuk Peraturan Daerah. Sedangkan untuk menjamin keefektifan mekanisme pengelolaan tata ruang ini, perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai guna mengoperasionalkan perencanaan yang sudah disusun/dibuat.

Salah satu fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Batam dalam menyusun dan melaksanakan program lima tahun dan program tahunan. Indikasi program-program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program lima tahunan dalam kurun waktu 10 tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan Kota Batam yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.

Secara umum, sektor/sub sektor yang akan disusun indikasi program pembangunannya adalah sektor/sub sektor yang langsung memanfaatkan ruang (sebagai implikasi dari rencana tata ruang yang telah disusun), beserta lokasi realisasi program dalam kurun waktu 10 tahun perencanaan 10 tahun dari tahun 2001 - 2011, yang dibagi ke dalam 2 (dua) tahapan program pembangunan 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, instansi pengelola dan kemungkinan sumber dana yang bisa diperoleh.

Program-program berikut pada dasarnya masih bersifat indikatif, yang diharapkan dapat memberikan indikasi bagi penyusunan program pembangunan sektoral serta pembangunan pada wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya baik dalam jangka

lima tahun maupun pada lima tahun kedua. Indikasi dan pentahapan program pembangunan Kota Batam dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan untuk jangka waktu perencanaan 10 tahun dari tahun 2001 - 2011.

1. Indikasi Program Pembangunan Sektoral

Penyusunan program pembangunan tidak bisa terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam dan Rencana Pembangunan Lima tahun sebagai penjabarannya. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh Departemen/Instansi di Pusat maupun di Propinsi Riau.

Dalam penyusunan indikasi program penataan ruang sektoral yang dijabarkan dalam program pembangunan lima tahunan ini yang terkait dalam setiap kawasan akan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Kota Batam
2. Disusun atas dasar potensi dan permasalahan sektoral yang ada di Kota Batam
3. Diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan penanganan skala prioritas dan yang mempunyai peranan cukup besar
4. Disusun dengan memperhatikan keterpaduan usaha-usaha pembangunan antar sektor sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah Kota Batam.

Sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan tetap diletakkan pada peningkatan pertumbuhan di bidang ekonomi yang dititik beratkan pada pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata secara luas serta menjaga agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan antar wilayah yang ada di Kota Batam. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, disesuaikan dengan potensi dan permasalahan spesifik wilayah-wilayah yang ada di Kota

Batam. Adapun sektor-sektor pembangunan fisik yang harus dipertimbangkan program pembangunan serta sumber pembiayaannya, adalah :

- a. Pembangunan sektor pengangkutan berupa pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan/pemeliharaan terminal/pelabuhan, pengadaan/pemeliharaan marka jalan dan tanda-tanda lalu lintas, serta penyediaan angkutan masal yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Batam
- b. Pembangunan sektor perdagangan, berupa pengadaan/pemeliharaan sarana perdagangan seperti pasar, pertokoan dan sarana perdagangan modern lainnya
- c. Pembangunan sektor perumahan, berupa pengadaan perumahan murah dan perumahan dinas serta program perbaikan kondisi bangunan
- d. Pembangunan sarana pendidikan dan budaya, berupa pembangunan gedung-gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, gedung kesenian, dan sebagainya
- e. Pembangunan sarana peribadatan, berupa rumah ibadat untuk semua pemeluk agama
- f. Pembangunan sarana kesehatan, berupa rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, poliklinik, dan sebagainya
- g. Pembangunan sarana air bersih berupa pengembangan dan pemeliharaan instalasi pengelolaan air bersih, penyediaan sumber-sumber air baku baru serta pemeliharaan dan perluasan saluran jaringan pelayanan
- h. Pembangunan prasarana listrik berupa peningkatan kapasitas dan jaringan pembagi, pemeliharaan gardu-gardu induk dan jaringan serta perluasan jaringan pelayanan
- i. Pembangunan prasarana telepon, berupa pengadaan/pengembangan sentral-sentral otomatis, jaringan distribusi dan pelayanan telepon umum
- j. Pembangunan prasarana air buangan, berupa pembangunan sistem jaringan drainase yang berhirarki sebagai buangan air hujan dan air limbah serta lokasi induk pembuangan/*waste water disposal*.

- k. Pembangunan elemen-elemen untuk meningkatkan estetika dan kenyamanan kehidupan kota seperti taman-taman lingkungan, taman kota, jalur hijau dan sebagainya.

Sedangkan penyusunan program dalam rangka pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya didasarkan pada potensi pengembangan spasial maupun sektoral yang dihadapi di daerah, tujuan penanganan, dan dikaitkan pada alokasi pemanfaatan ruang bagi sektor yang bersangkutan. Pengembangan kawasan budidaya sebagai pengisian daripada rencana-rencana pembangunan di daerah, sebagaimana telah dikemukakan, akan dibatasi oleh pendeliniasian dan pemantapan terlebih dahulu kawasan yang berfungsi lindung dan yang seharusnya berfungsi lindung.

2. Indikasi Program Pembangunan di Kawasan Prioritas

Indikasi program pembangunan kawasan prioritas merupakan program-program pembangunan yang diperkirakan cukup mendesak untuk dibangun dan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program-program tahunan yang akan mendorong perkembangan kawasan-kawasan prioritas dan diharapkan akan berdampak positif dalam memacu pembangunan Kota Batam secara keseluruhan. Kriteria umum dalam penyusunan indikasi program kawasan prioritas yang dijabarkan dalam program pembangunan tahunan ini, adalah :

1. Kawasan yang diharapkan akan memberikan kontribusi dan dampak pengembangan daerah yang besar
2. Kawasan yang merupakan kawasan strategis dan penting dalam struktur pengembangan tata ruang
3. Kawasan yang mempunyai nilai hankam dan politis yang perlu dipertahankan
4. Kawasan yang mempunyai nilai lingkungan yang perlu dilestarikan.

Secara umum indikasi program tahunan yang dilaksanakan sampai dengan lima tahun mendatang akan dikaitkan pula pada sektor/sub sektor yang secara langsung dan banyak memanfaatkan ruang, sebagai implikasi dari rencana tata ruang yang telah dirumuskan. Karena itu sebagai implikasi langsung dari RTRW Kota Batam yang telah dirumuskan, sektor-sektor yang dijelaskan indikasi programnya dalam penataan ruang Kota Batam terutama yang berkaitan dengan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, perhubungan, pertanian dan perikanan, dan sebagainya. Sektor lainnya pada dasarnya melengkapi/mengikuti sektor-sektor tersebut.

Selanjutnya dalam program penataan ruang Kota Batam dikemukakan secara lebih khusus indikasi program bagi kawasan prioritas sebagaimana telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, baik berupa kawasan prioritas, kawasan kritis dan rawan, maupun kawasan yang untuk aspek-aspek Hankam. Dalam kaitan ini pengembangan kawasan strategis lebih ditekankan pada upaya untuk memacu perkembangan sektor-sektor strategis yang dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengembangan kawasan kritis dan rawan lebih ditekankan pada penanganan permasalahan lingkungan yang kritis dan rawan, seperti penataan kawasan disekitar waduk yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk Kota Batam. Pengembangan kawasan khusus ini berkaitan pula pada program-program pengembangan sosial-ekonomi untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah yang ada di Kota Batam.

TABEL III.3
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM TAHUN 2001-2011

No	Arahan Rencana	Program Pembangunan	Lokasi	Periode Tahun										Anggaran Pembangunan		
				Lima Tahun I					Lima Tahun II							
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
I	Kawasan Lindung	1. Pengamanan Kawasan Tangkapan Air dan Sempadan Waduk	Kecamatan Nongsa												APBD	
		2. Penetapan dan Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai	Kota Batam													APBD
		3. Penetapan dan Perlindungan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya (Kawasan Hutan Bakau)	Kota Batam													APBD
		4. Kawasan perlindungan keselamatan operasi penerbangan	Kecamatan Nongsa													APBD
II	Pusat Pemerintahan	1. Pengembangan areal perkantoran pemerintahan	Batam Center												APBD	
		2. Pengembangan areal perkantoran swasta dan <i>World Trade Center</i>	Batam Center												Swasta	
		3. Pengembangan kawasan pelayanan umum (<i>Areal Public Space</i>)	Batam Center												APBD dan Swasta	
III	Kawasan Industri	Pengembangan industri ringan-menengah dan industri perakitan (<i>assembling</i>)	Batam Center												Swasta dan Masyarakat	
		1. Pengembangan Kawasan Pariwisata	Batam Center												Swasta	
IV	Pariwisata	a. Pengembangan wisata bahari	Batam Center												Swasta	
		b. Pengembangan wisata belanja	Batam Center												Swasta	
		2. Pengadaan Prasarana Penunjang Wisata	Kota Batam												APBD	
		a. Peningkatan aksesibilitas menuju obyek wisata	Kota Batam													APBD dan Swasta
V	Kawasan Perdagangan dan Jasa	b. Pengadaan kapal-kapal wisata	Kota Batam												Swasta	
		1. Pengembangan pusat perdagangan Batam Center	Batam Center												APBD dan Swasta	
		2. Pengembangan kawasan perdagangan informal (PKL/Pujasera)	Kota Batam												Swasta	
															APBD dan Swasta	

No	Arahan Rencana	Program Pembangunan	Lokasi	Periode Tahun											Anggaran Pembangunan
				Lima Tahun I					Lima Tahun II						
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
VI	Kawasan Permukiman	1. Pengembangan rumah susun sewa dan kapling siap bangun pengganti ruli 2. Pengembangan perumahan	Barelang												APBD
VII	Kegiatan Pertanian	Pengembangan kegiatan perikanan skala besar	Kota Batam												Swasta
VIII	Transportasi	1. Pengembangan jaringan jalan utama 2 jalur di Barelang 2. Pembangunan terminal transit	Kota Batam												Swasta
		1. Pengembangan jaringan jalan utama 2 jalur di Barelang 2. Pembangunan terminal transit	Barelang												Otorita Batam
		3. Pengadaan bus kota dan angkutan kota lainnya	Batam Center												Otorita Batam
		4. Pengembangan pelabuhan internasional angkutan penumpang	Barelang												Damri dan Swasta
IX	Penyediaan Sarana Pelayanan Kota	1. Sarana Pendidikan (Balai Latihan Kerja) 2. Sarana Kesehatan (Rumah Sakit Umum Pusat)	Batam Center												Otorita Batam
		1. Sarana Pendidikan (Balai Latihan Kerja)	Pulau Batam												APBD dan Swasta
		2. Sarana Kesehatan (Rumah Sakit Umum Pusat)	Kecamatan Nongsa												APBD
X	Pengembangan Utilitas Kota	1. Pengembangan sistem jaringan air bersih 2. Pengembangan sistem drainase 3. Sistem pengolahan persampahan 4. Pengembangan sistem jaringan listrik 5. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi													Otorita Batam dan PDAM
		1. Pengembangan sistem jaringan air bersih	Kota Batam												Otorita Batam
		2. Pengembangan sistem drainase	Kota Batam												APBD
		3. Sistem pengolahan persampahan	Kota Batam												APBD
		4. Pengembangan sistem jaringan listrik	Kota Batam												PLN
		5. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	Kota Batam												PT. Telkom

Sumber: Bappeda Kota Batam

3.1.3.4. Saran dan Tindak RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam merupakan tindak lanjut Rencana Strategi Tata Ruang Propinsi Riau yang bersifat mengarahkan pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang atau tanah sebagaimana pengertian dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992. Pada tingkat rencana ini mulai ada petunjuk praktis yang operasional, dan agar lebih mudah dalam pelaksanaan di lapangan perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail lagi sampai pada rencana tata ruang tingkat sub wilayah pengembangan dan pada tingkat kecamatan bahkan sampai pada kawasan-kawasan khusus. Rencana tata ruang kawasan yang mempunyai sifat khusus antara lain tempat wisata, kawasan industri, dan kawasan di kiri kanan sepanjang sungai / waduk, serta rencana pengembangan lainnya yang dianggap perlu untuk lebih didetailkan. Agar RTRW Kota Batam yang telah disusun dapat lebih dioperasionalkan, maka perlu ditidakanjuti, diantaranya seperti yang tertuang dalam sub bab berikut yang merupakan rekomendasi untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini.

1. Lembaga Pelaksana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Belum optimalnya fungsi, tugas dan kewenangan instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kota Batam menyebabkan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagian besar dirangkap oleh instansi yang ada. Kondisi ini akan semakin berat apabila otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mulai diberlakukan tahun 2001. Dalam ketetapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Batam berwenang melakukan seluruh kegiatan pemerintahan, kecuali tujuh kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Hankam, Politik Luar Negeri, Moneter, Keagamaan, Pertanian,

dan Kehutanan. Untuk mengantisipasi pelimpahahan kewenangan tersebut, pemerintah kota perlu mempersiapkan dinas/instansi pelaksana, yang dikembangkan dari dinas/instansi yang telah ada atau pembentukan instansi baru.

Berkaitan dengan ketetapan di atas, Pemerintah Kota Batam telah mempersiapkan dinas-dinas instansi pelaksana, untuk mempermudah kinerja pelayanan dan tugas-tugas Walikota sebagai Kepala Pemerintahan dalam pembangunan kota. Hal ini dimaksudkan agar fungsi dan tugas masing-masing dinas pemerintahan yang sudah terbentuk efektif dan efisien, maka setiap dinas harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas lain, sehingga tercipta keterpaduan, keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan kota. Sebagai implementasinya adalah dengan dibentuknya pelayanan satu atap (*one stop service*) terutama dalam pengurusan perijinan serta dibentuknya Forum Komunikasi Pembangunan Kota yang terdiri dari unsur-unsur tersebut diatas.

2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Bila rencana tata ruang ini dapat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan sebagai peraturan daerah, maka ketetapan-ketetapan di dalamnya memiliki kekuatan hukum karena dapat dianggap sebagai kesepakatan bersama masyarakat Kota Batam, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang, maka sebelum diajukan menjadi Peraturan Daerah, rencana ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak, sehingga mereka dapat memahami dan mengetahui dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan kepada mereka apabila rencana ini ditetapkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media masa, seminar terbatas bersama perguruan tinggi, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, alim ulama, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Batam.

Di Kota Batam telah dibentuk Forum Komunikasi Pembangunan Kota, kegiatan tersebut dapat memanfaatkan keberadaan forum tersebut sebagai wadah pengambilan keputusan bersama seluruh pihak terkait (eksekutif, legislatif, pakar, tokoh masyarakat) untuk selanjutnya disebarluaskan melalui media masa.

3. Aspek Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam yang disusun ini perlu mendapat dukungan hukum atau mendapat legalitas dalam bentuk Peraturan Daerah, agar memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Ini disebabkan aspek legalisasi RTRW ini merupakan landasan penting sebelum RTRW Kota Batam dilaksanakan dan berfungsi sebagai kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang kota. Adapun penetapan legalitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang disahkan oleh Walikota Batam dengan mendapat persetujuan DPRD Kota Batam.

Sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, RTRW Kota Batam yang telah disusun oleh pemerintah kota (Tim Tata Ruang Kota) dengan bantuan tenaga ahli telah pula dibahas dan disempurnakan dengan melibatkan instansi vertikal dan dinas-dinas otonom yang terkait di daerah, Otorita Batam (BIDA) serta wakil masyarakat dan swasta. Kehadiran instansi atau pihak terkait dalam rapat-rapat koordinasi untuk pembahasan dan penyempurnaan konsep RTRW jelas sangat bermanfaat untuk mencapai kesepakatan dan sinkronisasi RTRW dengan rencana-rencana sektoral yang sudah ada, bahkan masih dalam taraf konsep dan kegiatan proyek usulan yang diajukan. Walaupun demikian, manfaat formal dari RTRW ini tidak dapat dirasakan dan tidak efektif sebelum RTRW ini mempunyai ketentuan hukum untuk dilaksanakan, iklim administratif pemerintah yang mendukung (termasuk sistem informasinya) dan sumber biaya pengelolaannya yang memadai, serta struktur kelembagaan yang terintegrasi dan operasional.

Penetapan RTRW sebagai Peraturan Daerah merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan setelah RTRW Kota Batam ini berhasil disusun dan selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Aspek legalisasi ini menjadi prasyarat mendasar dalam proses implementasi RTRW sebagai produk rencana yang secara hukum akan mengikat. Dalam hubungan ini faktor koordinasi antar instansi di Kota Batam menjadi bagian penting yang menentukan apakah mekanisme pengelolaan tata ruang dapat dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Setelah itu perlu dilanjutkan dengan mensosialisasikan RTRW Kota Batam kepada masyarakat serta menindaklanjuti penyusunan RTRW Kota Batam pada rencana yang lebih detail dengan skala dan kedalaman yang lebih detail pula. Ini dikarenakan RTRW Kota Batam merupakan produk rencana yang masih bersifat arahan saja, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana yang lebih detail dan lebih operasional.

4. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Pada dasarnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini harus menjadi pedoman keruangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kota Batam. Oleh karena itu RTRW Kota Batam perlu disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan keadaan perkembangan sosial - ekonomi yang terjadi di Batam secara dinamis. Agar tetap sesuai dengan gerak dinamika pembangunan kota. Untuk itu RTRW Kota Batam ini perlu ditinjau kembali atau dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali atau bilamana dianggap perlu oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Kota. Posisi RTRW pada tahun 2004 ini sedang dilakukan evaluasi, mengingat ada beberapa fungsi yang harus disesuaikan tuntutan perkembangan Kota Batam dewasa ini.

Peninjauan kembali RTRW Kota Batam ini dimaksudkan untuk penyempurnaan atau merevisi materi rencana dengan mempertimbangkan kondisi dan perubahan-perubahan pesat yang terjadi. Penyempurnaan RTRW Kota Batam perlu dilakukan jika hasil peninjauan kembali (evaluasi) ini menunjukkan adanya penyimpangan yang mendasar dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam rencana seperti kebijakan pemerintah, perkembangan sosial ekonomi, penemuan teknologi baru dan sebagainya sehingga materi rencana perlu disesuaikan. Dalam kaitan ini, peninjauan kembali merupakan upaya untuk menjaga fleksibilitas dari rencana tata ruang agar senantiasa dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi.

5. Pendetailan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam pada dasarnya digunakan sebagai pedoman maupun acuan di dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, serta yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota oleh semua pengambil keputusan di Kota Batam. Agar Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini dapat lebih operasional dalam penerapannya di lapangan, perlu dilakukan upaya-upaya pendetaillan/penjabaran, terutama pada kawasan/kota yang diprioritaskan penanganan atau pengembangannya. Penjabaran rencana tata ruang pada jenjang yang lebih rendah tersebut tetap mengacu pada rencana-rencana tata ruang wilayah yang lebih tinggi yang ada di Kota Batam (RTRW Propinsi Riau dan RTRW Nasional), serta kebijaksanaan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan penataan ruang.

Adapun pembuatan rencana tata ruang pada jenjang yang lebih rendah tersebut, diantaranya meliputi :

- Pembuatan Foto Udara dan Peta Dasar Wilayah Kota Batam
- *Urban Design Guide Line* Kawasan Koridor Bareleng

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perkantoran di Batam Center
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa di Jodoh - Nagoya
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pusat Perdagangan dan Jasa Kawasan Jodoh dan Kawasan Nagoya
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pusat Kegiatan Wisata
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Kabil dan Tanjung Uncang - Sagulung
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pelabuhan
- Penyusunan Rencana Sistem Transportasi Kota Batam
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kelautan Kota Batam
- Penyusunan rencana-rencana detail lainnya yang dianggap perlu dan cukup mendesak untuk dilakukan penanganan.

3.2. Proses Perencanaan Pembangunan Kota Batam

3.2.1. Forum Koordinasi Pembangunan Daerah

Forum koordinasi pembangunan daerah merupakan suatu forum yang bertujuan untuk menghasilkan konsensus, komitmen, kesepakatan dan kemitraan di antara pemerintah daerah dan para pelaku pembangunan dalam implementasi pembangunan daerah satu tahun ke depan sebagai bagian integral dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA). Fungsi forum koordinasi ini antara lain (Departemen Dalam Negeri, 2003):

1. Media Komunikasi dan Konsultasi
2. Media mengembangkan Komitmen, Konsensus dan Kesepakatan

3. Media meningkatkan keterlibatan para pelaku dalam pengambilan keputusan
4. Media untuk memadukan berbagai alur perencanaan
5. Media resolusi konflik kepentingan

Penyelenggaraan forum ini melalui serangkaian tahapan proses antara lain sebagai berikut (yang akan dibahas disini adalah khusus bidang Bidang Fisik Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup), yaitu:

Tahap 1 Pembentukan Tim Pelaksana Forum

- Status Tim
- Peranan dan Fungsi Tim
- Struktur organisasi Tim
- Ruang Lingkup Kerja Tim.

Tahap 2 Persiapan Pelaksanaan Forum

- Briefing Ketua Tim.
- Inventarisasi Usulan Program dan Proyek.
- Perumusan Kriteria dan Pembobotan Usulan.
 - a. Kedudukan usulan terhadap rencana makro
 - b. Kelayakan usulan, antara lain:
- Pengorganisasian dan pengkajian usulan.
- Penyusunan Dokumen Rancangan 'Sementara' Usulan.
- Penyampaian Undangan Forum.

Tahap 3 Pelaksanaan Forum Koordinasi

- Agenda Sidang Forum.
- Organisasi Penyelenggaraan Persidangan.

- a. Fasilitator..
 - b. Moderator.
 - c. Notulen (atau *note taker*).
 - d. Ruang sidang memadai.
 - e. Fasilitas dan Peralatan Persidangan.
 - f. Seminar Kit.
- Peserta Forum.

Tahap 4 Dokumentasi Hasil Forum

- Penyusunan Dokumentasi Hasil Forum.
- Diseminasi dan Sosialisasi.

Tahap 5 Penyusunan Rencana Tindak

Hasil-hasil kesepakatan Forum selanjutnya perlu ditindak-lanjuti oleh Dinas/Bagian/Unit organisasi Pemerintah Daerah agar benar-benar dapat direalisasikan.

- Penyusunan Dokumen REPETADA.
- Penyiapan RAPBD.
- Verifikasi Kelayakan Usulan.
- Penyusunan Rencana Definitif.
- Penyusunan RAPBD.
- Penyusunan Rekomendasi.

3.3. Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Batam

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok badan ini adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Fungsi badan ini sesuai dengan tugas yang diberikannya antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
2. Penyelenggaraan penelitian untuk menunjang perencanaan.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan.
4. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis.
6. Pengelolaan urusan tata usaha Badan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, maka badan ini diberikan kewenangan yang terdiri dari:

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari: Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) dan Perencanaan Strategis (RENSTRA).
2. Menyusun program dan kegiatan tahunan yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

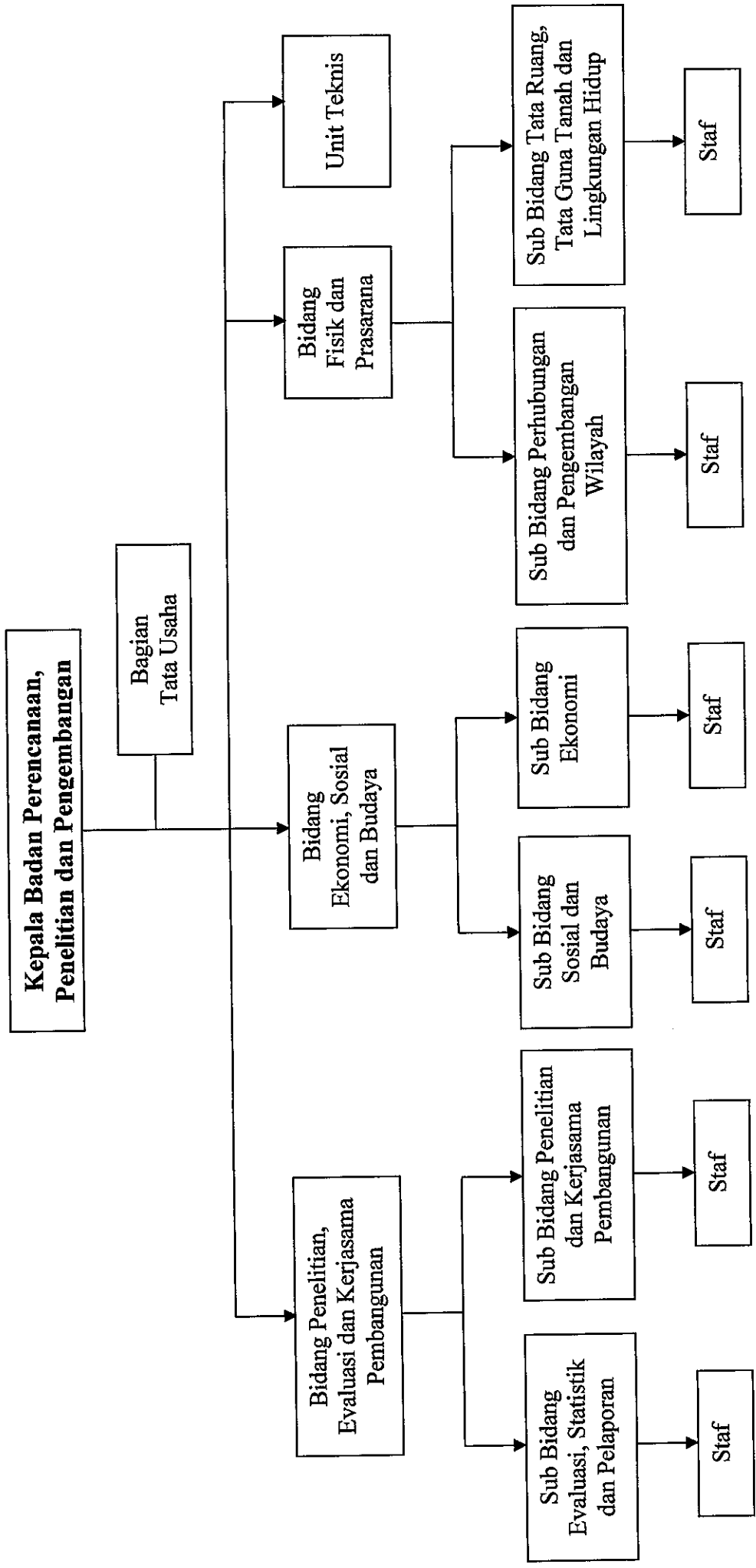
3. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan usulan program/proyek pembangunan, serta mengadakan penelitian unuk kepentingan perencanaan daerah.
4. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam bersama-sama dengan Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan, serta Dinas Pendapatan dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
5. Menyusun rencana Tata Ruang dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
6. Melakukan koordinasi perencanaan terhadap Dinas/Badan/Kantor/Satuan Unit Kerja dan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan daerah.
8. Melakukan koordinasi perencanaan kerjasama antar daerah dan luar negeri.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perencaaan pembangunan di daerah sesuai dengan kebijakan Walikota.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Program
- c. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan
 2. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan

- d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - 2. Sub Bidang Ekonomi
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Batam

GAMBAR 3.4
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA) KOTA BATAM

3.4 Rencana Program dan Kegiatan Hasil Rakorbang II Kota Batam Tahun 2004

Rencana Program dan Kegiatan Hasil Rakorbang II Kota Batam Tahun 2004

Bidang Fisik dan Prasarana di Kecamatan Nongsa terlihat dalam tabel berikut.

TABEL III.4

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL
RAKORBANG II KOTA BATAM 2004 BIDANG FISIK DAN PRASARANA DI
KECAMATAN NONGSA**

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
PERMUKIMAN	PENYEHATAN LINGKUNGAN	Penyehatan lingkungan permukiman: 1. Semenisasi Jalan Tanjung Sauh 2. Semenisasi Jalan Sungai Kasam 3. Semenisasi Kantor Lurah Ngenang Sistem Pengelolaan Persampahan: 1. Pemeliharaan TPA 2. Pembangunan Gedung Kantor TPA 3. Pembuatan Rumah Jembatan Timbang	Ngenang Kabil Ngenang Tl. Punggur
	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH	Pembuatan sumur bor Pulau Kasam, Sungai Kasam, Teluk Lunggu dan Ngenang	Kabil
	PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1. Pembangunan rumah penduduk Ngenang 2. Pembangunan rumah penduduk Tanjung Sauh 3. Pembangunan rumah penduduk Pulau Kubung 4. Pembangunan rumah penduduk Pulau Todak 5. Pembangunan rumah penduduk Dapur Arang	Ngenang Ngenang Ngenang Ngenang
PEKERJAAN UMUM	PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1. Jalan masuk Kavling Nongsa 2. Peningkatan Jalan Kampung Lembang Jaya 3. Peningkatan Jalan RW I Kampung Tengah 4. Peningkatan Jalan Tanjung Memban 5. Peningkatan Jalan Kampung Jabi 6. Peningkatan Jalan Menuju SD Kampung Melayu Batu Besar 7. Jalan menuju pasar Kampung Melayu 8. Jalan Teluk Lunggu 9. Jalan Kavling Senjulung 10. Jalan masuk MDA Teluk Nipah	Nongsa Batu Besar Batu Besar Batu Besar Batu Besar Batu Besar Batu Besar Kabil Kabil Kabil
	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Pembangunan Pelantar Teluk Lunggu	Kabil
	PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1. Drainase pasar Kampung Melayu	Batu Besar

Lanjutan ...

BDANG	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI
PEKERJAAN UMUM	PENYELAMATAN HUTAN, TANAH DAN AIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan batu miring SD 05 Telaga Punggur 2. Batu miring SD 03 Nongsa 3. Batu miring Puskesmas Sambau 4. Batu miring Lapangan Sepakbola Pulau Kubung 	<p>Kabil</p> <p>Nongsa Nongsa Ngenang</p>
PERHUBUNGAN	PENGEMBANGAN FASILITAS PENUNJANG ANGKUTAN DAN PEJALAN	<p>Pengembangan fasilitas angkutan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Halte Kampung Melayu Nongsa 2. Halte Kampng Jabi 3. Halte Kampung Tengah 4. Halte Simpang Batu Besar 5. Halte Komplek Bandara 6. Halte SLTP 17 Telaga Punggur 	<p>Nongsa Kamp. Jabi Kp. Tengah Batu Besar Bandara Tl. Punggur</p>

Sumber: RTRW Kota Batam 2001-2011

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

PADA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM

Analisis Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Batam pada penelitian ini dapat dilihat dari kesesuaian lokasi usulan program pembangunan kota Batam tahun 2004 terhadap RTRW kota Batam, peran instansi terhadap penggunaan RTRW sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dimanfaatkannya RTRW dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan daerah, perhatian instansi terhadap RTRW, pemanfaatan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan daerah, analisis proses sosialisasi RTRW terhadap dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kota Batam, analisis proses penyusunan usulan program pembangunan kota Batam, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan RTRW dalam program pembangunan kota Batam.

4.1 Analisis Kesesuaian Lokasi Usulan Program Pembangunan Kota Batam Tahun 2004 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara Usulan Program Pembangunan Kota Batam terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam, salah satunya adalah dengan melihat lokasi kegiatan antara yang tercantum dalam Usulan Program Pembangunan dengan RTRW berdasarkan bidang-bidang pembangunan. Bidang pembangunan dalam penelitian ini dibatasi pada Bidang Fisik dan Prasarana di

Kecamatan Nongsa pada Buku Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kota Batam Tahun 2004.

Materi RTRW yang dapat digunakan sebagai pembandingan terhadap kesesuaian Usulan Program Pembangunan Kota Batam berupa Indikasi Program Pembangunan serta Rencana Pemanfaatan Lahan, terutama Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas. Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas, disebutkan bahwa salah satu kawasan yang diprioritaskan pengembangannya adalah kawasan Kampung Melayu. Kampung-kampung Melayu yang ada di Kecamatan Nongsa terdiri dari: Kampung Melayu Nongsa, Kampung Jabi, Kampung Tengah, Batu Besar, Panau-Kabil, dan Sei Kasam.

Jika dikaitkan dengan Rencana Program Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Kota Batam Tahun 2004 di Kecamatan Nongsa, terdapat beberapa program yang mengacu pada RTRW Kota Batam berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Prioritas Kampung Melayu terutama peningkatan kualitas lingkungan. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Lokasi rencana kegiatan yang diusulkan terdapat di:

- Kampung Melayu Nongsa

Kegiatan yang diusulkan berupa: Peningkatan Jalan Menuju SD Kampung Melayu Nongsa, jalan menuju Pasar Kampung Melayu dan jalan RW 8 Kampung Melayu.

- Kampung Jabi

Kegiatan yang diusulkan berupa peningkatan jalan Kampung Jabi.

- Kampung Tengah

Kegiatan yang diusulkan adalah peningkatan jalan RW I Kampung Tengah.

- Batu Besar

Kegiatan yang diusulkan adalah jalan kantor Lurah Batu Besar.

2. Program Penanggulangan Bencana Alam

Kegiatan yang diusulkan berupa drainase pasar Kampung Melayu.

3. Program Penyehatan Lingkungan

Rencana kegiatan terdiri dari: Semenisasi Jalan Sungai Kasam dan Semenisasi Kantor Lurah Ngenang.

4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari: Pembuatan Sumur Bor Pulau Kasam dan Ngenang.

5. Program Penyediaan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan yang diusulkan berupa pembangunan rumah penduduk Ngenang.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Indikasi Program pada RTRW Kota Batam, terdapat hubungan antara Rencana Program Bidang Fisik dan Prasarana Kota Batam Tahun 2004. Dimana disebutkan dalam Indikasi Program RTRW bahwa adanya arahan rencana pengembangan utilitas kota berupa program pembangunan sistem pengolahan persampahan (Tempat Pembuangan Akhir/TPA). Sedangkan dalam Rencana Program Bidang Fisik dan Prasarana Tahun 2004 terdapat Program Penyehatan Lingkungan berupa Kegiatan Pemeliharaan TPA, Gedung Kantor TPA serta Pembuatan Jembatan Timbang di TPA Telaga Punggur.

Pada sektor perhubungan, terdapat kaitan antara RTRW dengan Usulan Program Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana. Indikasi Program pada RTRW menyebutkan bahwa arahan rencana transportasi pada tahun 2003-2004 mencantumkan program pembangunan terminal transit di Batam Center. Namun pada tahun 2004 pembangunan terminal transit tersebut telah terealisasi. Program pembangunan tersebut dilanjutkan dengan adanya usulan Program Program Pembangunan Tahun 2004 berupa Rencana

Pengembangan Fasilitas Angkutan Umum (Halte) di Kampung Melayu Nongsa, Kampung Jabi, Kampung Tengah, Simpang Batu Besar, Komplek Bandara dan Telaga Pungur.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan terdapat korelasi yang sangat baik antara penyusunan program pembangunan dengan arahan yang terdapat di dalam dokumen RTRW. Untuk lebih jelas lihat Gambar 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

**EVALUASI PELAKSANAAN RTRW
PADA PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BATAM**

PETA

**ANALISIS KESESUAIAN LOKASI USULAN PROGRAM
TERHADAP RTRW BIDANG PEKERJAAN UMUM**

KETERANGAN:

● Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas (Kampung Melayu) pada RTRW Kota Batam, di:

1. Nongsa
2. Kampung Jabi
3. Kampung Tengah
4. Batu Besar
5. Panan - Kabil
6. Sei Kasam

○ Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan pada Usulan Program Pembangunan Kota Batam di:

1. Kampung Melayu Nongsa (Jln. masuk kavling Nongsa)
2. Batu Besar (Kampung Lembang Jaya, RW 1 Kampung Tengah, Tanjung Mamban, Kampung Jabi, SD Kampung Melayu, jalan menuju Pasar Kampung Melayu Batu Besar)
3. Kabil (Teluk Lembang, Kavling Senjulang, jalan masuk MDA Teluk Nipah)

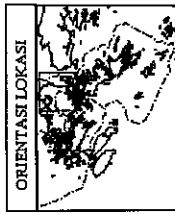
○ Pembangunan pelantar Teluk Lembang

○ Lokasi Kegiatan Pembangunan Drainase Pasar Kampung Melayu Batu Besar

○ Lokasi Kegiatan Pembangunan batu miring di:

1. Kabil (SD 5 Telaga Punggur)
2. Nongsa (batu miring SD 3 Nongsa, Puskesmas Sambutan)
3. Ngenang (lapangan sepak bola Pulau Kabung)

LEGENDA		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN	
...



Gambar 4.4

Sumber:
RTRW Kota Batam 2001-2011



TABEL IV.1

ANALISIS KESESUAIAN LOKASI USULAN PROGRAM BIDANG FISIK DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2004 DENGAN RTRW

ARAHAN PEMBANGUNAN PADA RTRW		PROGRAM PEMBANGUNAN DASK 2004			PROSENTASE KESESUAIAN
JENIS USULAN PROGRAM	LOKASI	JENIS USULAN PROGRAM	LOKASI	KETERANGAN	
A. 1 Bidang Permukiman Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas (Kampung Melayu)	1. Nongsa 2. Kampung Jabi 3. Kampung Tengah 4. Batu Besar 5. Panau Kabil 6. Sei Kasam 7. Ngenang	A. 1 Bidang Permukiman Semenisasi 2 Pembuatan Sumur Bor 3 Pembangunan Rumah Penduduk	1. Sei Kasam- Pulau Kasam 2. Kantor Lurah Ngenang 1. Pulau Kasam 2. Pulau Ngenang 1. Pulau Ngenang	Usulan Lokasi sesuai target tercapai 57%	57%
B. 1 Bidang Perhubungan Rencana Pembangunan Terminal Transit	Batam Center	B. 1 Bidang Perhubungan Pembuatan Halte	1. Kampung Melayu 2. Kampung Jabi 4. Simpang Batu Besar 5. Komplek Bandara 6. Telaga Punggur	Lokasi dan jenis program tidak sesuai	100%
C. 1 Bidang Persampahan Sistem Pengolahan Persampahan	Telaga Punggur	C. 1 Bidang Persampahan Program Pengelolaan Persampahan	Telaga Punggur	Lokasi dan jenis program sesuai	100%
D. 1 Bidang Pekerjaan Umum Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas (Kampung Melayu) pada	1. Nongsa 2. Kampung Jabi 3. Kampung Tengah 4. Batu Besar 5. Panau Kabil 6. Sei Kasam	D. 1 Bidang Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan	1. Kampung Melayu Nongsa 2. Kampung Jabi 3. Kampung Tengah 4. Batu Besar	Usulan lokasi sesuai target tercapai 67%	67%
Rata-rata					81%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

4.2 Analisis Peran Instansi Terhadap Penggunaan RTRW sebagai Salah Satu Pertimbangan Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan

Penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan rencana program pembangunan diketahui berdasarkan hasil survey primer berupa penyebaran kuesioner pada beberapa instansi di Pemerintah Kota Batam. Instansi yang dijadikan reponden atau objek penelitian adalah instansi yang mempunyai kegiatan program pembangunan fisik.

TABEL IV.2
PERAN INSTANSI TERHADAP PENGGUNAAN RTRW
DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Penggunaan RTRW	Frekuensi (f)	Prosentase (%)	Frekuensi Komulatif
Tidak Menggunakan	15	93,7 %	93,7 %
Menggunakan	1	6,3 %	100,0 %
Jumlah	16	100,0 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Berdasarkan Tabel IV.2 diketahui sebagian besar instansi tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, dimana 1 dari 16 instansi atau sebesar 6,3% saja yang menggunakan RTRW sebagai salah satu acuan dalam penyusunan usulan program dalam pembangunan. Sedangkan 15 dari 16 instansi tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan dengan prosentase sebesar 93,7%. Sehingga dapat diketahui bahwa masih rendahnya implementasi penggunaan RTRW dalam setiap penyusunan usulan program pembangunan di setiap instansi di Kota Batam.

TABEL IV.3
ALASAN RESPONDEN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN RTRW
DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Penggunaan RTRW	Alasan	Jumlah	Prosentase
1	Menggunakan	Karena RTRW sebagai salah satu panduan pembangunan	1	6,3
		Didalam RTRW terdapat tahapan pelaksanaan pembangunan	-	-
		RTRW membantu penyusunan prioritas program dan proyek	-	-
		RTRW memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan	-	-
Jumlah Menggunakan			1	6,3
2	Tidak menggunakan	Tidak ada ketentuan bahwa RTRW harus digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan	2	12,4
		RTRW tidak memberikan arahan penggunaan lahan yang jelas	1	6,3
		Tidak menerima atau memiliki dokumen RTRW	1	6,3
		RTRW sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	2	12,4
		Substansi RTRW terlalu umum	9	56,3
Jumlah tidak menggunakan			15	93,7

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Penggunaan RTRW sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Batam dipengaruhi juga oleh beberapa alasan. Alasan-alasan yang mempengaruhi penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan adalah karena RTRW adalah salah satu panduan dalam pembangunan, sedangkan bagi responden yang tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program, alasan yang mempengaruhinya adalah karena tidak ada ketentuan bahwa RTRW harus digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan, RTRW tidak memberikan arahan penggunaan lahan yang jelas, tidak menerima atau memiliki dokumen RTRW dan ketidaksesuaian RTRW dengan kondisi saat ini. Alasan terbesar (56,3%) yang dinyatakan responden adalah bahwa Substansi RTRW terlalu umum.

Adanya penilaian RTRW masih terlalu umum ini dapat dikaitkan dengan sifat RTRW yang merupakan rencana jangka panjang (10 tahun) sehingga dalam perencanaan jangka panjang ini sasarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya tercermin dengan sasaran kualitatif berupa kebijakan yang akan di tempuh (Kunarjo, 2002).

Selain itu karena arahan pengembangan yang terdapat di dalam RTRW masih sangat makro sekali terutama dalam rujukan peruntukannya hanya menampilkan *zoning-zoning* saja. Hali ini tentunya belum bisa dipakai dalam menentukan jenis program pembangunan yang akan diusulkan, sehingga sangat sulit untuk menterjemahkan jenis program yang sesuai. Hal ini terkait dengan kedalaman peta yang ditampilkan di dalam RTRW tersebut dimana dalam skala 1:50.000 tidak dapat dibaca batas peruntukkan dengan jelas, sehingga dalam deliniasi peruntukannya juga tidak bisa diukur secara kuantitatif.

Menurut Balbo (1993), salah satu faktor kegagalan rencana tata ruang adalah terlalu lambatnya rencana dalam mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari jangka waktu perencanaan yang biasanya untuk prediksi jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Sedangkan faktor kegagalan lain yang dikemukakan oleh Raakodi (2001) bahwa rencana tata ruang disusun dengan tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya maupun implementasinya, tidak fleksibelnya arahan pemanfaatan ruang, rasa memiliki seluruh aktor pembangunan terhadap rencana tata ruang, standar-standar yang diacu dalam penyusunan rencana tidak diterima oleh para aktor pembangunan dan para politisi yang membahas maupun yang mengesahkan rencana tata ruang tersebut memiliki perspektif jangka pendek.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata instansi sebesar 93,7 % tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program

pembangunan dengan alasan terbanyak karena ketidaksesuaian RTRW yang dibuat dengan kondisi saat ini sebesar 12,4 % dan alasan terbanyak adalah karena substansi RTRW terlalu umum sebesar 56,3 %.

4.3 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Digunakannya Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyusunan Usulan Program dan Proyek Pembangunan Daerah

Salah satu tujuan RTRW disusun adalah supaya dipakai sebagai salah satu kebijakan yang memberikan arahan lokasi pembangunan, dimana RTRW merupakan penjabaran spasial (keruangan) dari Pola Dasar Pembangunan Kota Batam, tidak digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan. Hal ini tentunya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan yaitu pengetahuan terhadap RTRW, Pemahaman terhadap substansi/materi RTRW, perhatian instansi terhadap RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan maupun alasan yang ditunjukkan dari masing-masing faktor tersebut.

4.3.1 Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan RTRW

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan dimana dengan mengetahui gambaran yang jelas tentang keberadaan RTRW nantinya setiap instansi dapat mengimplentasikannya RTRW sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar instansi (68,8%) telah mengetahui keberadaan RTRW Kota Batam, sedangkan 5 dari 16 responden (31,2%) tidak mengetahui keberadaan RTRW Kota Batam.

TABEL IV.4
TINGKAT PENGETAHUAN INSTANSI TERHADAP KEBERADAAN
RTRW KOTA BATAM

Pengetahuan Terhadap RTRW	Frekuensi (f)	Prosentase (%)	Frekuensi Kumulatif
Tidak Mengetahui	5	31,2%	31,2%
Mengetahui	11	68,8 %	100,0 %
Jumlah	16	100,0 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

TABEL IV.5
ALASAN RESPONDEN BERKAITAN DENGAN PENGETAHUAN TERHADAP
KEBERADAAN RTRW KOTA BATAM

No.	Pengetahuan Terhadap Keberadaan RTRW	Alasan	Jumlah	Prosentase
1	Mengetahui	Pernah ada sosialisasi	2	12,5
		Memiliki dokumen RTRW	1	6,3
		Mengikuti pembahasan konsep RTRW	2	12,5
		Bidang pekerjaan berkaitan dengan RTRW	6	37,5
		Jumlah mengetahui	11	68,8
2	Tidak mengetahui	Tidak tahu apa itu RTRW	-	-
		Tidak pernah ada sosialisasi mengenai RTRW	4	24,9
		Tidak memiliki dokumen RTRW	1	6,3
		Tidak pernah mempunyai kepentingan dengan RTRW	-	-
		Jumlah tidak mengetahui	5	31,2

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Berdasarkan hasil wawancara kondisi ini terjadi karena sebagian besar pekerjaan dari responden dalam penelitian ini berkaitan dengan dengan RTRW.

Dari Tabel IV.5 diketahui bahwa 11 responden (68,8%) yang mengetahui adanya RTRW Kota Batam menyatakan bahwa mereka mengetahui RTRW tersebut karena bidang pekerjaannya berkaitan dengan RTRW, selain itu juga pernah ada sosialisasi dan memiliki

dokumen RTRW. Dari beberapa alasan responden tersebut prosentase terbesar (37,5%) adalah menyatakan karena bidang pekerjaannya berkaitan dengan RTRW.

Sedangkan responden yang tidak mengetahui adanya RTRW Kota Batam menyatakan karena memang belum pernah ada sosialisasi sebanyak 4 responden (24,9%) dan mereka tidak memiliki dokumen RTRW dengan prosentase 6,3%.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa alasan tidak diketahuinya keberadaan RTRW ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang telah dilakukan tidak menyebar dan merata keseluruh instansi dan seluruh aparatur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena masih ada instansi yang belum mengetahui adanya RTRW Kota Batam. Selain itu karena posisi jabatan seseorang di dalam instansi tersebut sering berganti-ganti, sehingga personil yang pernah mengikuti sosialisasi ini sudah pindah tugas pada instansi lain ataupun naik pangkat. Hal ini menyebabkan tidak ada kontinuitas pemahaman RTRW selanjutnya, sehingga menyulitkan dalam penerjemahan kedalam program-program pembangunan yang akan diajukan dalam rakorbang.

4.3.2 Pemahaman Instansi Terhadap Materi RTRW

Selain faktor pengetahuan terhadap RTRW, pemahaman terhadap materi RTRW menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, hal ini dikarenakan isi yang terkandung di dalam dokumen RTRW tidak dapat diterjemahkan ke dalam program-program sektoral, apabila RTRW tidak dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh. Karena dengan memahami isi RTRW berarti sudah bisa menterjemahkan kedalam arah penataan ruang dan tahapan pelaksanaan program pembangunan. Besarnya tingkat pemahaman oleh dinas/ instansi terkait dalam hal ini diwakili oleh kepala dinas/ instansi atau minimal orang dalam dinas/ instansi tersebut pernah mengikuti rakorbang satu kali, terhadap isi materi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV.6
PERAN INSTANSI TERHADAP PEMAHAMAN MATERI RTRW
KOTA BATAM

Pemahaman Terhadap RTRW	Frekuensi (f)	Prosentase (%)	Frekuensi Komulatif
Tidak Memahami	12	75,1 %	75,1 %
Memahami	4	24,9 %	100,0 %
Jumlah	16	100,0 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Berdasarkan Tabel IV.6 diketahui, dari 68,8% responden yang mengetahui adanya RTRW kota Batam sebanyak 12 responden atau 75,1% menyatakan tidak memahami materi dalam RTRW.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa secara umum RTRW tidak banyak dipahami oleh responden, hal ini dapat dilihat dari besarnya prosentase responden yang tidak memahami materi dari RTRW, meskipun mereka telah mengetahui adanya RTRW, terbukti bahwa pengetahuan belum bisa menjamin mereka memahami isi materi RTRW tersebut. Rendahnya tingkat pemahaman RTRW ini secara langsung akan berpengaruh terhadap implementasi RTRW, yang berakibat kepada tidak tercapainya tujuan yang terkandung di dalam RTRW. Rendahnya tingkat pemahaman sendiri juga dipengaruhi oleh faktor SDM, faktor penyampaian materi itu sendiri. Artinya materi RTRW harus mudah dipahami dan kontinyu disosialisasikan. Kelemahan penyampaian materi RTRW yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman, apalagi kalau penyampaian informasi materi sudah tidak transparan dan menyeluruh, jelas akan berakibat tidak dipahaminya oleh *stakeholder*, khususnya dinas/ instansi terkait.

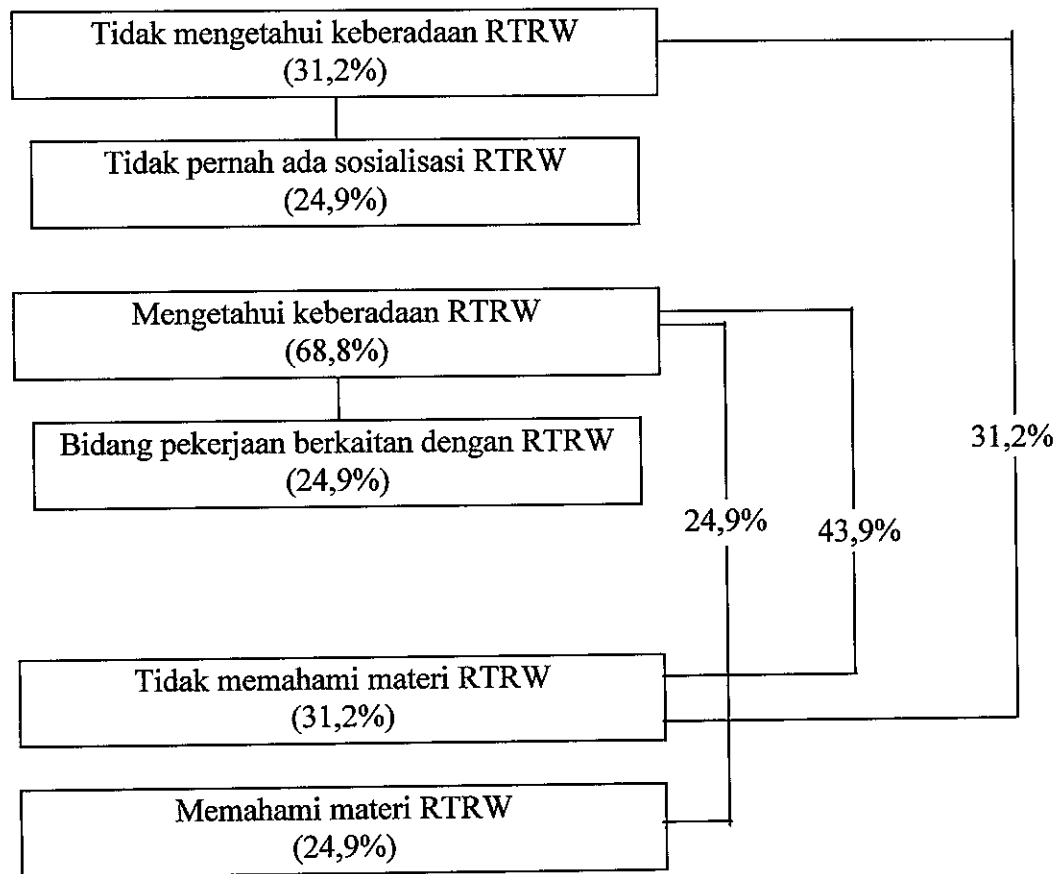
Jika pengetahuan responden terhadap adanya RTRW dikaitkan dengan pemahaman responden terhadap materi dalam RTRW maka akan terlihat seperti pada Tabel IV.7.

TABEL IV.7
KETERKAITAN PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP ADANYA RTRW
DENGAN PEMAHAMAN TERHADAP MATERI RTRW

		Pemahaman Terhadap RTRW				Total	
		Memahami		Tidak Memahami		Jumlah	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		
Pengetahuan Terhadap RTRW	Mengetahui	4	24,9	7	43,9	11	68,8
	Tidak Mengetahui	-	-	5	31,2	5	31,2
Jumlah		4	24,9	12	75,1	16	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Berdasarkan Tabel IV.7 maka dapat diketahui bahwa secara umum RTRW tidak banyak dipahami terbukti dengan masih rendahnya tingkat pemahaman, yaitu sebanyak 11 responden atau sebesar 68,8% dari seluruh total responden yang mengetahui keberadaan RTRW, namun bila dikaitkan dengan tingkat pemahaman, maka sebesar 75,1% tidak memahami RTRW. Responden yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami isi materi yang diuraikan didalam RTRW tersebut sebesar 31,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan pengetahuan keberadaan RTRW dengan pemahaman RTRW menunjukkan angka yang rendah, hanya sebesar 24,9% dari seluruh responden betul-betul mengetahui keberadaan RTRW dan bisa memahami isi materi RTRW. Padahal kalau Bappeda selaku koordinator pelaksana sosialisasi RTRW telah menyerahkan keseluruhan dinas/ instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam, satu set dokumen RTRW yang telah diperdakan dan satu buah peta Rencana Tata Guna Lahan dalam pigura untuk dipasang di masing-masing dinas/instansi tersebut, dengan maksud supaya RTRW dapat diketahui dan dipahami. Secara lebih jelas hasil analisis keterkaitan pengetahuan responden terhadap adanya RTRW dengan pemahaman terhadap materi RTRW dapat disajikan dalam gambar 4.5. berikut ini.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.5

**KETERKAITAN PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP ADANYA RTRW
DENGAN PEMAHAMAN TERHADAP MATERI RTRW**

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan tingkat pengetahuan keberadaan RTRW dengan tingkat pemahaman RTRW menghasilkan 3 kriteria responden yaitu:

- Responden yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan RTRW, ternyata 24,9% menyatakan karena tidak pernah ada sosialisasi. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi yang hanya satu kali dilaksanakan dan ternyata tidak menyentuh seluruh orang yang seharusnya dalam tugasnya berhubungan dengan dokumen RTRW, terutama dalam penyusunan program pembangunan.
- Sedangkan responden yang menyatakan mengetahui keberadaan RTRW karena sesuai dengan bidang pekerjaannya sebesar 24,9%. Hal ini sesuai dengan tuntutan

pekerjaan yang diembannya, sehingga sangat perlu sekali responden dalam hal ini harus mengetahui keberadaan RTRW.

- Responden yang menyatakan mengetahui keberadaan RTRW tetapi tidak memahami isi materi RTRW sebanyak 43,9%. Dari kelompok responden ini paling banyak dari hubungan keterkaitan antara pengetahuan dan pemahaman terhadap RTRW, sehingga bila dicermati lebih lanjut bahwa responden hanya dalam tahap mengetahui saja tanpa mau atau bahkan tidak ada keinginan untuk memahami. Artinya akan sulit sekali responden ini untuk bisa mengerti isi materi RTRW, apalagi dalam kaitannya penjabaran RTRW dalam program pembangunan selanjutnya.

Alasan responden berkaitan dengan tingkat pemahaman isi materi RTRW dapat dilihat dalam tabel IV.8. dibawah ini.

TABEL IV.8
ALASAN RESPONDEN BERKAITAN DENGAN PEMAHAMAN ISI MATERI
RTRW KOTA BATAM

No.	Pemahaman Terhadap Isi Materi RTRW	Alasan	Jumlah	Prosentase
1	Memahami	Informatif	2	12,5
		Uraian disertai dengan peta	-	-
		Substansi rencana dijelaskan dengan baik	-	-
		Memperhatikan berbagai aspek	2	12,5
Jumlah memahami			4	25,0
2	Tidak memahami	Tidak informatif	2	12,5
		Penjelasan kurang	1	6,3
		Substansi rencana masih terlalu umum	8	52,8
		Penggunaan bahasa sulit dimengerti	-	-
Jumlah tidak memahami			12	75,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Di dalam tabel IV.8. di atas, dari responden yang memahami isi materi RTRW, sebesar 12,5% menyampaikan alasan karena RTRW dianggap informatif. Artinya responden tersebut sudah bisa menggunakan RTRW, karena RTRW tersebut bisa dipahami, sehingga tahap pemahaman materi RTRW sudah dapat dilakukan. Responden sebesar 12,5% lainnya berpendapat bahwa bisa memahami RTRW karena isi RTRW sudah memperhatikan beberapa aspek yang bisa diterjemahkan kedalam program pembangunan. Namun kalau kita lihat responden yang tidak memahami isi materi RTRW, sebesar 52,8% adalah responden yang menyatakan bahwa substansi rencana yang terkandung di dalam RTRW masih terlalu umum. Artinya bahwa responden akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kedalam program-program sektoral, yang menjadi tugasnya dalam proses penyusunan program pembangunan. Alasan lain yang disampaikan oleh responden tidak memahami isi materi RTRW karena dokumen RTRW tidak informatif, sebesar 12,5%. Hal ini menyebabkan responden ini tidak bisa juga menerjemahkan RTRW dalam setiap kegiatan. Alasan lain responden yang tidak bisa memahami isi RTRW karena kurangnya penjelasan yang lebih detail dan lebih lengkap sebesar 6,3%.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa mereka tidak memahami isi RTRW karena substansi masih terlalu umum, disamping karena RTRW tidak informatif dan penjelasan yang kurang lengkap.

4.3.3 Perhatian Instansi Terhadap RTRW

Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan RTRW sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program adalah perhatian instansi terhadap RTRW. Yang dimaksud dengan perhatian disini adalah selama dalam penyusunan program pembangunan responden memperhatikan RTRW, terutama dalam penentuan lokasinya. Dengan mengetahui tingkat perhatian instansi terhadap RTRW, maka dapat diasumsikan

bahwa instansi berupaya untuk mensinkronkan usulan rencana program dengan RTRW. Tingkat perhatian instansi terhadap RTRW dalam penyusunan usulan program dapat dilihat dalam tabel IV.9. berikut ini.

TABEL IV.9
PERHATIAN INSTANSI TERHADAP RTRW DALAM PENYUSUNAN
USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Perhatian Terhadap Penyusunan Usulan Program	Frekuensi (f)	Prosentase (%)	Frekuensi Komulatif
Tidak Memperhatikan	11	68,8%	68,8 %
Memperhatikan	5	31,2,0%	100,0 %
Jumlah	16	100,0 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Tabel IV.9 memperlihatkan bahwa sebagian besar instansi (68,8%) tidak memperhatikan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa usulan yang disusun dan diajukan dalam rakorbang tidak memperhatikan RTRW, sehingga kemungkinan tidak sesuai dengan arahan RTRW maksimal bisa sampai 68,8%.

Sedangkan responden yang memperhatikan RTRW dalam penyusunan usulan program sebesar 31,2%. Dari data ini menunjukkan bahwa masih ada instansi yang masih ideal dalam penyusunan usulan program pembangunan dengan memperhatikan RTRW yang ada. Perhatian terhadap RTRW dalam penyusunan usulan pogram ini terkait dengan diarahkan atau tidaknya RTRW untuk digunakan dalam forum Musyawarah Pembangunan (Musbang) ditingkat Desa/Kelurahan dan Musyawarah Pembangunan (Musbang) ditingkat Kecamatan, dan rakorbang di tingkat kota, terutama usulan dari masing-masing dinas/instansi terkait yang mempunyai usulan per sektor.

Untuk mengetahui alasan responde dalam kaitannya dengan perhatian terhadap RTRW dapat dilihat pada tabel IV.10. berikut ini.

TABEL IV.10
ALASAN RESPONDEN BERKAITAN DENGAN PERHATIAN TERHADAP RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Pemahaman Terhadap Isi Materi RTRW	Alasan	Jumlah	Prosentase
1	Memperhatikan	Sudah merupakan ketentuan baku	1	6,3
		Program dan proyek yang diusulkan harus sesuai dengan arahan RTRW	2	12,5
		Agar pembangunan lebih terarah	1	6,3
		RTRW dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman pembangunan	1	6,3
		Jumlah memperhatikan	5	31,2
2	Tidak memperhatikan	Program dan proyek yang diusulkan belum diatur dalam RTRW	1	6,3
		Arahan kegiatan dalam RTRW kalah cepat dengan perkembangan yang terjadi	1	6,3
		RTRW tidak operasional karena arahan penentuan lokasi dan tahapan pelaksanaan program dalam RTRW tidak jelas	2	12,5
		Usulan program dan proyek bersifat non fisik	7	43,7
		Jumlah tidak memperhatikan	11	68,8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Dari Tabel IV.10 di atas dapat diketahui bahwa alasan responden memperhatikan RTRW dalam penyusunan usulan programnya karena program pembangunan yang diusulkan memerlukan pertimbangan lokasi yang diarahkan oleh RTRW sebesar 12,5%. Sedangkan responden yang menyatakan alasan karena sudah merupakan ketentuan baku sebesar 6,3%, juga alasan agar pembangunan lebih terarah sebesar 6,3% serta alasan karena RTRW dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan sebesar 6,3%. Dari beberapa alasan tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan perhatian dinas/instansi yang terkait untuk bisa memanfaatkan RTRW sebaik mungkin.

Dari uraian diatas alasan yang paling banyak dipilih responden yang tidak memperhatikan RTRW dalam penyusunan usulan programnya adalah bahwa program dan proyek yang diusulkan oleh instansi bersifat non fisik (43,7%) sehingga responden beranggapan bahwa karena usulan program dan proyek yang diusulkan adalah non fisik maka RTRW tidak perlu diperhatikan dalam penyusunan usulan program.

Alasan lain yang dipilih adalah bahwa program dan proyek yang diusulkan instansi tidak diatur dalam RTRW (6,3%) dan arahan yang diusulkan kalah cepat dengan perkembangan yang terjadi (6,3%). Namun sebesar 12,5% responden menyatakan bahwa, RTRW tidak operasional karena arahan penentuan lokasi dan tahapan pelaksanaan program dalam RTRW tidak jelas. Hal ini tentunya terkait dengan produk RTRW yang masih sangat makro, sehingga penjabaran RTRW dalam rencana yang lebih detail sangat diperlukan oleh dinas/instansi terkait.

Tidak operasionalnya RTRW tentunya bertentangan dengan pendapat Patta (1995) yang menyatakan bahwa produk perencanaan tata ruang sejak awal disusun berdasarkan suatu wawasan keahlian yang telah mempertimbangkan aspek operasionalisasinya, sesuai dengan tingkat hirarkis dan fungsional dari rencana tata ruang yang ingin dihasilkan.

Lebih jauh lagi bila di tabulasi silang antara perhatian instansi terhadap RTRW dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program dapat dilihat pada Tabel IV.11.

TABEL IV.11

**KETERKAITAN PERHATIAN INSTANSI TERHADAP RTRW DENGAN
PENGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN
PROGRAM PEMBANGUNAN**

		Penggunaan RTRW				Total	
		Menggunakan		Tidak Menggunakan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perhatian Terhadap RTRW	Memperhatikan	1	6,3	3	18,7	4	25,0
	Tidak Memperhatikan	-	-	12	75,0	12	75,0
Jumlah		1	6,3	15	93,7	16	100,0

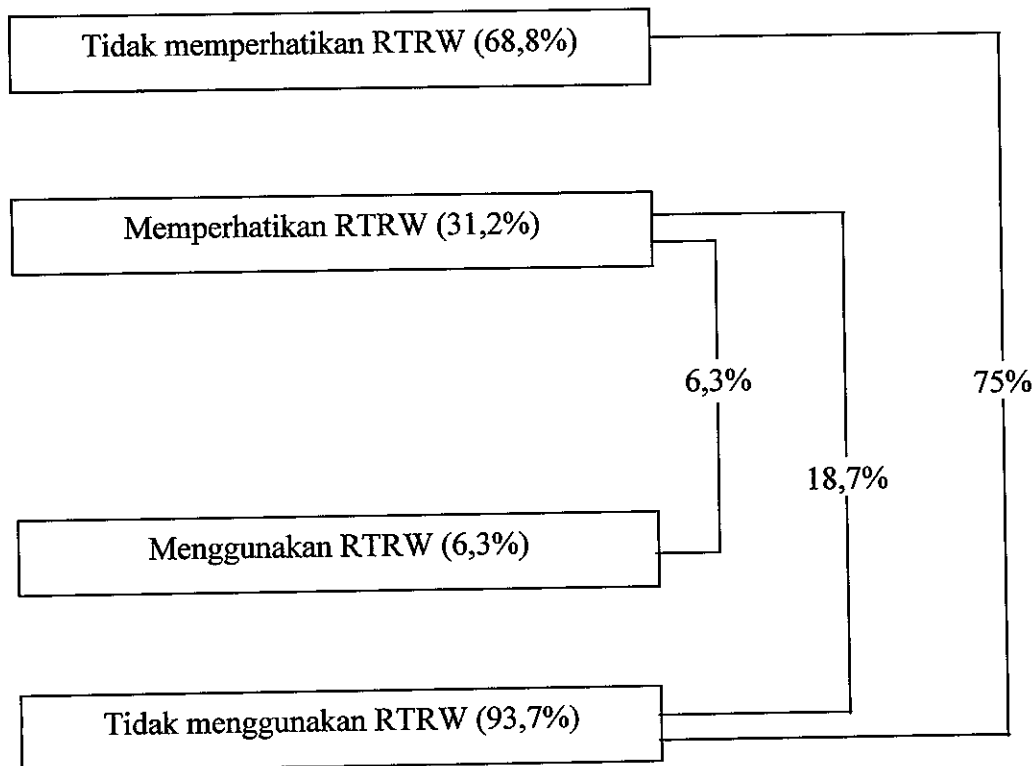
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Instansi yang memperhatikan RTRW dalam proses penyusunannya dan menggunakan RTRW sebesar 6,3%. Artinya bahwa hanya satu instansi yang memperhatikan dan menggunakan RTRW.

Responden yang tidak menggunakan RTRW tetapi memperhatikan RTRW tersebut sebesar 18,7%. Hal ini memperlihatkan adanya perhatian dari responden yang sudah memperhatikan, namun yang perlu dipertanyakan kenapa tidak menggunakannya dalam penyusunan usulan program yang dibuat.

Responden lain menyatakan tidak memperhatikan dan tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, yaitu sebesar 75%. Kondisi ini sangat memprihatinkan khususnya kalau kita lihat tujuan sosialisasi RTRW adalah supaya program pembangunan yang disusun berpedoman pada RTRW. Artinya terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara dinas/instansi terkait dengan pihak Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan Rakorbang dalam mengimplentasikan RTRW tersebut.

Untuk melihat lebih jelasnya keterkaitan perhatian instansi terhadap RTRW dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan dapat dilihat dalam Gambar 4.6. berikut ini.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.6

**KETERKAITAN PERHATIAN INSTANSI TERHADAP RTRW DENGAN
PENGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN
PROGRAM PEMBANGUNAN**

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program, walaupun ada sebesar 25% responden yang memperhatikan RTRW tersebut. Artinya, implementasi RTRW sangat rendah, dan kemungkinan terjadinya penyimpangan usulan dari RTRW bisa maksimal 93,7%.

4.4 Analisis Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa sebagian besar instansi belum menggunakan RTRW dalam proses penyusunan usulan program

pembangunan. Dengan menggunakan beberapa faktor yang diteliti yang diduga mempengaruhi tidak digunakannya RTRW, faktor pengetahuan terhadap adanya RTRW, faktor pemahaman terhadap materi RTRW dan faktor perhatian terhadap RTRW dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Jika pengetahuan terhadap adanya RTRW dan pemahaman terhadap materi RTRW dikaitkan dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program, diperoleh matriks keterkaitan diantara ketiganya seperti terlihat pada Tabel IV. 12.

TABEL IV.12

KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW DENGAN PEMAHAMAN ISI MATERI RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

			Penggunaan RTRW				Jumlah	
			Menggunakan		Tidak Menggunakan			
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
Pengetahuan terhadap RTRW	Mengetahui	Memahami	1	6,3	3	18,7	4	25,0
		Tidak Memahami	-	-	6	37,5	6	37,5
	Tidak Mengetahui	Memahami	-	-	-	-	-	-
		Tidak Memahami	-	-	6	37,5	6	37,5
Jumlah			1	6,3	15	93,7	16	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

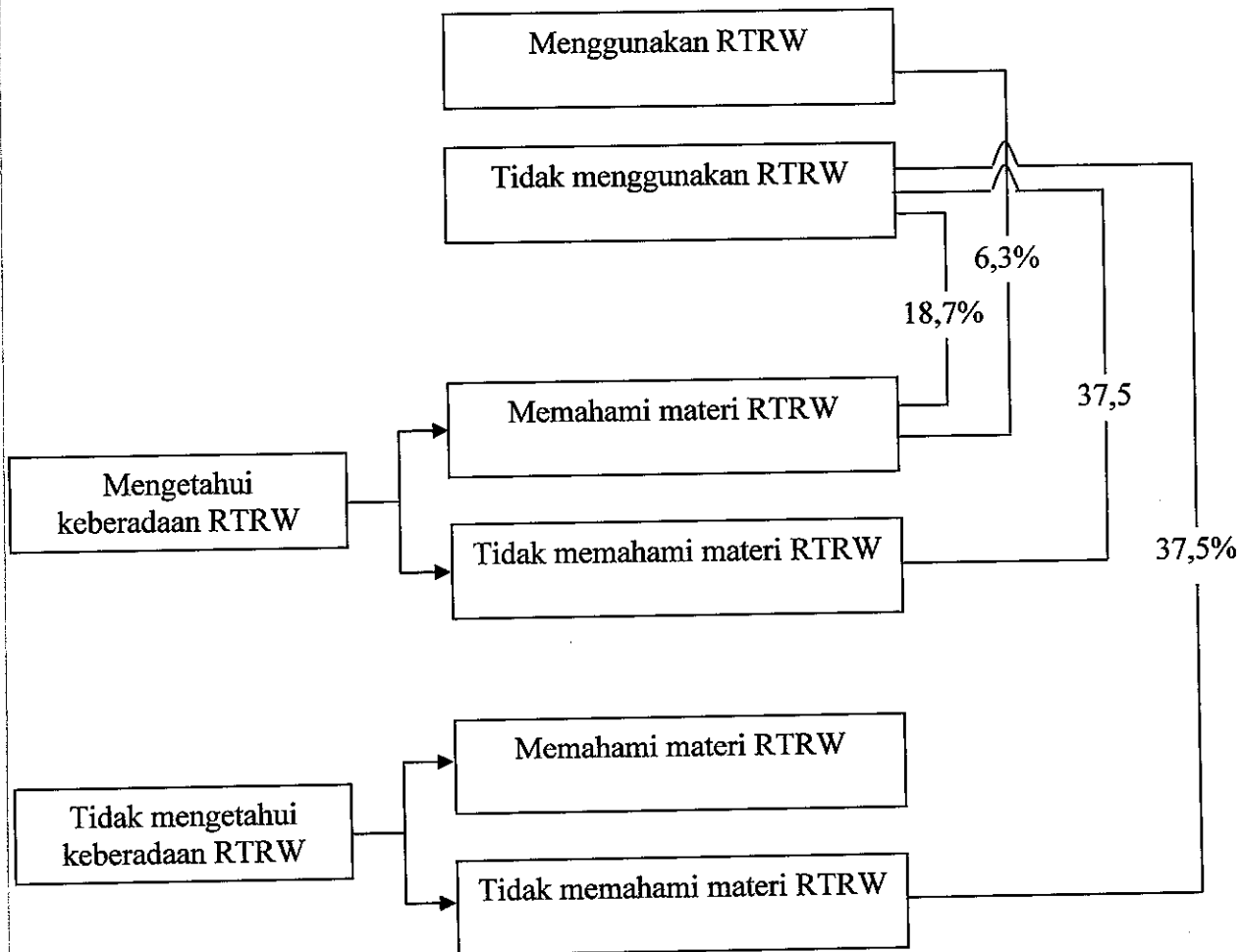
Berdasarkan Tabel IV.12 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah yang mengetahui keberadaan RTRW, yang memahami isi materi RTRW, dan menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan sebesar 6,3%. Artinya hanya satu instansi saja yang mengetahui, memahami dan menggunakan RTRW tersebut.

Sedangkan responden yang menyatakan mengetahui, memahami tetapi tidak menggunakan RTRW tersebut sebesar 18,7%. Hal ini menunjukkan adanya responden yang mengetahui RTRW, yang bisa memahami isi materi RTRW, tetapi menggunakan RTRW tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan. Artinya walaupun

responden ini mengetahui dan memahami RTRW, tetapi usulan yang dibuat belum tentu sesuai dengan arahan RTRW, karena tidak mau menggunakan RTRW.

Responden yang menyatakan mengetahui, tetapi tidak memahami dan tidak menggunakan RTRW sebesar 37,5%. Kelompok responden ini sebenarnya sudah mengetahui adanya RTRW, namun tidak bisa memahami sehingga tidak mungkin bisa menggunakan RTRW tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan. Responden ini ada kemungkinan hanya mengetahui saja, dan tidak pernah mempelajari apalagi mengetahui cara penjabaran kedalam rencana program pembangunan yang akan diusulkan.

Sedangkan responden yang tidak mengetahui, tidak memahami dan tidak menggunakan RTRW sebesar 37,5%. Kelompok responden ini sudah pasti tidak menggunakan RTRW, tidak mengetahui keberadaan RTRW serta tidak bisa memahami isi materi RTRW tersebut. Artinya tugas Bappeda sebagai koordinator Tim Pelaksana sosialisasi semakin berat, karena masih banyaknya dinas/ instansi yang belum mengetahui dan memahami RTRW. Lebih jelasnya pengetahuan terhadap adanya RTRW dengan pemahaman isi materi RTRW dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan dapat dilihat dalam gambar 4.7. berikut ini.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.7

KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW DENGAN PEMAHAMAN ISI MATERI RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dari gambar hubungan keterkaitan antara pengetahuan, pemahaman dan penggunaan RTRW tersebut, dapat disimpulkan terdapat 4 karakteristik penggunaan RTRW. Dari keempat karakteristik tersebut, hanya 6,3% yang mengetahui, memahami dan menggunakan RTRW, selebihnya tidak menggunakan RTRW. Faktor terbesar adalah tidak memahami materi RTRW. Kalau kita lihat alasan responden didepan, maka tingkat pemahaman yang rendah bisa disebabkan karena produk tata ruang ini tidak informatif, atau memang responden tidak pernah mengikuti sosialisasi RTRW, dan bisa juga karena kurangnya sosialisasi.

Sedangkan jika pengetahuan terhadap adanya RTRW dan perhatian terhadap RTRW dikaitkan dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, maka akan terlihat seperti pada tabel IV.13

TABEL IV.13
KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW DAN PERHATIAN TERHADAP RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

			Penggunaan RTRW				Jumlah	
			Menggunakan		Tidak Menggunakan			
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
Pengetahuan terhadap RTRW	Mengetahui	Memperhatikan	1	6,3	3	19,8	4	25,1
		Tidak Memperhatikan	-	-	7	43,7	7	43,7
	Tidak Mengetahui	Memperhatikan	-	-	-	-	-	-
		Tidak Memperhatikan	-	-	5	31,2	5	31,2
Jumlah			1	6,3	15	93,7	16	100,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Tabel IV.13 menunjukkan bahwa sebanyak 6,3 %, menyatakan mengetahui adanya RTRW, memperhatikan RTRW tersebut dan menggunakannya. Hal ini menunjukkan adanya implementasi RTRW, walaupun hanya oleh satu instansi saja.

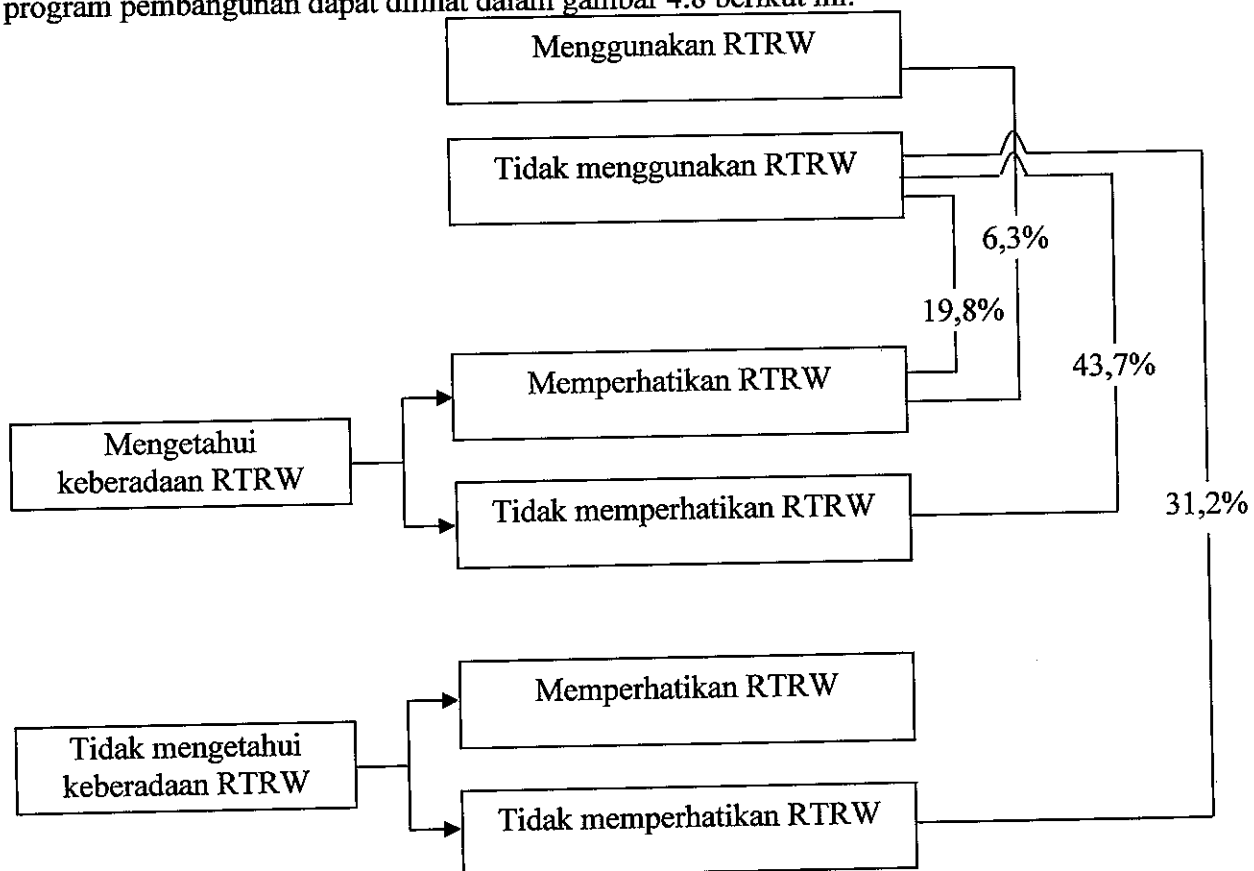
Sedangkan responden yang mengetahui keberadaan RTRW dan sudah memperhatikan tetapi tidak menggunakan RTRW sebagai panduan dalam penyusunan program pembangunan sebesar 19,8%. Kondisi ini menyebabkan usulan oleh dinas tersebut bisa tidak sesuai dengan RTRW, walaupun responden ini sudah mengetahui dan memperhatikan RTRW.

Kelompok responden yang mengetahui keberadaan RTRW tetapi tidak memperhatikan RTRW juga tidak menggunakan RTRW sebagai salah satu panduan dalam penyusunan program pembangunan sebesar 43,7%. Kelompok responden ini merupakan

jumlah paling besar, sehingga permasalahan tidak digunakannya RTRW menjadi penyebab rendahnya tingkat implementasi RTRW.

Sedangkan responden yang tidak mengetahui, tidak memperhatikan RTRW serta tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan sebesar 31,2%. Responden yang seperti ini harus segera mendapatkan kesempatan mengikuti sosialisasi, karena tugas yang dilakukan tiap tahun dalam menyusun usulan program agar sesuai dengan RTRW yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan pengetahuan terhadap adanya RTRW dan perhatian terhadap RTRW dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan dapat dilihat dalam gambar 4.8 berikut ini.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.8

KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW DAN PERHATIAN TERHADAP RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan keterkaitan antara faktor pengetahuan dan faktor perhatian mempengaruhi tingkat penggunaan RTRW, sehingga kesesuaian usulan program pembangunan dengan arahan yang terdapat di dalam RTRW sangat dominan. Rendahnya tingkat pemahaman dan perhatian menyebabkan rendahnya tingkat implementasi RTRW.

Dari analisis sebelumnya, dapat dikaitkan antara pengetahuan terhadap adanya RTRW, pemahaman terhadap isi materi RTRW dan perhatian terhadap RTRW dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, seperti terlihat dalam tabel IV.14 berikut ini.

TABEL IV.14

**KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW ,
PEMAHAMAN TERHADAP ISI MATERI RTRW DAN PERHATIAN TERHADAP
RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN
PROGRAM PEMBANGUNAN**

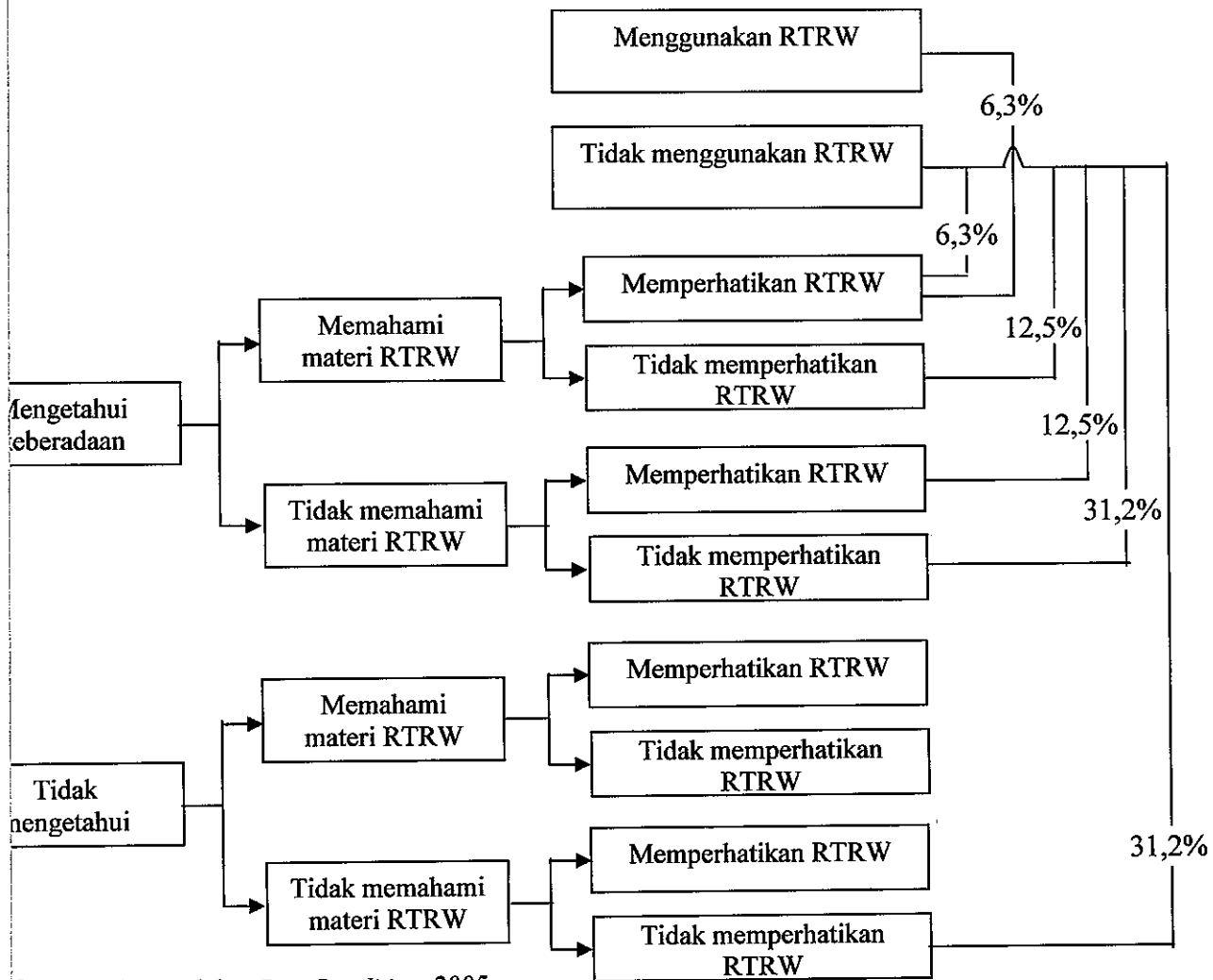
			Penggunaan RTRW				Jumlah	
			Menggunakan		Tidak Menggunakan			
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
Mengetahui	Memahami	Memperhatikan	1	6,3	1	6,3	2	12,5
		Tidak Memperhatikan	-	-	2	12,5	2	12,5
	Tidak Memahami	Memperhatikan	-	-	2	12,5	2	12,5
		Tidak Memperhatikan	-	-	5	31,2	5	31,2
Tidak Mengetahui	Memahami	Memperhatikan	-	-	-	-	-	-
		Tidak Memperhatikan	-	-	-	-	-	-
	Tidak Memahami	Memperhatikan	-	-	-	-	-	-
		Tidak Memperhatikan	-	-	5	31,2	5	31,2
Jumlah			1	6,3	15	93,7	16	100,0

umber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

Dari Tabel IV.14, terdapat 6 karakteristik instansi dalam kaitannya dengan penggunaan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, antara lain:

1. Instansi yang tidak mengetahui adanya RTRW, tidak memahami materi RTRW, tidak memperhatikan RTRW dan tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, karakteristik instansi ini merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 5 dari 16 instansi yang berada di Pemerintahan Kota Batam sebesar 31,2%.
2. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, memahami isi materi RTRW juga memperhatikan RTRW tersebut, tetapi tidak menggunakannya dalam penyusunan usulan program pembangunan. Jumlah instansi dengan karakteristik ini hanya 1 instansi saja dengan prosentase 6,3% dari 16 instansi yang menjadi responden dalam penelitian ini.
3. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, memahami isi materi RTRW tersebut tetapi tidak memperhatikan dan tidak menggunakannya dalam proses penyusunan usulan program pembangunan, karakteristik instansi ini sebanyak 2 instansi dengan prosentase 12,5%.
4. Hal ini juga terjadi pada instansi yang mengetahui adanya RTRW, tidak memahami RTRW tersebut, memperhatikan RTRW tetapi tidak menggunakan RTRW tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan. Karakteristik ini dengan prosentase 12,5%.
5. Begitu juga dengan instansi yang mengetahui adanya RTRW, tidak memahami, tidak memperhatikan dan tidak menggunakan RTRW tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan sebanyak 31,2%.
6. Sedangkan instansi yang tidak mengetahui, tidak memahami dan tidak memperhatikan RTRW, sehingga bisa menggunakan RTRW hanya 6,3 %.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan unsur-unsur tersebut diatas, dapat dilihat dalam gambar 4.9. berikut ini.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.9

KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RTRW, PEMAHAMAN TERHADAP ISI MATERI RTRW DAN PERHATIAN TERHADAP RTRW DENGAN PENGGUNAAN RTRW DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Dari gambar diatas, keenam karakteristik yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar atau 5 karakteristik menyatakan tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan. Dan faktor tidak mengetahui dan tidak memahami menjadi faktor penyebab terbesar dalam keputusan tidak menggunakan RTRW.

Dari beberapa hal yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Tidak semua instansi yang mengetahui, memahami dan memperhatikan RTRW juga menggunakannya sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program pembangunan, hal ini tentunya terkait dengan alasan responden tidak menggunakan RTRW bahwa substansi RTRW masih terlalu umum.
2. Instansi yang tidak mengetahui keberadaan RTRW langsung menyatakan tidak menggunakan RTRW tersebut dalam penyusunan usulan program.
3. RTRW harus benar-benar dipahami sehingga RTRW dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan pembangunan.

4.5 Analisis Proses Sosialisasi RTRW Terhadap Dinas/Instansi Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Dari beberapa alasan yang diungkapkan oleh instansi-instansi yang bidang kerjanya berkaitan dengan RTRW dapat diketahui bahwa masih kurang efektifnya sosialisasi RTRW yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam, kegiatan sosialisasi RTRW sudah dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai tahap sosialisasi di tingkat Desa, yaitu dengan melibatkan aparat desa, Ketua RW serta tokoh-tokoh masyarakat. Di tiap Kantor Kelurahan/ Desa dipasang peta Rencana Tata Guna Lahan RTRW. Dan aparat setempat diberi wewenang untuk bisa menjembatani pemahaman peta ini oleh masyarakat setempat dan apabila ada yang tidak bisa dijelaskan, maka Bappeda Kota Batam siap memberikan keterangan lebih jauh. Peta ini diharapkan juga sebagai panduan saat ada usulan program yang akan disampaikan dalam rakorbang ditingkat Desa.

Sedangkan di tingkat Kecamatan, telah dilakukan sosialisasi Perda RTRW dan pemberian Peta Rencana Tata Guna Lahan di 8 (delapan) kecamatan, untuk dipasang di tempat umum. Hal ini dimaksudkan agar supaya masyarakat bisa secara langsung bisa membaca, memahami serta mengerti arahan pengembangan Kota Batam 10 tahun kedepan.

Sosialisasi di Tingkat Kota Batam dilakukan sekali dalam bentuk sarasehan dengan melibatkan unsur dewan, seluruh instansi terkait, camat, lurah serta para pelaku pembangunan (stake holder) terutama pihak-pihak swasta yang terlibat langsung dalam pemanfaatan RTRW ini.

Sedangkan pemasangan baliho peta rencana tata guna lahan baru akan dilaksanakan pada tahun 2006, mengingat kebutuhan anggaran pembangunan yang ada terbatas.

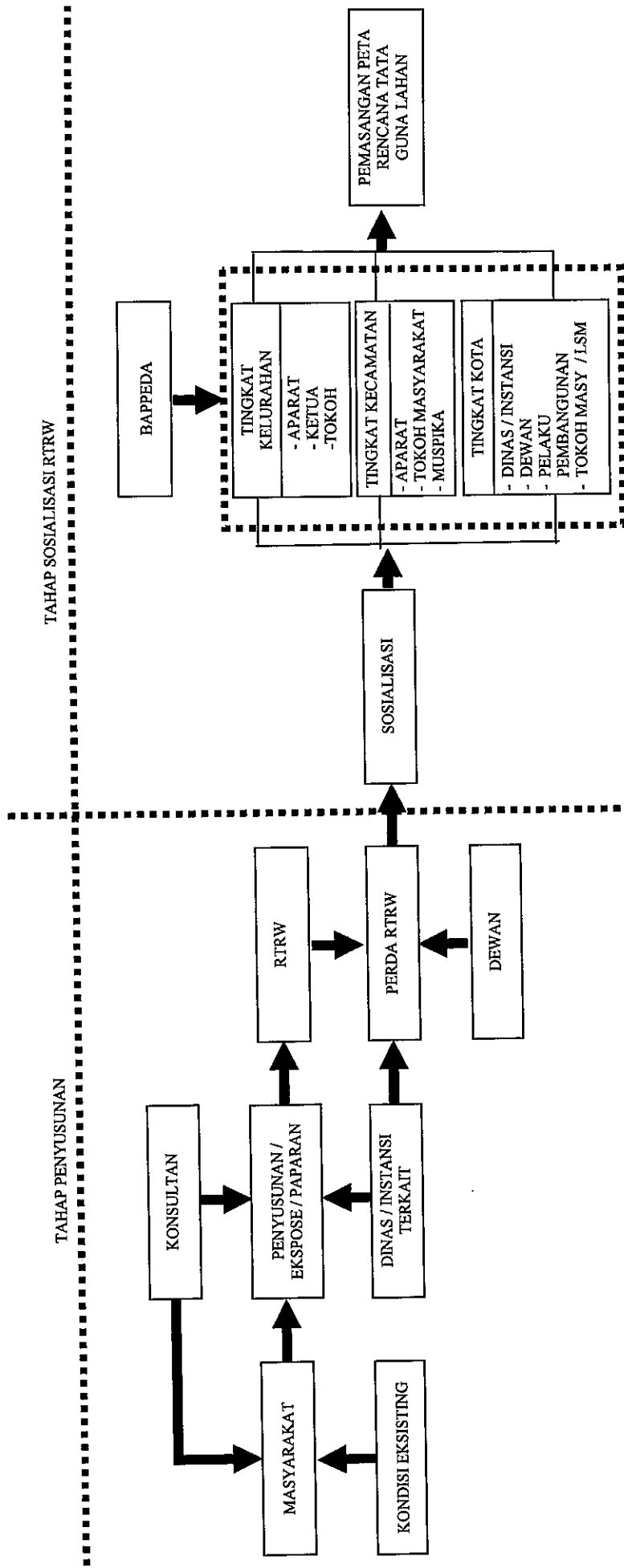
Dengan melihat upaya sosialisasi RTRW yang telah dilakukan oleh Bappeda Kota Batam ini, sebenarnya sudah cukup baik. Namun kalau kaji lebih jauh bagaimana pemahaman masyarakat tentang RTRW terhadap hasil sosialisasi ini, memang sangat beragam dan bahkan jauh dari harapan. Hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya hasil yang dicapai, antara lain:

1. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Keterbatasan forum sosialisasi, sedangkan masyarakat Kota Batam termasuk masyarakat yang sangat kritis.
3. Perkembangan Kota Batam yang sangat cepat, menyebabkan masyarakat tidak bisa sepenuhnya mengikuti perkembangan pembangunan termasuk perencanaan RTRW ini.

Maka untuk memaksimalkan fungsi Dokumen RTRW ini, seyogyanya RTRW ini juga tidak hanya sekedar bisa dipahami, diperhatikan dan digunakan namun RTRW ini juga perlu dimengerti substansi-substansi yang ada didalamnya, sehingga RTRW dapat

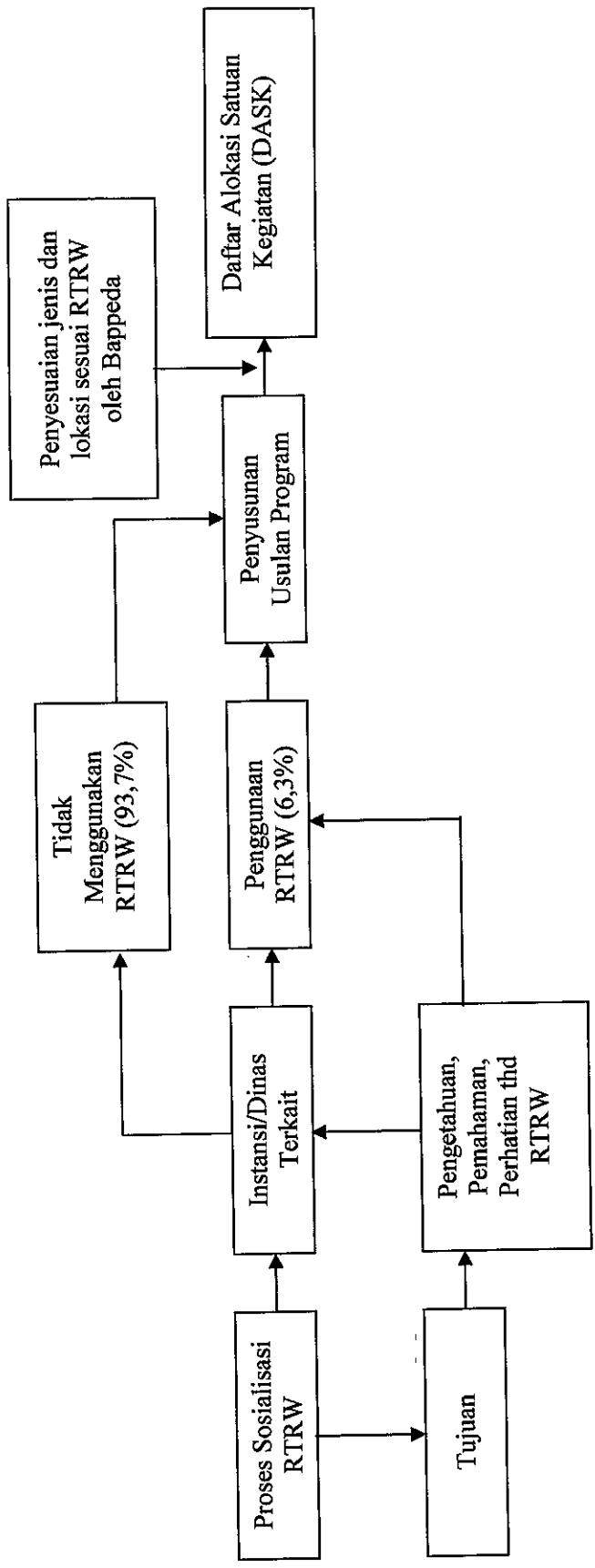
digunakan untuk keperluan tersebut. Proses sosialisasi RTRW Kota Batam terhadap dinas/instansi terkait dapat dilihat dalam gambar 4.10.

Dalam analisis keterkaitan antara tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan sosialisasi dengan penggunaan RTRW, maka kelihatan sekali rendahnya tingkat penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan, yaitu 93,7% tidak menggunakan RTRW. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya salah satu tujuan sosialisasi, agar RTRW ini dapat dipakai sebagai salah satu panduan dalam menyusun program pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam gambar 4.11.



Sumber: Wawancara Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Kota Batam, 2005

GAMBAR 4.10
PROSES SOSIALISASI RTRW KOTA BATAM TERHADAP DINAS/INSTANSI TERKAIT



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.11
ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN PROSES SOSIALISASI DENGAN PENGGUNAAN RTRW
DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

4.6 Analisis Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Batam

Proses penyusunan usulan program pembangunan Kota Batam, sekarang lebih diarahkan Bottom up. Sebagai langkah awal dilakukan Musyawarah Pembangunan di tingkat Kelurahan/ Desa yang juga dihadiri oleh unsur Bappeda. Usulan program yang dibahas ditingkat Kelurahan / desa ini berasal dari masyarakat yang dikumpulkan dan menjadi bahan yang akan dibahas bersama. Pada tahap ini pihak Bappeda sudah mulai mengarahkan semua usulan terhadap arah pengembangan Kota Batam yang ada di dalam dokumen RTRW.

Dari tingkat kelurahan, usulan masyarakat ini dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibahas menjadi usulan kecamatan. Pada tahap ini, sudah melibatkan unsur Bappeda, unsur dinas terkait. Pembahasan usulan dilakukan per sektor dan di lakukan *crosscheck/* uji silang terhadap daftar usulan dari dinas/ instansi terkait. Hal ini dilakukan karena setiap dinas/ instansi juga mempunyai usulan program persektor, sehingga pada pembahasan di tingkat kecamatan ini sudah muncul skala prioritas. Apabila suatu usulan sudah diusulkan oleh desa, dan muncul sebagai usulan kecamatan serta diusulkan juga oleh kecamatan, maka bisa dikategorikan sebagai usulan yang mempunyai skala prioritas untuk dibawa pada pembahasan di tingkat Kota.

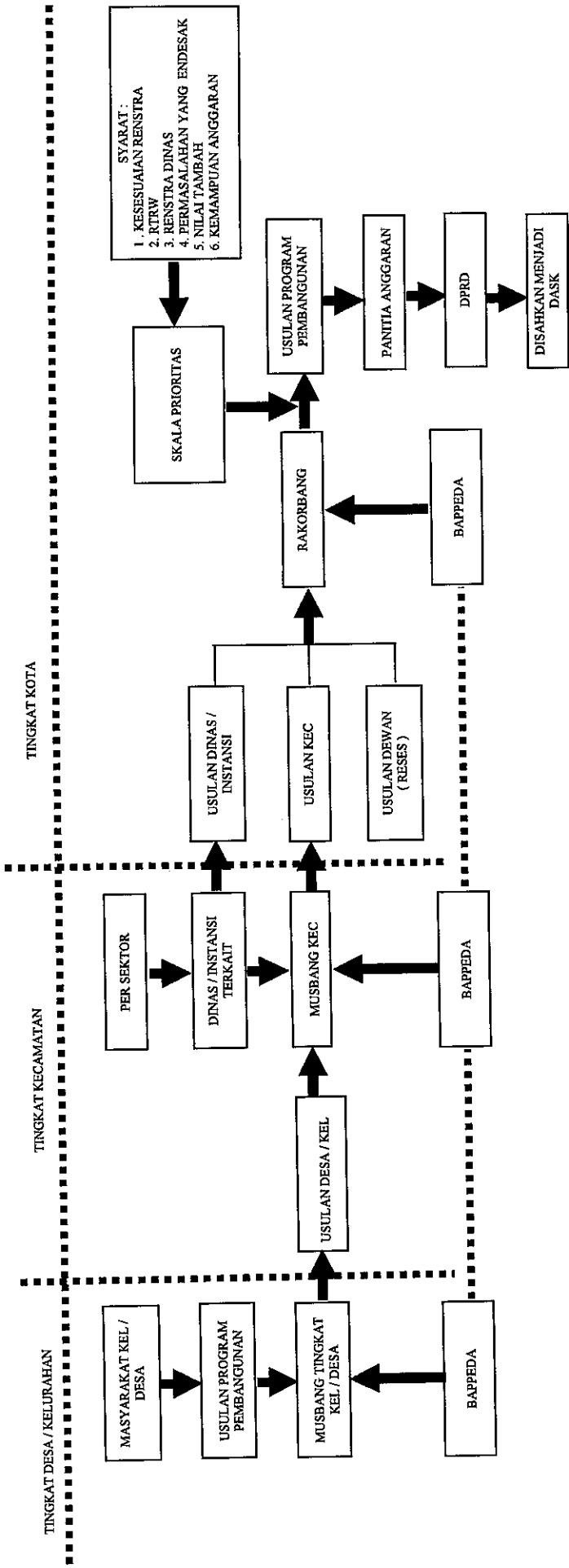
Pembahasan di tingkat Kota diikuti oleh unsur seluruh dinas terkait, kecamatan dan Dewan. Jadi pada saat rakorbang, suatu usulan akan dikaji siapa saja yang mengusulkan terhadap hal yang sama. Kalau satu usulan diajukan oleh kecamatan, dinas dan dewan, berarti usulan tersebut masuk dalam skala prioritas. Disini dewan juga mengajukan usulan, karena dewan pada saat *reses* melakukan kunjungan ke daerah untuk menginventarisir dan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat langsung tentang beberapa permasalahan pembangunan yang ada dan seterusnya akan dijadikan usulan program.

Dari setiap usulan yang diajukan harus selalu ada skala prioritas untuk mendukung faktanya yang ada dan nyata dilapangan. Bappeda dalam hal ini selaku koordinator pelaksanaan rakorbang, selalu melihat jenis dan lokasi usulan terhadap peta rencana tata guna lahan RTRW. Hal ini dilakukan karena salah satu fungsi Bappeda adalah sebagai pengendali pemanfaatan ruang pada tahap pra kontrksi, sehingga arah pembangunan dapat tercapai seperti tercantum didalam RTRW tersebut. Bappeda dalam hal ini menjadi motivator dalam pengarahannya penggunaan RTRW, dan unsur bappeda selalu ada dalam setiap pembahasan usulan program.

Beberapa kriteria yang menentukan skala prioritas bagi suatu usulan program yaitu:

1. Kesesuaian dengan renstra
2. Rencana makro RTRW
3. Renstra dinas
4. Permasalahan yang mendesak
5. Nilai tambah/ multiplier effect
6. Kemampuan anggaran

Proses penyusunan usulan program pembangunan Kota Batam dapat dilihat dalam gambar 4.12 sberikut ini.



Sumber: Wawancara Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Kota Batam, 2005

GAMBAR 4.12
PROSES PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

4.7 Analisis Kelembagaan Bidang Fisik Dengan Prasarana Bappeda Kota Batam

Bappeda Kota Batam merupakan salah satu badan yang secara struktural berada di bawah walikota, dengan ini dipimpin oleh seorang ketua. Di bawah ketua ada 5 (lima) bidang/ bagian, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Program
2. Bidang Penelitian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:
 - Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan
 - Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan
3. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Membawahi:
 - Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - Sub Bidang Ekonomi
4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
 - Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup
5. Unit Pelaksana Teknis.

Dari beberapa sub bidang tersebut yang terkait langsung sebagai koordinator pelaksanaan rakorbang adalah Bidang Fisik dan Prasarana yang mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan dan menyelaraskan usuan program/ proyek pembangunan, serta mengadakan penelitian untuk kepentingan daerah. Selain itu yang berkaitan dengan RTRW, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas menyusun tata ruang dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, Bidang ini mempunyai tugas melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/ proyek pembangunan daerah. Dalam mendukung seluruh tugas yang diembang Bidang Fisik dan Parasarana, jumlah personil yang ada adalah 7 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Isi tupoksi Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Fisik dan Parasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan di bidang Fisik dan Prasarana
2. Uraian tugas meliputi:
 - a. Menyusun dan menyiapkan rencana pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
 - c. Melakukan inventasasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Fisik dan Prasarana membawahi:
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup
4. Sub Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan di Bidang Perhubungan dan Pengembangan Wilayah.

5. Uraian Tugas meliputi:

- a. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program pembangunan prasarana jalan, jembatan/ pelantar, prasarana darat, laut dan udara serta pengembangan wilayah yang disusun oleh instansi terkait;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan disub bidang perhubungan dan pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

6. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan baha-bahan di bidang Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup.

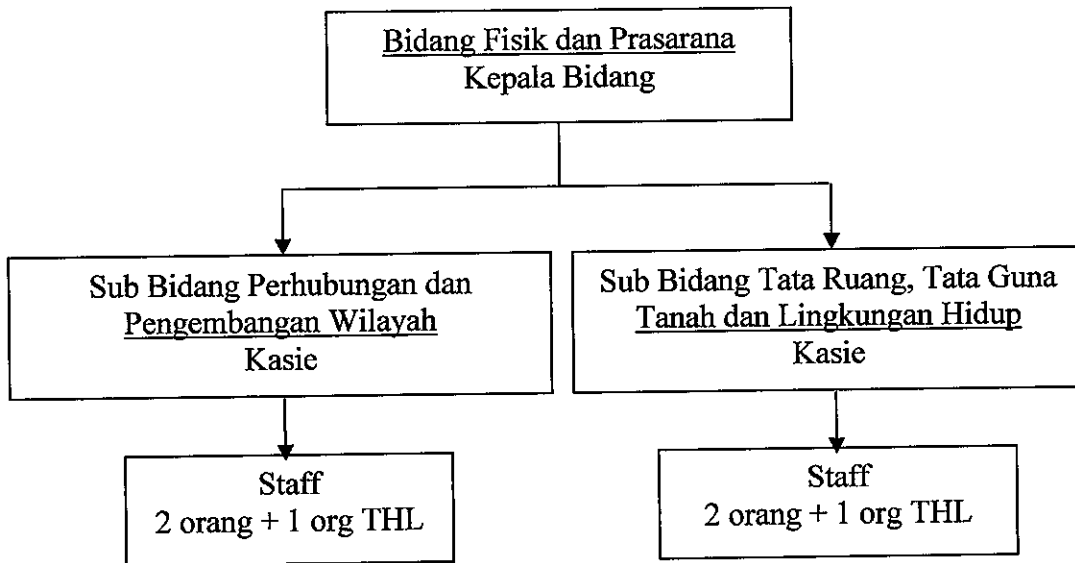
7. Uraian tugas meliputi:

- a. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan program penataan ruang, penataan guna tanah dan lingkungan;
- b. Melakukan inventarisasi di sub bidang tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Dari tupoksi di atas bila dikaitkan dengan jumlah SDM yang ada, maka akan kelihatan bahwa ada beberapa tugas dirangkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.15, tentang Proyeksi Kebutuhan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM di Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Batam berikut ini.

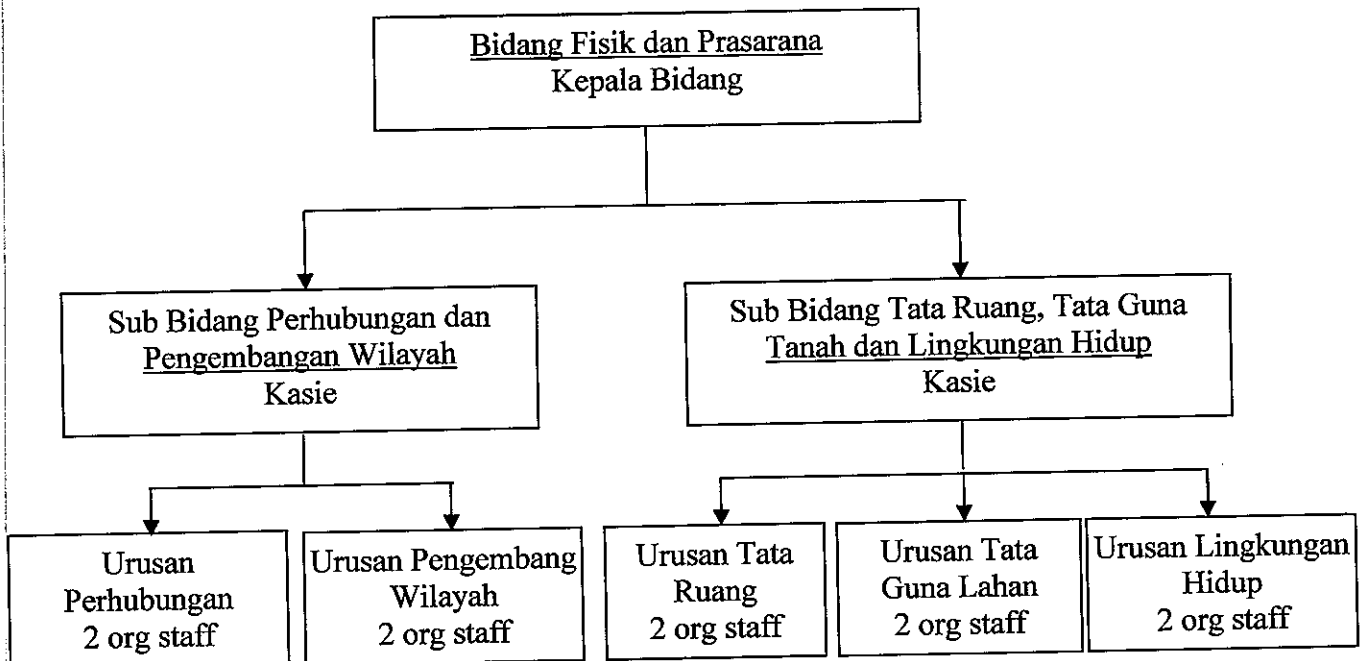
Jadi secara ideal, kalau semua tugas diharuskan berjalan maksimal dan memenuhi tupoksi yang ada diatas, maka dari 7 personil yang ada harus ditambah menjadi 13 orang. (lihat gambar 4.13 dan gambar 4.14)

Dari hasil wawancara, sampai saat ini Bappeda khususnya Bidang Fisik dan Prasarana bisa menjalankan semua tugas yang diberikan. Namun sejalan dengan perkembangan Kota Batam yang sangat cepat, serta kedepannya harus juga disusun turunan rencana tata ruang dari RTRW yang ada, baik RDTRK maupun RTRK serta RTBL, maka sangat berat beban tugas yang harus dijalankan. Sebagai salah satu langkah antisipasi adalah dengan dengan penambahan personil sampai jumlah yang ideal terhadap tuntutan tugas kedepan. Kalau dilihat dari segi kualitas SDM yang ada, 4 orang adalah lulusan S1 dan ada 3 orang yang sudah lulus S2, sebenarnya sudah cukup untuk mendukung kinerja yang sesuai dengan tuntutan tugasnya. Selain itu juga beberapa orang juga telah mengikuti kursus, seminar, sarasehan dan pelatihan yang menyangkut tugas keseharian di Bidang Fisik dan Parasarana. Permasalahan terhadap SDM yang sering timbul adalah terlalu seringnya terjadi pergantian orang yang menjabat dalam struktur di Bappeda ini. Hal ini menjadi permasalahan klasik bagi dinas/ instansi di seluruh jajaran pemerintahan Kota Batam dan Pemerintahan di Indonesia. Karena tidak ada yang bisa menjadi jaminan bagi seorang yang duduk dalam jabatan sekarang untuk tidak diganti dalam tenggang masa tertentu. Tentunya hal ini sangat mengganggu program dan kinerja khususnya di Bidang Fisik dan Prasarana, karrena setiap berganti orang selalu berganti juga kebijakan yang diterapkan.



Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Batam, 2004

GAMBAR 4.13
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG FISIK DAN PRASARANA (FISPR)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA)
KOTA BATAM TAHUN 2004



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2005

GAMBAR 4.14
RENCANA PENGEMBANGAN
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG FISIK DAN PRASARANA (FISPR)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA)
KOTA BATAM TAHUN 2004

TABEL IV.15.

PROYEKSI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 BIDANG FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2011

KONDISI EKSTING 2001			PROYEKSI 10 TAHUN KEDEPAN SAMPAI DENGAN 2011				
No	Posisi	Jumlah	Tingkat Pendidikan	No	Posisi	Jumlah	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Bidang Fispra	1 Orang	S2	1	Kepala Bidang Fispra	1 Orang	S2
2	Kasubbid Perhubungan dan Pengembangan Wilayah	1 Orang	S2	2	Kasubbid Perhubungan dan Pengembangan Wilayah	1 Orang	S2
3	Staff	2 Orang	S1	3	Urusan Perhubungan	2 Orang	S1
4	Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Lingkungan Hidup	1 Orang	S2	4	Urusan Pengembangan Wilayah	2 Orang	S1
5	Staff	2 Orang	S1	5	Kasubbid Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, Lingkungan Hidup	1 Orang	S2
				6	Urusan Tata Ruang	2 Orang	S1
				7	Urusan Tata Guna Lahan	2 Orang	S1
				8	Urusan Lingkungan Hidup	2 Orang	S1
	Jumlah	7 Orang			Jumlah	13 Orang	

Sumber: Bappeda dan Peneliti, 2005

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan beberapa hasil temuan dalam penelitian serta beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, baik yang terjadi dilapangan maupun temuan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu diuraikan juga beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yang diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam rangka perbaikan kinerja dan solusi dalam memecahkan beberapa permasalahan yang ada sebagai upaya memaksimalkan implementasi RTRW rangka pembangunan Kota Batam ke depan.

5.1. Temuan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disajikan beberapa temuan, yaitu:

1. Sebagian besar program pembangunan yang diusulkan oleh dinas/ instansi terkait pada tahun 2004, yaitu sebesar 81% telah sesuai dengan arahan yang terdapat di dalam RTRW.
2. Sebanyak 15 dari 16 instansi atau sebanyak (93,7%) tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan. Alasan terbanyak adalah karena substansi RTRW terlalu umum sebesar 56,3 %.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan daerah, meliputi:
 - a. Tingkat pengetahuan, dimana sebagian besar instansi yaitu 68,8% telah mengetahui keberadaan RTRW

- b. Tingkat pemahaman, yaitu sebesar 75,1% instansi tidak memahami materi RTRW
 - c. Tingkat perhatian instansi terhadap RTRW sangat rendah, dimana 68,8% tidak memperhatikan RTRW dalam penyusunan program pembangunan
4. Dari 3 faktor diatas, Terdapat 6 karakteristik instansi dalam penggunaan RTRW pada penyusunan usulan program pembangunan, yaitu:
- a. Instansi yang tidak mengetahui adanya RTRW, tidak memahami materi RTRW, tidak memperhatikan RTRW dan tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan, sebesar 31,2%.
 - b. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, memahami isi materi RTRW juga memperhatikan RTRW tersebut serta menggunakannya dalam penyusunan usulan program pembangunan sebesar 6,3%.
 - c. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, memahami isi materi RTRW tersebut tetapi tidak memperhatikan dan menggunakannya dalam proses penyusunan usulan program pembangunan, sebesar 12,5%.
 - d. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, tidak memahami RTRW, memperhatikan RTRW tetapi tidak menggunakan RTRW, sebesar 12,5%.
 - e. Instansi yang mengetahui adanya RTRW, tidak memahami, tidak memperhatikan dan tidak menggunakan RTRW sebesar 31,2%.
 - f. Instansi yang mengetahui, memahami dan memperhatikan RTRW, serta menggunakan RTRW sebesar 6,3 %.
5. Dalam proses sosialisasi RTRW, telah dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, tingkat kecamatan maupun di tingkat kota, namun bila dilihat dari data keusioner, dari instansi yang mengetahui keberadaan RTRW, sebesar 12,5 % menyatakan pernah ada sosialisasi. Sedangkan dari seluruh instansi sebanyak 24,9% menyatakan tidak pernah ada sosialisasi.

6. Terdapat 7 orang di bawah Bidang Fisik dan Prasarana, yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), dengan kualitas tingkat pendidikan 3 orang S2 dan 4 orang S1.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam sebagai salah satu pedoman kebijakan pembangunan yang memberikan arahan lokasi kegiatan pembangunan belum sepenuhnya digunakan oleh dinas/ instansi terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini dapat diketahui karena sebagian besar yaitu 93,7% instansi ternyata tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan walaupun jika dilihat dari program yang diusulkan dalam APBD Kota Batam pada tahun 2004 telah ada yang sesuai dengan arahan lokasi RTRW Kota Batam yaitu sebesar 81% dari seluruh program yang diusulkan.

Faktor utama yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW dalam penyusunan program pembangunan adalah karena substansi RTRW masih terlalu umum (56,3%). Sebanyak 68,8% dari jumlah keseluruhan instansi yang tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan menyatakan mengetahui keberadaan RTRW, dan sebanyak 18,7% dari instansi yang tidak menggunakan RTRW sebenarnya menyatakan memperhatikan RTRW dalam penyusunan program pembangunan. Sedangkan dari seluruh instansi yang tidak menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan, sebanyak 18,7% telah memahami isi materi RTRW tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa RTRW tidak cukup diketahui keberadaannya dan diperhatikan penyusunan usulan program, tetapi juga harus dipahami isi materinya agar dapat digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan,

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan alasan yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW dalam penyusunan program pembangunan yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan perhatian terhadap RTRW adalah:

1. Substansi RTRW masih terlalu umum sehingga tidak bisa dijabarkan kedalam program sektoral dimasing-masing dinas/ instansi terkait, RTRW sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, tidak adanya ketentuan bahwa RTRW harus digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan, RTRW tidak memberikan arahan penggunaan yang jelas serta ada instansi yang belum menerima atau memiliki dokumen RTRW.
2. Masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi RTRW kepada seluruh aparatur pemerintah dan dinas/ instansi terkait, karena masih ada sebanyak 24,9% dinas/ instansi yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi RTRW, dan sebanyak 6,3% menyatakan tidak memiliki dokumen RTRW.
3. Masih kurang optimalnya fungsi Bappeda Kota Batam dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi), karena secara ideal seharusnya dibutuhkan jumlah SDM sebanyak 13 orang, sementara kondisi yang ada sekarang berjumlah 7 orang. Hal ini terkait dengan kemampuan Bappeda supaya bisa terlibat lebih intensif lagi dalam setiap kegiatan pembahasan usulan program pembangunan, baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan maupun di tingkat kota.

Tidak digunakannya RTRW dalam penyusunan usulan program pembangunan akan memberikan dampak terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan yang terdapat di dalam RTRW, hal ini menjadi kendala bagi proses implementasi RTRW Kota Batam. Untuk itu perlu segera dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya supaya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya RTRW yaitu pengetahuan terhadap keberadaan RTRW, pemahaman terhadap isi materi RTRW dan perhatian terhadap RTRW oleh dinas/ instansi terkait dapat diatasi.

5.3. Rekomendasi

Dengan adanya beberapa permasalahan yang didapat dari hasil analisis dan kesimpulan, maka untuk meningkatkan implemnetasi RTRW yang maksimal dalam program pembangunan Kota Batam mendatang, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi RTRW lebih kontinyu kepada masyarakat luas, baik melalui pertemuan, media cetak maupun elektronik serta pemasangan baliho. Hal ini dimaksudkan agar supaya masyarakat Kota Batam betul-betul mengetahui arah pengembangan Kota Batam kedepan.
2. Dalam implementasi RTRW ini Bappeda harus lebih giat lagi dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya yang terlibat langsung dalam penyusunan program pembangunan. Bappeda sebagai pengendali pada tahap pra konstruksi mempunyai tugas yang sangat vital, artinya kalau tahap ini bisa bekerja dengan baik, bisa dipastikan akan sangat kecil terjadinya penyimpangan dalam arah pembangunan.
3. Perlu adanya panambahan dan upaya meningkatkan kualitas SDM khususnya di Bidang Fisik dan Prasarana, supaya tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban bisa dilaksanakan dengan maksimal.
4. Pihak Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Bappeda Kota Batam harus segera menyusun rencana detail sebagai penjabaran dari RTRW, sehingga rencana tata ruang yang ada lebih bisa diterjemahkan dalam program pembangunan.

4.4. Usulan Bagi Studi Lanjutan

Untuk studi lebih lanjut dapat diteruskan dengan studi yang difokuskan terhadap evaluasi RTRW terhadap aspek yang mempengaruhi implementasi secara multi sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budihardjo, Eko, dkk. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1995. Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budihardjo, Eko. 1997a. Arsitektur & Kota di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1997b. Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Budihardjo, Eko. 1997c. Tata Ruang Perkotaan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko. 1999. Kota Berkelanjutan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Burke, Edmund M. 2004. Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan *A Participatory Approach to Urban Planning* oleh Puji Lestari). Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Chaniago, Adrinof A. 2001. Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Conyers, Diana. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*.
- Darmawan, Edy. 2003. Teori dan Implementasi Perancangan Kota. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sudharto P. 2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Inoguchi, Takashi. et all. 2002. Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi. Terjemahan "*Cities and Environment*" oleh Rasti Suryandani. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES.
- Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
- Kaiser, Edward John et all. 1979. *Urban Land Use Planning*. University of Illionis Press.
- Kodoatie, Robert J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Miles, Matthew B. 1992. Analisis Data Kualitatif (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Maharadja, Apul D. 2003. *Membangun Indonesia; Studi Kasus Batam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Octarevia, David. 2003. *Tinjauan Suatu Model FTZ di Indonesia: Free Trade Zone Khas Batam: Berpenduduk dan Berpemerintah Kota*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soetomo, Sugiono. 2002. *Dari Urbanisasi ke Morfologi Kota: Mencari Konsep Pembangunan Tata Ruang Kota yang Beragam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

BUKU DATA/LAPORAN/RENCANA

- Pemerintah Kota Batam. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2001-2011*.
- Pemerintah Kota Batam. *Rencana Program dan Kegiatan Hasil Rakorbang II Kota Batam Tahun 2004 Bidang Sosial dan Budaya*

SEMINAR/LOKAKARYA

- Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 2003. *Pedoman Pelaksanaan Rakorbang*. Disampaikan pada Workshop Stakeholder Forum Koordinasi Pembangunan Daerah tanggal 17-18 Maret 2003.

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri di Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse*) Hingga Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Moi-moi dan Kasem.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*) Mencakup Pulau Batam, Rempang dan Galang Serta Beberapa Pulau Kecil di Sekitarnya (Wilayah Barelang).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1998 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.